



**PENGARUH LIKUIDITAS, *LEVERAGE*
DAN KOMISARIS INDEPENDEN TERHADAP AGRESIVITAS
PAJAK PERUSAHAAN (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN
SUB SEKTOR MAKANAN DAN MINUMAN YANG
TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE TAHUN
2016-2019)**

Skripsi

Dibuat Oleh:

Ratu Alfiyya Rafiana

0221 17 163

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS PAKUAN
BOGOR
SEPTEMBER 2021**



**PENGARUH LIKUIDITAS, *LEVERAGE*
DAN KOMISARIS INDEPENDEN TERHADAP AGRESIVITAS
PAJAK PERUSAHAAN (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN
SUB SEKTOR MAKANAN DAN MINUMAN YANG
TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE TAHUN
2016-2019)**

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Akuntansi
Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan
Bogor

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
(Dr. Hendro Sasongko, Ak., MM., CA)

Ketua Program Studi Akuntansi
(Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA.,
CMA., CCSA., C.A., CSEP., QIA., CFE)

**PENGARUH LIKUIDITAS, *LEVERAGE*
DAN KOMISARIS INDEPENDEN TERHADAP AGRESIVITAS
PAJAK PERUSAHAAN (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN
SUB SEKTOR MAKANAN DAN MINUMAN YANG
TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE TAHUN
2016-2019)**

Skripsi

Telah disidangkan dan dinyatakan lulus
Pada hari Kamis, tanggal 30 September 2021

Ratu Alfiyya Rafiana

0221 17 163

Disetujui

Ketua Penguji Sidang

(Prof. Dr. Yohanes Indrayono, Ak., M.M., CA)

Ketua Komisi Pembimbing

(Ketut Sunarta, Ak., M.M., C.A.PIA)

Anggota Komisi Pembimbing

(Mutiar Puspa Widyowati, S.E., M.Acc., Ak)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ratu Alfiyya Rafiana
NPM : 0221 17 163
Judul Skripsi : Pengaruh Likuiditas, *Leverage* dan Komisaris Independen terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2016-2019)

Dengan ini saya menyatakan bahwa Paten dan Hak Cipta dari produk skripsi di atas adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun.

Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Dengan ini saya melimpahkan Paten. Hak Cipta dari karya tulis saya kepada Universitas Pakuan.

Bogor, September 2021



Ratu Alfiyya Rafiana
022117163

**© Hak Cipta milik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan, tahun 2021*)
Hak Cipta Dilindungi Undang-undang**

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah, dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.

Dilarang mengumumkan dan atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seizin Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.

**) Tahun menyesuaikan dengan tahun lulus.*

ABSTRAK

RATU ALFIYYA RAFIANA. 022117163. Pengaruh Likuiditas, *Leverage* dan Komisaris Independen Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2016-2019). Di bawah bimbingan : KETUT SUNARTA dan MUTIARA PUSPA WIDYOWATI. 2021.

Agresivitas pajak merupakan tindakan yang umum terjadi di kalangan perusahaan-perusahaan besar di seluruh dunia. Hal ini dikarenakan perusahaan menganggap pajak merupakan beban yang dapat mengurangi pendapatan atau laba perusahaan, adapun perusahaan sebagai wajib pajak badan menginginkan laba secara maksimal, sehingga perusahaan akan melakukan tindakan agresivitas pajak yang bertujuan untuk meminimalkan beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan. Contoh praktik agresivitas pajak yaitu melakukan *leverage*, likuiditas adalah faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak dan komisaris independen adalah sebagai pengawas dan mengarahkan agar perusahaan beroperasi sesuai dengan peraturan yang berlaku, hal ini termasuk dalam keputusan perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh likuiditas, *leverage* dan komisaris independen terhadap agresivitas pajak perusahaan.

Jenis penelitian ini adalah verifikatif dengan metode penelitian *Explanatory Survey*, teknik penelitian ini menggunakan statistik inferensial dan teknik analisis data statistik deskriptif. Penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif, data adalah *time series* dan menggunakan sumber data sekunder. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 32 perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2016-2019. Metode penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode *Purposive Sampling* berdasarkan kriteria tertentu dan memperoleh sampel sebanyak 6 perusahaan. Data diolah menggunakan SPSS (*Statistical Product and Service Solution*) Versi 25. Metode statistik uji kualitas data menggunakan statistik deskriptif, uji asumsi klasik (uji normalitas, uji multikolonieritas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi), uji regresi linear berganda, uji hipotesis (uji statistik t atau parsial, uji statistik F atau simultan dan koefisien determinasi).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Likuiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan. *Leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan. Komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan. Untuk likuiditas, *leverage* dan komisaris independen tidak berpengaruh secara simultan atau bersama-sama terhadap agresivitas pajak perusahaan.

Kata kunci: Likuiditas, *Leverage*, Komisaris Independen, Agresivitas Pajak Perusahaan

PRAKATA

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul “Pengaruh Likuiditas, *Leverage* dan Komisaris Independen terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2016-2019)” penyusunan skripsi ini dilakukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Akuntansi Program S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program studi Akuntansi Universitas Pakuan Bogor.

Begitu banyak pihak yang telah bersedia terlibat dan membantu serta memberikan masukan positif dalam usaha menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua tercinta yaitu Ayahanda Bapak Tubagus Rafiudin dan Ibunda Euis Yuliawati, serta keluarga besar yang telah memberikan semangat, motivasi, nasihat, dukungan dalam bentuk apapun dan juga doa-doa yang tiada hentinya untuk penulis.
2. Bapak Dr. Hendro Sasongko, Ak., M.M., C.A. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Chaidir, S.E., M.M. Selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Dr. Retno Martanti Endah Lestari, S.E, M.Si., CMA., CAPM., CAP. Selaku Wakil Dekan II Bidang SDM dan Keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Arief Tri Hardiyanto, AK., MBA., CMA., CCSA., C.A., CSEP., QIA., CFE. Selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Agung Fajar Ilmiyono, S.E., M.A.k., AWP., CTCP., CFA., CNPHRP., CAP. Selaku Asisten Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan yang selalu memberikan pengarahan dan motivasi.

7. Bapak Ketut Sunarta, Ak., M.M., C.A.PIA. Selaku Ketua Komisi Pembimbing yang telah membantu serta membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Ibu Mutiara Puspa Widyowati, S.E., M.Acc., Ak. Selaku Anggota Komisi Pembimbing yang telah membantu serta membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan yang telah membimbing dan memberikan ilmu selama masa perkuliahan.
10. Sahabat-sahabat seperjuanganku yaitu Ani Mulyani, Devi Maynabila, Qory Nurul Nissa, Krisnofianti Allawiyah, Maya Miranda, Ziehan Hadi, Ustia Ningsih Hasanah, Rofiatul Adawiyah, Siti Irviani Amaliah dan Melinda yang selalu menemani dan menyemangati penulis selama masa perkuliahan.
11. Teman-teman Akuntansi Angkatan 2017, khususnya kelas D yang telah menjadi teman seperjuangan selama masa perkuliahan.

Penulis menyadari masih terdapat banyak sekali kekurangan di dalam skripsi ini, oleh karena itu penulis memohon maaf atas segala kekurangan yang terdapat di dalam skripsi ini. Kiranya skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Akhir kata, penulis memanjatkan doa semoga semua pihak yang disebutkan serta pihak-pihak lain yang telah membantu namun tidak dapat disebutkan dalam kesempatan ini, mendapatkan anugrah dan barokah dari Allah Subhanahu Wata'ala. Amin yaa rabbal'alamin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bogor, September 2021

Ratu Alfiyya Rafiana

Penulis

DAFTAR ISI

	Hal
JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PENGESAHAN & PERNYATAAN TELAH DISIDANGKAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN PELIMPAHAN HAK CIPTA	iv
LEMBAR HAK CIPTA	v
ABSTRAK	vi
PRAKATA	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Penelitian	1
1.2. Identifikasi dan Perumusan Masalah	6
1.2.1. Identifikasi Masalah	6
1.2.2. Perumusan Masalah	6
1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian	6
1.3.1. Maksud Penelitian	6
1.3.2. Tujuan Penelitian	6
1.4. Kegunaan Penelitian	7
1.4.1. Kegunaan Praktis	7
1.4.2. Kegunaan Akademis	7
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1. Pajak	8
2.1.1. Pengertian Pajak	8
2.1.2. Fungsi Pajak	8

2.1.3. Pengelompokan Pajak.....	9
2.1.4. Sistem Pemungutan Pajak.....	10
2.1.5. Timbul dan Hapusnya Utang Pajak.....	10
2.1.6. Hambatan Pemungutan Pajak	11
2.2. Variabel Independen	11
2.2.1. Likuiditas.....	11
2.2.1.1. Pengertian Likuiditas	11
2.2.1.2. Tujuan dan Manfaat Rasio Likuiditas	12
2.2.1.3. Jenis-Jenis Rasio Likuiditas	13
2.2.1.4. <i>Current Ratio</i>	16
2.2.2. <i>Leverage</i>	16
2.2.2.1. Pengertian <i>Leverage</i>	16
2.2.2.2. Tujuan dan Manfaat <i>Leverage</i>	17
2.2.2.3. Jenis-Jenis Rasio <i>Leverage</i>	18
2.2.2.4. <i>Debt to Asset Ratio (Debt Ratio)</i>	20
2.2.3. Komisaris Independen.....	20
2.2.3.1. Pengertian Komisaris Independen.....	20
2.2.3.2. Proporsi Komisaris Independen	21
2.2.3.3. Kriteria Komisaris Independen	21
2.2.3.4. Tugas Komisaris Independen.....	22
2.2.3.5. Wewenang Komisaris Independen.....	22
2.2.3.6. Rumus Perhitungan Komisaris Independen.....	23
2.3. Variabel Dependen.....	23
2.3.1. Agresivitas Pajak Perusahaan	23
2.3.1.1. Pengertian Agresivitas Pajak.....	23
2.3.1.2. Keuntungan dan Kerugian Melakukan Agresivitas Pajak .	24
2.3.1.3. Metode Pengukuran Agresivitas Pajak	25
2.4. Penelitian Sebelumnya dan Kerangka Pemikiran	26
2.4.1. Penelitian Sebelumnya	26
2.4.2. Kerangka Pemikiran.....	34
2.4.2.1. Pengaruh Likuiditas Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan	35

2.4.2.2. Pengaruh <i>Leverage</i> Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan	35
2.4.2.3. Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan.....	37
2.4.2.4. Pengaruh Likuiditas, <i>Leverage</i> dan Komisaris Independen Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan	37
2.5. Hipotesis Penelitian.....	40
BAB III. METODE PENELITIAN.....	41
3.1. Jenis Penelitian.....	41
3.2. Objek, Unit Analisis dan Lokasi Penelitian	41
3.2.1. Objek Penelitian	41
3.2.2. Unit Analisis.....	41
3.2.3. Lokasi Penelitian.....	41
3.3. Jenis dan Sumber Data Penelitian.....	41
3.4. Operasionalisasi Variabel.....	42
3.4.1. Variabel Independen	42
3.4.2. Variabel Dependen.....	43
3.5. Metode Penarikan Sampel.....	44
3.6. Metode Pengumpulan Data	49
3.7. Metode Pengolahan atau Analisis Data.....	49
3.7.1. Statistik Deskriptif	49
3.7.2. Uji Asumsi Klasik	49
3.7.2.1. Uji Normalitas.....	49
3.7.2.2. Uji Multikolonieritas.....	50
3.7.2.3. Uji Heteroskedastisitas.....	50
3.7.2.4. Uji Autokorelasi	50
3.7.3. Analisis Regresi Linear Berganda.....	51
3.7.4. Uji Hipotesis.....	52
3.7.4.1. Uji Statistik t atau Parsial.....	52
3.7.4.2. Uji Statistik F atau Simultan	53
3.7.4.3. Koefisien Determinasi.....	54
BAB IV. HASIL PENELITIAN	55
4.1. Hasil Pengumpulan Data.....	55

4.2. Kondisi/Fakta Variabel yang Diteliti	56
4.2.1. Data Likuiditas (Rasio Lancar/ <i>Current Ratio</i>) pada Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2019.....	56
4.2.2. Data <i>Leverage</i> (<i>Debt to Asset Ratio/Debt Ratio</i>) pada Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2019.....	57
4.2.3. Data Komisaris Independen pada Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2019.....	59
4.2.4. Data Agresivitas Pajak Perusahaan (<i>ETR/Effective Tax Rate</i>) pada Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2019.....	61
4.3. Analisis Data	62
4.3.1. Hasil Analisis Statistik Deskriptif.....	63
4.3.2. Uji Asumsi Klasik	64
4.3.3. Analisis Regresi Linear Berganda.....	70
4.3.4. Pengujian Hipotesis.....	71
4.4. Pembahasan dan Interpretasi Hasil Penelitian	74
4.4.1. Rekonsiliasi Fiskal	74
4.4.2. Pengaruh Likuiditas Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan pada Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia	89
4.4.3. Pengaruh <i>Leverage</i> Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan pada Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia	91
4.4.4. Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan pada Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.....	92
4.4.5. Pengaruh Likuiditas, <i>Leverage</i> dan Komisaris Independen Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan pada Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia ..	94
BAB V. SIMPULAN DAN SARAN	96
5.1. Simpulan	96
5.2. Saran.....	97

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Likuiditas, <i>Leverage</i> , Komisaris Independen dan Agresivitas Pajak Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman Periode Tahun 2016-2019.....	3
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	26
Tabel 2.2 Matriks Penelitian Terdahulu.....	33
Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel	44
Tabel 3.2 Daftar Populasi Penelitian.....	45
Tabel 3.3 Daftar Pemilihan Sampel Penelitian	47
Tabel 3.4 Daftar Sampel Penelitian	48
Tabel 3.5 Pengambilan Keputusan Uji Durbin - Watson (DW test).....	51
Tabel 4.1 Daftar Perusahaan yang Dijadikan Sampel Penelitian.....	55
Tabel 4.2 Rasio Lancar (<i>Current Ratio</i>) pada Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Periode 2016-2019.....	56
Tabel 4.3 <i>Debt to Asset Ratio (Debt Ratio)</i> pada Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Periode 2016-2019.....	58
Tabel 4.4 Komisaris Independen pada Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Periode 2016-2019.....	60
Tabel 4.5 ETR (<i>Effective Tax Rate</i>) pada Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Periode 2016-2019.....	62
Tabel 4.6 Analisis Statistik Deskriptif	63
Tabel 4.7 Hasil Uji Normalitas dengan <i>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</i>	65
Tabel 4.8 Hasil Uji Multikolonieritas	66
Tabel 4.9 Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan Spearman's Rho.....	67
Tabel 4.10 Pengambilan Keputusan Ada atau Tidaknya Autokorelasi.....	68
Tabel 4.11 Hasil Uji Autokorelasi dengan Durbin - Watson (DW Test).....	68
Tabel 4.12 Durbin Watson <i>Test Bound</i>	69
Tabel 4.13 Hasil Uji Autokorelasi dengan <i>Run Test</i>	69
Tabel 4.14 Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda	70
Tabel 4.15 Hasil Uji Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji Statistik t).....	72
Tabel 4.16 Hasil Uji Koefisien Regresi Secara Simultan (Uji Statistik F)	73
Tabel 4.17 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)	74
Tabel 4.18 Koreksi Fiskal terhadap Laporan Keuangan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk Tahun 2019 (Dalam Jutaan Rupiah)	75

Tabel 4.19 Koreksi Fiskal terhadap Laporan Keuangan PT Indofood Sukses Makmur Tbk Tahun 2019 (Dalam Jutaan Rupiah).....	77
Tabel 4.20 Koreksi Fiskal terhadap Laporan Keuangan PT Multi Bintang Indonesia Tbk Tahun 2019 (Dalam Jutaan Rupiah).....	79
Tabel 4.21 Koreksi Fiskal terhadap Laporan Keuangan PT Mayora Indah Tbk Tahun 2019 (Dalam Jutaan Rupiah).....	81
Tabel 4.22 Koreksi Fiskal terhadap Laporan Keuangan PT Sekar Laut Tbk Tahun 2019 (Dalam Jutaan Rupiah).....	83
Tabel 4.23 Koreksi Fiskal terhadap Laporan Keuangan PT Ultra Jaya Milk Industry dan Trading Company Tahun 2019 (Dalam Jutaan Rupiah)	87

DAFTAR GAMBAR

Grafik 1.1 Likuiditas, <i>Leverage</i> , Komisaris Independen dan Agresivitas Pajak Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman Periode Tahun 2016-2019.....	3
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	39

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Populasi Penelitian pada Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2016-2019	106
Lampiran 2 Sampel Penelitian pada Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2016-2019	107
Lampiran 3 Laporan Keuangan Rasio Lancar (<i>Current Ratio</i>)	107
Lampiran 4 Laporan Keuangan <i>Debt to Asset Ratio (Debt Ratio)</i>	109
Lampiran 5 Laporan Keuangan Komisaris Independen.....	111
Lampiran 6 Laporan Keuangan ETR (<i>Effective Tax Rate</i>)	113
Lampiran 7 Analisis Statistik Deskriptif.....	115
Lampiran 8 Hasil Uji Normalitas dengan <i>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</i>	116
Lampiran 9 Hasil Uji Multikolonieritas	116
Lampiran 10 Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan Spearman's Rho	117
Lampiran 11 Hasil Uji Autokorelasi dengan Durbin - Watson (DW Test)	117
Lampiran 12 Durbin Watson <i>Test Bound</i>	118
Lampiran 13 Hasil Uji Autokorelasi dengan <i>Run Test</i>	118
Lampiran 14 Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda.....	118
Lampiran 15 Hasil Uji Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji Statistik t)	119
Lampiran 16 Hasil Uji Koefisien Regresi Secara Simultan (Uji Statistik F).....	119
Lampiran 17 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	119
Lampiran 18 Koreksi Fiskal terhadap Laporan Keuangan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk Tahun 2019 (Dalam Jutaan Rupiah)	120
Lampiran 19 Koreksi Fiskal terhadap Laporan Keuangan PT Indofood Sukses Makmur Tbk Tahun 2019 (Dalam Jutaan Rupiah)	121
Lampiran 20 Koreksi Fiskal terhadap Laporan Keuangan PT Multi Bintang Indonesia Tbk Tahun 2019 (Dalam Jutaan Rupiah)	122
Lampiran 21 Koreksi Fiskal terhadap Laporan Keuangan PT Mayora Indah Tbk Tahun 2019 (Dalam Jutaan Rupiah)	123
Lampiran 22 Koreksi Fiskal terhadap Laporan Keuangan PT Sekar Laut Tbk Tahun 2019 (Dalam Jutaan Rupiah).....	125
Lampiran 23 Koreksi Fiskal terhadap Laporan Keuangan PT Ultra Jaya Milk Industry dan Trading Company Tbk Tahun 2019 (Dalam Jutaan Rupiah).....	126

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pajak memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia. Hal ini dikarenakan pajak merupakan sumber pendapatan utama negara. Pentingnya peranan pajak bagi negara menyebabkan pemerintah menciptakan berbagai program dan regulasi yang ditujukan untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak. Adapun usaha yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak adalah memberikan insentif penurunan tarif pajak badan melalui Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 17 ayat (2b) dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang penyederhanaan perhitungan pajak. Menurut Wijaya dan Saebani (2019), namun dalam kenyataannya, program dan regulasi yang diciptakan oleh pemerintah ini banyak disalahgunakan. Hal ini mendorong perusahaan melakukan tindakan untuk meminimalisir beban pajaknya legal maupun ilegal dengan cara melakukan agresivitas pajak.

Namun tujuan pemerintah memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak bertentangan dengan tujuan perusahaan sebagai wajib pajak badan yang menginginkan laba secara maksimal. Sementara bagi perusahaan, pajak dianggap sebagai biaya yang akan mengurangi keuntungan perusahaan dan memperkecil laba bersih. Kondisi itulah yang menyebabkan banyak perusahaan berusaha mencari cara untuk mengurangi biaya pajak yang dibayar. Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan perusahaan akan menjadi agresif dalam perpajakan (Chen *et al.* 2010 dalam Putri, 2014).

Karakteristik dari pajak yaitu memaksa bagi setiap warga negara. Selain itu, adanya perusahaan atau badan berusaha melakukan perlawanan pajak. Perlawanan ini dapat berupa perlawanan pajak aktif dan perlawanan pajak pasif. Namun perusahaan banyak menggunakan perlawanan pajak aktif karena hal ini merupakan usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan terhadap *fiscus*, serta bertujuan untuk menghindari pajak atau mengurangi kewajiban pajak yang seharusnya dibayar (Maulana, 2020; sumber lain; sumber lain). Adapun besarnya tingkat penghematan pajak pada perusahaan, maka perusahaan tersebut dianggap semakin agresif terhadap pajak. Perusahaan dituntut memiliki sifat keterbukaan atau transparansi karena dirasa manfaatnya dalam mengetahui aktivitas-aktivitas perusahaan yang dapat dijadikan suatu dasar untuk tatanan sistem perpajakan.

Menurut Sumarsan (2013) dalam Fahrani dkk (2018), agresivitas pajak merupakan suatu hal yang umum terjadi di kalangan perusahaan besar di seluruh dunia meskipun sampai saat ini masih menjadi perdebatan. Tindakan agresivitas pajak yang dilakukan melalui strategi perencanaan pajak pada umumnya berusaha untuk menghindari sanksi akibat dari penerapan pajak yang melanggar peraturan dan perundang-undangan perpajakan di Indonesia, tetapi perencanaan pajak merupakan

penerapan kegiatan-kegiatan perusahaan terhadap peraturan dan perundang-undangan perpajakan yang berlaku untuk mengecilkan beban pajak perusahaan.

Likuiditas merupakan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban untuk membayar utang-utang jangka pendeknya yang harus segera dibayar dengan menggunakan harta lancar seperti utang usaha, utang dividen, utang pajak, dan lain-lain. Pada umumnya, tingkat likuiditas suatu perusahaan ditunjukkan dalam angka-angka tertentu, seperti angka rasio cepat, angka rasio lancar, dan angka rasio kas. Dalam hal ini, semakin tinggi tingkat likuiditas suatu perusahaan, maka semakin tinggi juga kinerja perusahaan tersebut. Selain itu, biasanya perusahaan dengan tingkat likuiditas tinggi akan memiliki kesempatan lebih baik untuk mendapatkan berbagai dukungan dari banyak pihak, mulai dari lembaga keuangan, kreditur, maupun pemasok.

Leverage secara umum yaitu suatu kemampuan dari sebuah perusahaan dengan mengandalkan aset atau dana. Aset atau dana itu, mempunyai beban dalam merealisasikan tujuan perusahaan sehingga dapat membuat kekayaan dari pemilik perusahaan atau pemegang bertambah secara maksimal. Di bidang keuangan, *leverage* adalah suatu teknik pembelian aset yang melibatkan dana pinjaman (utang) daripada penambahan ekuitas baru dengan harapan bahwa laba setelah pajak yang akan diterima pemegang ekuitas dari transaksi tersebut akan melebihi biaya pinjaman, seringkali beberapa kali lipat.

Komisaris independen yaitu suatu jabatan yang menjadi bagian dari keanggotaan dewan komisaris, namun bersifat independen dan tidak memiliki afiliasi dengan anggota komisaris lain, pemegang saham, direktur, atau manajemen perusahaan. Komisaris independen memiliki peranan penting dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha (bisnis) perusahaan. Sebagai contoh, komisaris independen perlu memastikan bahwa setiap anggota komisaris telah menjalankan pengawasan yang baik dan benar terhadap kinerja direktur perusahaan.

Menurut Airlangga Hartanto (2019), hingga triwulan I 2019, pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) industri makanan dan minuman mencapai 6,77%. Angka itu di atas pertumbuhan PDB industri nasional sebesar 5,07%. Sektor tersebut pun berkontribusi sebesar 35,58% terhadap PDB Industri Non Migas dan sebesar 6,35% terhadap PDB Nasional. Dikatakannya, pada 2018, ekspor industri makanan tumbuh 11,71% sedangkan minuman tumbuh 3,16%. Pada tahun 2019, sektor tersebut mampu menarik investasi sebesar US\$383 juta dan Rp 8,9 triliun hingga triwulan I Tahun 2019. Dalam hal penyerapan tenaga kerja, sektor mamin telah menyerap 1,2 juta orang di tahun 2018. Artinya, sektor mamin merupakan sektor yang menjanjikan di dunia usaha.

Upaya agresivitas pajak terjadi di berbagai perusahaan di dunia. Di Indonesia agresivitas pajak tercermin dari rendahnya *tax ratio*. Hal tersebut dikarenakan penghindaran dan penggelapan pajak (*tax avoidances and evasions*) merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi *tax ratio* selain kebijakan perpajakan dan insentif

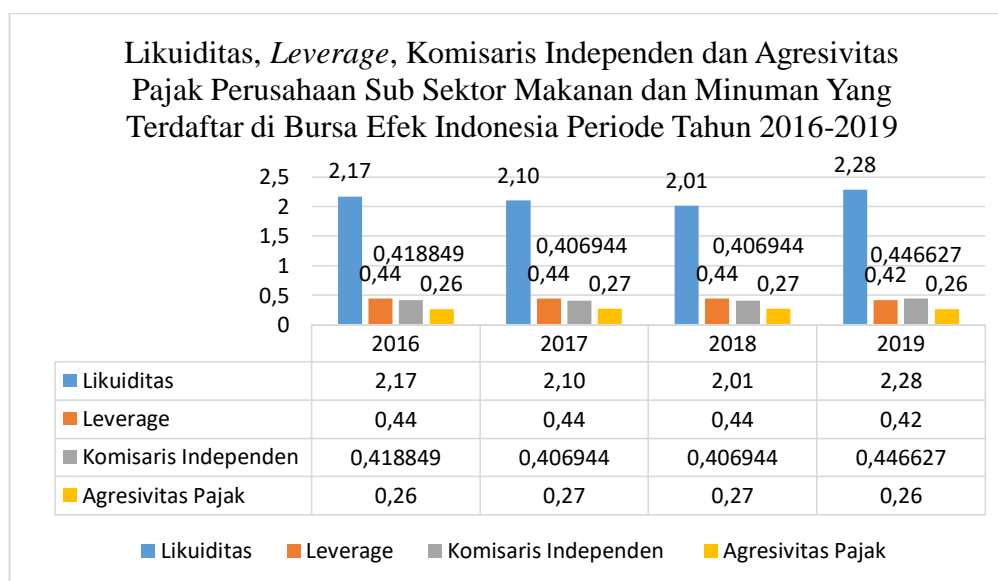
serta pengecualian yang diberikan kepada pelaku ekonomi dan masyarakat. *Tax ratio* adalah rasio antara penerimaan perpajakan dengan Produk Domestik Bruto (PDB). *Tax ratio* mencerminkan kebijakan perpajakan suatu negara serta tingkat kepatuhan warga negara dalam membayar pajak. *Tax ratio* yang rendah mengindikasikan kepatuhan pajak yang belum maksimal. Pada tahun 2017, persentase kepatuhan wajib pajak Indonesia masih berada pada angka 68% (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2019). *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD) menyatakan *tax ratio* Indonesia berada di posisi terendah di antara ekonomi Asia dan Pasifik pada tahun 2017 yaitu sebesar 11,5%. Artinya porsi pajak yang bisa dikumpulkan hanya sekitar 11% dari total aktivitas perekonomian Indonesia. Rendahnya *tax ratio* Indonesia, menunjukkan upaya penghindaran pajak oleh beberapa pihak di Indonesia.

Tabel 1.1 Likuiditas, *Leverage*, Komisaris Independen dan Agresivitas Pajak Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman Periode Tahun 2016-2019

	2016	2017	2018	2019
Likuiditas	2,17	2,10	2,01	2,28
<i>Leverage</i>	0,44	0,44	0,44	0,42
Komisaris Independen	0,418849	0,406944	0,406944	0,446627
Agresivitas Pajak	0,26	0,27	0,27	0,26

(Sumber: www.idx.co.id, data diolah peneliti)

Grafik 1.1 Likuiditas, *Leverage*, Komisaris Independen dan Agresivitas Pajak Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman Periode Tahun 2016-2019



(Sumber: www.idx.co.id, data diolah peneliti)

Berdasarkan grafik 1.1 di atas, nilai rata-rata likuiditas pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman mengalami fluktuasi pada tahun 2016-2019. Komisaris independen pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan

minuman mengalami fluktuasi pada tahun 2016-2019. Agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman mengalami fluktuasi pada tahun 2016-2019. Berbeda dengan *leverage* yang memiliki nilai rata-rata stabil dari tahun 2016-2018 dan 2019 mengalami penurunan sebesar 0,02%. Pada tahun 2016 rata-rata likuiditas sebesar 2,17, *leverage* sebesar 0,44 dan komisaris independen sebesar 0,418849. Pada tahun 2017 likuiditas menurun sebesar 0,07% dan komisaris independen menurun sebesar 0,011%. Untuk likuiditas menurun, maka hal ini sesuai teori dimana jika likuiditas menurun maka agresivitas pajak yang diproksikan dengan ETR meningkat. Komisaris independen yang menurun juga sesuai teori dimana jika komisaris independen menurun maka agresivitas pajak meningkat. Pada nilai rata-rata *leverage* tidak mengalami fluktuasi dalam arti nilai rata-rata adalah tetap sebesar 0,44, maka hal ini sesuai teori dimana apabila tinggi rendahnya *leverage* perusahaan tidak akan mempengaruhi tindakan agresif atau agresivitas pajak. Pada tahun 2017 rata-rata likuiditas sebesar 2,10, *leverage* sebesar 0,44 dan komisaris independen sebesar 0,406944. Pada tahun 2018 rata-rata likuiditas menurun sebesar 0,09%, *leverage* dan komisaris independen tidak mengalami fluktuasi. Untuk likuiditas menurun, maka hal ini sesuai teori dimana jika likuiditas menurun maka agresivitas pajak yang diproksikan dengan ETR meningkat. *Leverage* tidak mengalami fluktuasi dalam arti nilai rata-rata adalah tetap sebesar 0,44, maka hal ini sesuai teori dimana apabila tinggi rendahnya *leverage* perusahaan tidak akan mempengaruhi tindakan agresif atau agresivitas pajak. Komisaris independen tidak mengalami fluktuasi dalam nilai rata-rata adalah tetap sebesar 0,406944, maka hal ini dikarenakan banyak sedikitnya proporsi komisaris independen yang dimiliki dianggap tidak mampu memberikan pengaruh terhadap tindakan agresivitas pajak yang terjadi di perusahaan. Pada tahun 2018 rata-rata likuiditas sebesar 2,01, *leverage* sebesar 0,44 dan komisaris independen sebesar 0,406944. Pada tahun 2019 likuiditas mengalami kenaikan sebesar 0,27%, *leverage* mengalami penurunan sebesar 0,02% dan komisaris independen mengalami kenaikan sebesar 0,039%. Untuk likuiditas meningkat, maka hal ini tidak sesuai teori dimana jika likuiditas meningkat maka agresivitas pajak yang diproksikan dengan ETR meningkat. *Leverage* menurun, maka hal ini sesuai teori dimana jika *leverage* menurun maka agresivitas pajak yang diproksikan dengan ETR menurun. Jika *leverage* meningkat, maka agresivitas pajak yang diproksikan dengan ETR meningkat. Komisaris independen meningkat, maka hal ini sesuai teori dimana jika komisaris independen meningkat maka agresivitas pajak yang diproksikan dengan ETR menurun.

Fenomena mengenai agresivitas pajak merupakan masalah yang terjadi hampir setiap tahun. Di tahun 2019, lembaga *Tax Justice Network* melaporkan perusahaan tembakau milik British American Tobacco (BAT) melakukan penghindaran pajak melalui PT Bentoel International Investama (RMBA) yang berdampak pada kerugian negara sebesar US\$ 14 juta per tahun. BAT melakukan pinjaman intra perusahaan dari tahun 2013 & 2015 dan melalui pembayaran kembali ke Inggris untuk royalti,

ongkos dan layanan IT (nasional.kontan.co.id). Hal ini menunjukkan bahwa masih adanya tindakan agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia.

Berangkat dari fenomena diatas terhadap agresivitas pajak, penelitian mengenai agresivitas pajak perusahaan telah banyak dilakukan. Penelitian-penelitian tersebut menghasilkan ketidakkonsistenan (inkonsistensi) hasil penelitian.

Penelitian Muliasari dan Hidayat (2020) menunjukkan variabel yang tidak konsisten yaitu likuiditas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa likuiditas yang menggunakan *quick ratio* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak, *leverage* berpengaruh terhadap agresivitas pajak dan komisaris independen berpengaruh terhadap agresivitas pajak, likuiditas, *leverage* dan komisaris independen berpengaruh terhadap agresivitas pajak perusahaan secara simultan. Penelitian Indrajati dkk (2017) menunjukkan variabel yang tidak konsisten yaitu *leverage*, *capital intensity* dan komisaris independen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya likuiditas yang memiliki pengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan sedangkan pengujian secara simultan memiliki pengaruh. Didapati juga bahwa semua variabel independen mempunyai pengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Penelitian Maulana (2020) menunjukkan variabel yang tidak konsisten yaitu *leverage* dan ukuran perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel *capital intensity*, profitabilitas dan *inventory intensity* berpengaruh terhadap agresivitas pajak, sedangkan *leverage* dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Pengujian secara simultan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak karena penelitian ini hanya dilakukan pada perusahaan Properti dan Real Estate saja. Penelitian Nurjanah dkk (2018) menunjukkan variabel yang tidak konsisten yaitu likuiditas, *leverage*, *corporate social responsibility* dan komisaris independen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel independen ukuran perusahaan secara parsial berpengaruh signifikan, tetapi variabel independen likuiditas, *leverage*, *corporate social responsibility* dan komisaris independen secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak badan. Pengujian secara simultan memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak.

Penelitian ini bermaksud mengintegrasikan beberapa penelitian yang telah ada sebelumnya serta menganalisis kembali pengaruh yang ditimbulkan antara likuiditas, *leverage* dan proporsi komisaris independen terhadap agresivitas pajak perusahaan. Penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu karena sampel yang digunakan adalah perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2016 hingga 2019. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini berjudul **“Pengaruh Likuiditas, *Leverage* dan Komisaris Independen terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2016-2019)”**.

1.2. Identifikasi dan Perumusan Masalah

1.2.1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka kesimpulannya bahwa identifikasi masalah yang terdapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pentingnya peranan pajak dalam perekonomian Indonesia, sehingga tujuan pemerintah memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak dianggap bertentangan dengan tujuan perusahaan sebagai wajib pajak badan yang menginginkan laba secara maksimal. Perusahaan menganggap bahwa pajak merupakan beban yang dapat menurunkan keuntungan bagi perusahaan. Sehingga perusahaan berusaha melakukan upaya untuk meminimalisasi beban secara legal maupun ilegal. Perusahaan menginginkan laba dengan jumlah yang besar tetapi tidak ingin menanggung pajak yang besar sehingga cenderung perusahaan akan melakukan agresivitas pajak agar laba terlihat kecil sehingga dapat mengurangi beban pajak. Tindakan agresivitas pajak perusahaan dapat dilakukan dengan cara yang tergolong legal maupun ilegal.

1.2.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dijelaskan di atas, maka beberapa masalah di dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah likuiditas berpengaruh terhadap agresivitas pajak perusahaan?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap agresivitas pajak perusahaan?
3. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap agresivitas pajak perusahaan?
4. Apakah likuiditas, *leverage* dan komisaris independen berpengaruh terhadap agresivitas pajak perusahaan secara simultan atau bersama-sama?

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1. Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data yang berkaitan dengan penelitian ini, menganalisis data tersebut dengan metode-metode yang tepat, lalu mengambil kesimpulan apakah terdapat pengaruh antara likuiditas, *leverage* dan komisaris independen terhadap agresivitas pajak perusahaan. Penelitian ini juga berusaha agar dapat memberi saran terkait dengan likuiditas, *leverage* dan komisaris independen agar dapat menjadi perhatian bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia khususnya yang termasuk ke dalam perusahaan sub sektor makanan dan minuman.

1.3.2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan maksud penelitian di atas yang sebelumnya telah dijelaskan, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji pengaruh likuiditas terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan pada Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2016-2019.

2. Untuk menguji pengaruh *leverage* terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan pada Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2016-2019.
3. Untuk menguji pengaruh komisaris independen terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan pada Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2016-2019.
4. Untuk menguji pengaruh likuiditas, *leverage* dan komisaris independen secara simultan atau bersama-sama terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan pada Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2016-2019.

1.4. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi beberapa kegunaan penelitian antara lain:

1.4.1. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Direktorat Jenderal Pajak, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk lebih memperhatikan praktik-praktik agresivitas pajak pada perusahaan yang dapat mengurangi pendapatan negara dari sektor pajak.
- b. Bagi Manajemen Perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi manajemen perusahaan agar lebih mempertimbangkan pengambilan keputusan perpajakannya.

1.4.2. Kegunaan Akademis

- a. Bagi mahasiswa jurusan akuntansi, mata kuliah konsentrasi akuntansi perpajakan, penelitian ini bermanfaat sebagai bahan referensi penelitian selanjutnya tentang pengaruh likuiditas, *leverage* dan komisaris independen terhadap agresivitas pajak perusahaan dan pembeding untuk menambah ilmu pengetahuan.
- b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat sebagai sarana informasi tentang aktivitas agresivitas pajak yang terjadi di masyarakat, serta dapat menjadi sarana untuk menambah pengetahuan akuntansi khususnya pajak.
- c. Bagi penulis, yaitu dengan adanya penelitian ini dapat memberikan informasi yang luas dan menambah wawasan untuk penulis serta menambah referensi mengenai topik ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pajak

2.1.1. Pengertian Pajak

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sementara itu, menurut Rochmat Soemitro, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari definisi tersebut, Mardiasmo (2019: 3) menyimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

1. Iuran dari rakyat kepada negara
Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
2. Berdasarkan undang-undang
Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.1.2. Fungsi Pajak

Adapun fungsi pajak menurut Mardiasmo (2019: 4) yaitu:

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)
Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Contoh:

- a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
 - b. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.
3. Fungsi Stabilitas
- Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.
4. Fungsi Redistribusi Pendapatan
- Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

2.1.3. Pengelompokan Pajak

Pengelompokan pajak menurut Mardiasmo (2019: 8-9) adalah sebagai berikut:

1. Menurut Golongannya

- a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
Contoh: Pajak Penghasilan.
- b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

2. Menurut Sifatnya

- a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subyeknya, dalam arti ini adalah memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.
Contoh: Pajak Penghasilan.
- b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.
Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

3. Menurut Lembaga Pemungutnya

- a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, dan Bea Meterai.
- b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.
Pajak Daerah terdiri atas:
 - 1) Pajak Provinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

- 2) Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

2.1.4. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2019: 11) adalah sebagai berikut:

a. *Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- 2) Wajib Pajak bersifat pasif.
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
- 2) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- 3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c. *Withholding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya: wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

2.1.5. Timbul dan Hapusnya Utang Pajak

Menurut Mardiasmo (2019: 12) ada dua ajaran yang mengatur timbulnya utang pajak:

1. Ajaran Formal

Utang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus. Ajaran ini diterapkan pada *official assessment system*.

2. Ajaran Materiil

Utang pajak timbul karena berlakunya undang-undang. Seseorang dikenai pajak karena suatu keadaan dan perbuatan. Ajaran ini diterapkan pada *self assessment system*.

Hapusnya utang pajak dapat disebabkan beberapa hal:

1. Pembayaran

2. Kompensasi
3. Kedaluwarsa
4. Pembebasan dan penghapusan

2.1.6. Hambatan Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2019: 12-13) hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi:

1. Perlawanan Pasif

Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan antara lain:

- a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
- b. Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat.
- c. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

2. Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang dilakukan oleh wajib pajak dengan tujuan untuk menghindari pajak.

Bentuknya antara lain:

- a. *Tax avoidance*, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.
- b. *Tax Evasion*, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak).

2.2. Variabel Independen

2.2.1. Likuiditas

2.2.1.1. Pengertian Likuiditas

Rasio likuiditas berhubungan dengan ketidakmampuan perusahaan dalam membayar seluruh atau sebagian utang (kewajibannya) yang sudah jatuh tempo pada saat ditagih.

Lyn M. Fraser dalam Sugiono dan Untung (2016: 56) menyebut bahwa “Rasio likuiditas (solvensi jangka pendek), yang mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan uang tunai. Terdiri dari rasio lancar (*current ratio*), rasio cepat (*quick ratio*), rasio aliran kas (*cash flow liquidity ratio*).”

Menurut Fadli (2016: 1208) “Likuiditas didefinisikan sebagai kepemilikan sumber dana yang memadai untuk memenuhi kebutuhan dan kewajiban yang akan jatuh tempo serta kemampuan untuk membeli dan menjual aset dengan cepat.”

Menurut Kasmir (2019: 130) “Rasio likuiditas atau sering juga disebut dengan nama rasio modal kerja merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa likuidnya suatu perusahaan. caranya adalah dengan membandingkan komponen yang ada di neraca, yaitu total aktiva lancar dengan total passiva lancar (utang jangka pendek). Penilaian dapat dilakukan untuk beberapa periode sehingga terlihat perkembangan likuiditas perusahaan dari waktu ke waktu.”

Menurut Fahmi (2020: 125) “Rasio likuiditas (*liquidity ratio*) adalah kemampuan suatu perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya secara tepat waktu. Contoh membayar listrik, telepon, air PDAM, gaji karyawan, gaji teknisi, gaji lembur, tagihan telepon, dan sebagainya. Karena itu rasio likuiditas sering disebut dengan *short term liquidity*.”

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa likuiditas adalah kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek yang dimiliki secara tepat waktu atau yang sudah jatuh tempo dengan melihat aktiva lancar perusahaan terhadap utang lancarnya. Likuiditas sebagai salah satu pengukur kinerja manajemen dalam mengelola keuangan perusahaan.

2.2.1.2. Tujuan dan Manfaat Rasio Likuiditas

Perhitungan rasio likuiditas memberikan cukup banyak manfaat bagi berbagai pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan. Tidak hanya berguna bagi perusahaan, namun juga bagi pihak luar perusahaan.

Berikut ini adalah tujuan dan manfaat dari rasio likuiditas menurut Kasmir (2019: 132-133) adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih. Artinya, kemampuan untuk membayar kewajiban yang sudah waktunya dibayar sesuai jadwal batas waktu yang telah ditetapkan (tanggal dan bulan tertentu).
2. Untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar secara keseluruhan. Artinya jumlah kewajiban yang berumur di bawah satu tahun atau sama dengan satu tahun, dibandingkan dengan total aktiva lancar.
3. Untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan sediaan atau piutang. Dalam hal ini aktiva lancar dikurangi sediaan dan utang yang dianggap likuiditasnya lebih rendah.
4. Untuk mengukur atau membandingkan antara jumlah sediaan yang ada dengan modal kerja perusahaan.
5. Untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar utang.
6. Sebagai alat perencanaan ke depan, terutama yang berkaitan dengan perencanaan kas dan utang.
7. Untuk melihat kondisi dan posisi likuiditas perusahaan dari waktu ke waktu dengan membandingkannya untuk beberapa periode.
8. Untuk melihat kelemahan yang dimiliki perusahaan, dari masing-masing komponen yang ada di aktiva lancar dan utang lancar.
9. Menjadi alat pemicu bagi pihak manajemen untuk memperbaiki kinerjanya, dengan melihat rasio likuiditas yang ada pada saat ini.

10. Bagi pihak luar perusahaan, seperti pihak penyandang dana (kreditor), investor, distributor, dan masyarakat luas, rasio likuiditas bermanfaat untuk menilai kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban kepada pihak ketiga. Sebagai alat bagi pihak luar terutama yang berkepentingan terhadap perusahaan dalam menilai kemampuan perusahaan agar dapat meningkatkan saling percaya.

2.2.1.3. Jenis-Jenis Rasio Likuiditas

Menurut Kasmir (2019: 134) jenis-jenis rasio yang ada dalam rasio likuiditas diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Rasio Lancar (*Current Ratio*)
2. Rasio Cepat (*Quick Ratio* atau *Acid Test Ratio*)
3. Rasio Kas (*Cash Ratio*)
4. Rasio Perputaran Kas (*Cash Turn Over*)
5. *Inventory to Net Working Capital*

Adapun uraian dari jenis-jenis rasio likuiditas adalah sebagai berikut:

1. Rasio Lancar (*Current Ratio*), merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan. Dengan kata lain, seberapa banyak aktiva lancar yang tersedia untuk menutupi kewajiban jangka pendek yang segera jatuh tempo. Rasio lancar dapat pula dikatakan sebagai bentuk untuk mengukur tingkat keamanan (*margin of safety*) suatu perusahaan. Perhitungan rasio lancar dilakukan dengan cara membandingkan antara total aktiva lancar dengan total utang lancar. Aktiva lancar (*current assets*) merupakan harta perusahaan yang dapat dijadikan uang dalam waktu singkat (maksimal satu tahun). Komponen aktiva lancar meliputi kas, bank, surat-surat berharga, piutang, sediaan, biaya dibayar di muka, pendapatan yang masih harus diterima, pinjaman yang diberikan, dan aktiva lancar lainnya. Utang lancar (*current liabilities*) merupakan kewajiban perusahaan jangka pendek (maksimal satu tahun). Artinya, utang ini segera harus dilunasi dalam waktu paling lama satu tahun. Komponen utang lancar terdiri dari utang dagang, utang bank satu tahun, utang wesel, utang gaji, utang pajak, utang dividen, biaya diterima di muka, utang jangka panjang yang sudah hampir jatuh tempo, serta utang jangka pendek lainnya.
2. Rasio Cepat (*Quick Ratio* atau *Acid Test Ratio*), merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi atau membayar kewajiban atau utang lancar (utang jangka pendek) dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan nilai sediaan (*inventory*). Perhitungan rasio cepat dilakukan dengan cara pengurangan antara total aktiva lancar (*current assets*) dengan nilai persediaan (*inventory*) dibandingkan dengan total utang lancar (*current liabilities*).
3. Rasio Kas (*Cash Ratio*), merupakan alat yang digunakan untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar utang. Ketersediaan uang kas dapat ditunjukkan dari tersedianya dana kas atau yang setara dengan kas

seperti rekening giro atau tabungan di bank (yang dapat ditarik setiap saat). Dapat dikatakan rasio ini menunjukkan kemampuan sesungguhnya bagi perusahaan untuk membayar utang-utang jangka pendeknya. Perhitungan rasio kas dilakukan dengan cara membandingkan antara kas atau setara kas (*cash or cash equivalent*) dengan total utang lancar (*current liabilities*).

4. Rasio Perputaran Kas (*Cash Turn Over*), berfungsi untuk mengukur tingkat kecukupan modal kerja perusahaan yang dibutuhkan untuk membayar tagihan dan membiayai penjualan. Artinya rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat ketersediaan kas untuk membayar tagihan (utang) dan biaya-biaya yang berkaitan dengan penjualan. Perhitungan rasio perputaran kas dilakukan dengan cara membandingkan antara penjualan bersih dengan modal kerja bersih.
5. *Inventory to Net Working Capital*, merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur atau membandingkan antara jumlah sediaan yang ada dengan modal kerja perusahaan. Modal kerja tersebut terdiri dari pengurangan antara aktiva lancar dengan utang lancar. Perhitungan *Inventory to Net Working Capital* dilakukan dengan cara membandingkan antara jumlah persediaan (*inventory*) dengan modal kerja (pengurangan antara aktiva lancar (*current assets*) dengan utang lancar (*current liabilities*)).

Menurut Fahmi (2020: 125) “Rasio lancar (*current ratio*) adalah ukuran yang umum digunakan atas solvensi jangka pendek, kemampuan suatu perusahaan memenuhi kebutuhan utang ketika jatuh tempo.”

Menurut Kasmir (2019) uraian hasil pengukuran rasio likuiditas adalah sebagai berikut:

Dari hasil pengukuran rasio lancar: Apabila rasio lancar rendah, dapat dikatakan bahwa perusahaan kurang modal untuk membayar utang. Namun, apabila hasil pengukuran rasio tinggi, belum tentu kondisi perusahaan sedang baik. Hal ini dapat saja terjadi karena kas tidak digunakan sebaik mungkin. Untuk mengatakan suatu kondisi perusahaan baik atau tidaknya, ada suatu standar rasio yang digunakan, misalnya rata-rata industri untuk usaha yang sejenis atau dapat pula digunakan target yang telah ditetapkan perusahaan sebelumnya, sekalipun kita tahu bahwa target yang telah ditetapkan perusahaan biasanya ditetapkan berdasarkan rata-rata industri untuk usaha yang sejenis.

Dari hasil pengukuran rasio cepat: Jika rasio perusahaan di bawah rata-rata industri, keadaan perusahaan lebih buruk dari perusahaan lain. Hal ini menyebabkan perusahaan harus menjual sediaannya untuk melunasi pembayaran utang lancar, padahal menjual sediaan untuk harga yang normal relatif sulit, kecuali perusahaan menjual di bawah harga pasar, yang tentunya bagi perusahaan jelas menambah kerugian. Sebaliknya apabila keadaan perusahaan lebih baik dari perusahaan lain. Maka kondisi ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak harus menjual sediaan bila

hendak melunasi utang lancar, tetapi dapat menjual surat berharga atau penagihan piutang.

Dari hasil pengukuran rasio kas: Jika rata-rata industri untuk *cash ratio* adalah 50% maka keadaan perusahaan lebih baik dari perusahaan lain. Namun, kondisi rasio kas terlalu tinggi juga kurang baik karena ada dana yang menganggur atau yang tidak atau belum digunakan secara optimal. Sebaliknya apabila rasio kas di bawah rata-rata industri, kondisi kurang baik ditinjau dari rasio kas karena untuk membayar kewajiban masih memerlukan waktu untuk menjual sebagian dari aktiva lancar lainnya.

Dari hasil pengukuran rasio perputaran kas: Apabila rasio perputaran kas tinggi, ini berarti keluar masuknya uang kas begitu cepat, karena penjualan yang tinggi dan uang yang masuk dan yang keluar relatif seimbang sehingga kemampuan membayar seluruh tagihan dapat dilakukan sesuai waktunya. Sebaliknya apabila rasio perputaran kas rendah, dapat diartikan kas yang tertanam pada aktiva yang sulit dicairkan dalam waktu singkat sehingga perusahaan harus bekerja keras dengan kas yang lebih sedikit.

Adapun menurut Hanafi dan Halim (2016: 75-76) uraian hasil pengukuran rasio likuiditas adalah sebagai berikut:

Dari hasil pengukuran rasio lancar: Rasio yang rendah menunjukkan risiko likuiditas yang tinggi, sedangkan rasio lancar yang tinggi menunjukkan adanya kelebihan aktiva lancar, yang akan mempunyai pengaruh yang tidak baik terhadap profitabilitas perusahaan. Aktiva lancar secara umum menghasilkan *return* yang lebih rendah dibandingkan dengan aktiva tetap. Dari ketiga komponen aktiva lancar (kas, piutang, dan persediaan), persediaan biasanya dianggap merupakan aset yang paling tidak likuid. Hal ini berkaitan dengan semakin panjangnya tahap yang dilalui untuk sampai menjadi kas, yang berarti waktu yang diperlukan untuk menjadi kas semakin lama dan juga ketidakpastian nilai persediaan.

Dari hasil pengukuran rasio cepat: Sama seperti halnya rasio lancar, angka yang terlalu tinggi untuk persediaan menunjukkan indikasi kelebihan kas atau piutang, sedangkan angka yang terlalu kecil menunjukkan risiko likuiditas yang lebih tinggi.

Dari beberapa jenis rasio likuiditas yang telah dijelaskan di atas, maka dalam penelitian ini yaitu menggunakan rasio lancar (*current ratio*) dalam mengukur rasio likuiditas. Karena rasio lancar dapat mengukur seluruh total kekayaan perusahaan dengan jumlah uang likuid yang tersedia dalam perusahaan (kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan). Selain itu rasio lancar sebagai bentuk untuk mengukur tingkat keamanan (*margin of safety*) suatu perusahaan. Rumus untuk mencari rasio lancar atau *current ratio* yaitu dengan cara membandingkan antara total aktiva lancar (*current assets*) dengan total utang lancar (*current liabilities*).

2.2.1.4. Current Ratio

Pemilihan *current ratio* sebagai indikator dalam menentukan tingkat rasio likuiditas karena *current ratio* digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aktiva lancar yang tersedia pada perusahaan. Bagi investor sangat penting untuk memperhatikan aset lancar perusahaan. Rasio lancar mudah dihitung. Di samping itu rasio lancar mempunyai kemampuan memprediksi kebangkrutan yang baik.

2.2.2. Leverage

2.2.2.1. Pengertian Leverage

Rasio *leverage* atau rasio solvabilitas berhubungan dengan sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang.

Menurut Sugiono dan Untung (2016: 59) menyebut bahwa “Rasio ini bertujuan untuk menganalisa pembelanjaan yang dilakukan berupa komposisi hutang dan modal serta kemampuan perusahaan untuk membayar bunga dan beban tetap lainnya.”

Menurut Hanafi dan Halim (2016: 79) menyebut bahwa “Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya. Perusahaan yang tidak solvabel adalah perusahaan yang total utangnya lebih besar dibandingkan total asetnya. Rasio ini mengukur likuiditas jangka panjang perusahaan dan dengan demikian memfokuskan pada sisi kanan neraca.”

Menurut Savitri dan Rahmawati (2017: 24) “*Leverage* adalah salah satu rasio keuangan yang menggambarkan hubungan antara hutang perusahaan terhadap modal maupun aset perusahaan.”

Menurut Kasmir (2019: 153) “Rasio solvabilitas atau *leverage ratio* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Artinya berapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivanya. Dalam arti luas dikatakan bahwa rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan dibubarkan (dilikuidasi).”

Menurut Muliasari dan Hidayat (2020: 30) “*Leverage* merupakan suatu ukuran seberapa besar asset yang dimiliki perusahaan dibiayai oleh utang. *Leverage* merupakan jumlah utang yang dimiliki perusahaan untuk pembiayaan dan dapat mengukur besarnya aktiva yang dibiayai utang.”

Menurut Fahmi (2020: 120) “Rasio solvabilitas merupakan rasio yang menunjukkan bagaimana perusahaan mampu untuk mengelola hutangnya dalam rangka memperoleh keuntungan dan juga mampu untuk melunasi kembali hutangnya.”

Menurut Ramadani dan Hartiyah (2020: 240) “*Leverage* adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban *financial* jangka panjang maupun jangka pendeknya.”

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa *leverage* adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajibannya (utang) baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan tersebut dilikuidasi.

2.2.2.2. Tujuan dan Manfaat *Leverage*

Keputusan untuk memilih menggunakan modal sendiri atau modal pinjaman haruslah digunakan beberapa perhitungan yang matang. Maka tujuan *leverage* adalah pengambilan keputusan untuk memilih menggunakan modal sendiri atau modal pinjaman.

Menurut Kasmir (2019: 113) keuntungan dengan mengetahui *leverage* adalah:

1. Dapat menilai kemampuan posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya;
2. Menilai kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban yang bersifat tetap;
3. Mengetahui keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal;
4. Guna mengambil keputusan penggunaan sumber dana ke depan.

Menurut Kasmir (2019: 155-156) tujuan perusahaan dengan menggunakan rasio solvabilitas adalah:

1. Untuk mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya (kreditor);
2. Untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga);
3. Untuk menilai keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal;
4. Untuk menilai seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang;
5. Untuk menilai seberapa besar pengaruh utang perusahaan terhadap pengelolaan aktiva;
6. Untuk menilai atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang;
7. Untuk menilai berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih, terdapat sekian kalinya modal sendiri yang dimiliki; dan
8. Tujuan lainnya.

Menurut Kasmir (2019: 156) manfaat rasio solvabilitas atau *leverage ratio* adalah:

1. Untuk menganalisis kemampuan posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya;

2. Untuk menganalisis kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban yang bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga);
3. Untuk menganalisis keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal;
4. Untuk menganalisis seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang;
5. Untuk menganalisis seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva;
6. Untuk menganalisis atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang;
7. Untuk menganalisis berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih ada terdapat sekian kalinya modal sendiri; dan
8. Manfaat lainnya.

2.2.2.3. Jenis-Jenis Rasio *Leverage*

Kasmir (2019: 157) menyebut bahwa: “Biasanya penggunaan rasio solvabilitas atau *leverage* disesuaikan dengan tujuan perusahaan. Artinya perusahaan dapat menggunakan rasio *leverage* secara keseluruhan atau sebagian dari masing-masing jenis rasio solvabilitas yang ada. Dalam praktiknya, terdapat beberapa jenis rasio solvabilitas yang sering digunakan perusahaan.” Adapun rasio yang dapat digunakan dalam mengukur tingkat *leverage* perusahaan yaitu:

1. *Debt to Asset Ratio (Debt Ratio)*
2. *Debt to Equity Ratio*
3. *Long Term Debt to Equity Ratio (LTDtER)*
4. *Times Interest Earned*
5. *Fixed Charge Coverage (FCC)*

Adapun uraian dari jenis-jenis rasio *leverage* adalah sebagai berikut:

1. *Debt to Asset Ratio (Debt Ratio)*, merupakan rasio utang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva. Dengan kata lain, seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. Perhitungan *Debt to Asset Ratio (Debt Ratio)* dilakukan dengan cara membandingkan antara total utang (*total debt*) dengan total aktiva (*total assets*).
2. *Debt to Equity Ratio*, merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Rasio ini dicari dengan cara membandingkan antara seluruh utang, termasuk utang lancar dengan seluruh ekuitas. Rasio ini berguna untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan peminjam (kreditor) dengan pemilik perusahaan. Dengan kata lain, rasio ini berfungsi untuk mengetahui setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan untuk jaminan utang. Perhitungan *Debt to Equity Ratio* dilakukan dengan cara membandingkan antara total utang (*debt*) dengan ekuitas (*equity*).

3. *Long Term Debt to Equity Ratio (LTDtER)*, merupakan rasio antara utang jangka panjang dengan modal sendiri. Tujuannya adalah untuk mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang dengan cara membandingkan antara utang jangka panjang dengan modal sendiri yang disediakan oleh perusahaan. Perhitungan *Long Term Debt to Equity Ratio (LTDtER)* dilakukan dengan cara membandingkan antara utang jangka panjang (*long term debt*) dengan modal sendiri atau ekuitas (*equity*).
4. *Times Interest Earned*, merupakan rasio untuk mencari jumlah kali perolehan bunga. Rasio ini diartikan juga sebagai kemampuan perusahaan untuk membayar biaya bunga, sama seperti *coverage ratio*. Jumlah kali perolehan bunga atau *times interest earned* merupakan rasio untuk mengukur sejauh mana pendapatan dapat menurun tanpa membuat perusahaan merasa malu karena tidak mampu membayar biaya bunga tahunannya. Untuk mengukur rasio ini, digunakan perbandingan antara laba sebelum bunga dan pajak dibandingkan dengan biaya bunga yang dikeluarkan. Dengan demikian, kemampuan perusahaan untuk membayar bunga pinjaman tidak dipengaruhi oleh pajak. Perhitungan *Times Interest Earned* dilakukan dengan cara membandingkan antara EBIT dengan biaya bunga (*interest*).
5. *Fixed Charge Coverage (FCC)*, merupakan rasio yang menyerupai *Times Interest Earned Ratio*. Hanya saja perbedaannya adalah rasio ini dilakukan apabila perusahaan memperoleh utang jangka panjang atau menyewa aktiva berdasarkan kontrak sewa (*lease contract*). Biaya tetap merupakan biaya bunga ditambah kewajiban sewa tahunan atau jangka panjang. Perhitungan *Fixed Charge Coverage (FCC)* dilakukan dengan cara penambahan antara laba sebelum pajak (EBT) dengan biaya bunga ditambah kewajiban sewa/*lease* dibandingkan dengan penambahan antara biaya bunga dengan kewajiban sewa/*lease*.

Menurut Kasmir (2019) uraian hasil pengukuran rasio *leverage* adalah sebagai berikut:

Dari hasil pengukuran *Debt to Asset Ratio (Debt Ratio)*: Apabila rasionya tinggi, artinya pendanaan dengan utang semakin banyak, maka semakin sulit bagi perusahaan untuk memperoleh tambahan pinjaman karena dikhawatirkan perusahaan tidak mampu menutupi utang-utangnya dengan aktiva yang dimilikinya. Demikian pula apabila rasionya rendah, semakin kecil perusahaan dibiayai dengan utang. Standar pengukuran untuk menilai baik tidaknya rasio perusahaan, digunakan rasio rata-rata industri yang sejenis.

Dari hasil pengukuran *Debt to Equity Ratio*: Bagi Bank (kreditor), semakin besar rasio ini, akan semakin tidak menguntungkan karena akan semakin besar risiko yang ditanggung atas kegagalan yang mungkin terjadi di perusahaan. Namun, bagi perusahaan justru semakin besar rasio akan semakin baik. Sebaliknya dengan rasio yang rendah, semakin tinggi tingkat pendanaan yang disediakan pemilik dan semakin besar batas pengamanan bagi peminjam jika terjadi kerugian atau penyusutan

terhadap nilai aktiva. Rasio ini juga memberikan petunjuk umum tentang kelayakan dan risiko keuangan perusahaan. Perusahaan dengan arus kas yang stabil biasanya memiliki rasio yang lebih tinggi dari rasio kas yang kurang stabil.

Bagi perusahaan semakin besar rasio ini maka akan semakin baik. Sebaliknya dengan rasio yang rendah, semakin tinggi tingkat pendanaan yang disediakan pemilik dan semakin besar batas pengamanan bagi peminjam jika terjadi kerugian atau penyusutan terhadap nilai aktiva.

Dari hasil pengukuran *Times Interest Earned*: Secara umum semakin tinggi rasio, semakin besar kemungkinan perusahaan dapat membayar bunga pinjaman dan dapat menjadi ukuran untuk memperoleh tambahan pinjaman baru dari kreditor. Demikian pula sebaliknya apabila rasio rendah, semakin rendah pula kemampuan perusahaan untuk membayar bunga dan biaya lainnya.

Dari beberapa jenis rasio *leverage* yang telah dijelaskan di atas, maka dalam penelitian ini yaitu menggunakan *Debt to Asset Ratio (Debt Ratio)* dalam mengukur rasio *leverage*. Karena *Debt to Asset Ratio (Debt Ratio)* mengukur seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. Rumus untuk mencari rasio *leverage* yaitu dengan cara membandingkan antara total *debt* dengan total *assets*.

2.2.2.4. Debt to Asset Ratio (Debt Ratio)

Pemilihan *Debt Ratio* untuk mengukur tingkat *leverage* dikarenakan pengertian *Debt to Asset Ratio (Debt Ratio)* menurut Kasmir (2019: 158) “Merupakan rasio utang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva. Dengan kata lain, seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva.” Menurut Muliasari dan Hidayat (2020: 30-31) “*Leverage* menggambarkan proporsi total utang perusahaan terhadap total asset yang dimiliki perusahaan dengan tujuan untuk mengetahui keputusan pendanaan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut.”

2.2.3. Komisaris Independen

2.2.3.1. Pengertian Komisaris Independen

Menurut Fitriyawati (2018: 5) “Komisaris Independen adalah pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham, direktur, komisaris lainnya, dan tidak memiliki kedudukan rangkap pada perusahaan yang terafiliasi dengan perusahaan tercatat.”

Menurut Ardyansah (2014) dalam Muliasari dan Hidayat (2020: 31) “Komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang berasal dari luar manajemen perusahaan dan bukan merupakan pegawai perusahaan tersebut tetapi berurusan langsung dengan organisasi dalam perusahaan, perusahaan mengangkat komisaris independen untuk mengawasi bagaimana organisasi dalam perusahaan

dijalankan dan dapat menjadi penengah antara komisaris dalam dan pihak pemegang saham apabila terjadi konflik, komisaris independen dipercaya menjadi penengah diantara kedua belah pihak karena bersikap objektif dan memiliki risiko yang kecil dalam konflik internal.”

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa komisaris independen adalah anggota komisaris yang berasal dari luar perusahaan dan bukan merupakan pegawai perusahaan tersebut tetapi berurusan langsung dengan organisasi dalam perusahaan, tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada perusahaan, tidak memiliki hubungan afiliasi dengan emiten atau perusahaan, komisaris lainnya, direktur, pemegang saham utama atau pengendali maupun perusahaan publik, tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung serta bebas dari hubungan bisnis lainnya yang berkaitan dengan usaha emiten atau perusahaan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

2.2.3.2. Proporsi Komisaris Independen

Menurut Fadli (2016: 1209) “Keberadaan komisaris independen di Indonesia telah diatur oleh Bursa Efek Indonesia melalui peraturan BEJ tanggal 1 Juli 2000. Melalui peraturan tersebut dijelaskan bahwa perusahaan yang terdaftar di bursa harus mempunyai komisaris independen yang proporsinya disyaratkan sebesar 30% dari seluruh anggota dewan komisaris.”

Menurut Indriawati (2017: 31-32) “Berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 33/POJK 04/2014 jumlah komisaris independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota dewan komisaris.”

Maka hal tersebut sesuai dengan yang diungkapkan oleh Alijoyo dan Zaini (2004: 174) yaitu: “Untuk lebih memantapkan efektivitas Komisaris Independen, jumlah komisaris independen dalam satu perusahaan ditetapkan paling sedikit 30% dari jumlah seluruh komisaris atau paling sedikit 1 (satu) orang.”

2.2.3.3. Kriteria Komisaris Independen

Menurut *Forum for Corporate Governance Indonesia* (2001) dalam Fitriyawati (2018: 9) kriteria komisaris independen adalah sebagai berikut:

1. Komisaris Independen bukan merupakan anggota manajemen;
2. Komisaris Independen bukan merupakan pemegang saham mayoritas, atau seorang pejabat dari atau dengan cara lain yang berhubungan secara langsung atau tidak langsung dengan pemegang saham mayoritas dari perusahaan;
3. Komisaris Independen dalam kurun waktu tiga tahun terakhir tidak dipekerjakan dalam kapasitasnya sebagai eksekutif oleh perusahaan atau perusahaan lainnya dalam satu kelompok usaha dan tidak pula dipekerjakan dalam kapasitasnya sebagai komisaris setelah tidak lagi menempati posisi seperti itu;
4. Komisaris Independen bukan merupakan penasihat profesional perusahaan atau perusahaan lainnya yang satu kelompok dengan perusahaan tersebut;

5. Komisaris Independen bukan merupakan seorang pemasok atau pelanggan yang signifikan dan berpengaruh dari perusahaan atau perusahaan lainnya yang satu kelompok, atau dengan cara lain berhubungan secara langsung atau tidak langsung dengan pemasok atau pelanggan tersebut;
6. Komisaris Independen tidak memiliki kontraktual dengan perusahaan atau perusahaan lainnya yang satu kelompok selain sebagai komisaris perusahaan tersebut;
7. Komisaris Independen harus bebas dari kepentingan dan urusan bisnis apapun atau hubungan lainnya yang dapat, atau secara wajar dapat dianggap sebagai campur tangan secara material dengan kemampuannya sebagai seorang komisaris untuk bertindak demi kepentingan yang menguntungkan perusahaan.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/PJOK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, menyatakan bahwa Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Emiten atau Perusahaan Publik pada periode berikutnya;
- b. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik tersebut;
- c. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Emiten atau Perusahaan Publik tersebut; dan
- d. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.

2.2.3.4. Tugas Komisaris Independen

Tugas komisaris independen menurut Alijoyo dan Zaini (2004: 171-172) adalah sebagai berikut:

- a. Menjamin transparansi dan keterbukaan laporan keuangan perusahaan.
- b. Perlakuan yang adil terhadap pemegang saham minoritas dan *stakeholder* yang lain.
- c. Diungkapkannya transaksi yang mengandung benturan kepentingan secara wajar dan adil.
- d. Kepatuhan perusahaan pada perundangan dan peraturan yang berlaku.
- e. Menjamin akuntabilitas organ perseroan.

2.2.3.5. Wewenang Komisaris Independen

Wewenang komisaris independen menurut Alijoyo dan Zaini (2004: 172) adalah sebagai berikut:

1. Komisaris Independen mengetuai komite audit dan komite nominasi.

2. Komisaris Independen berdasarkan pertimbangan yang rasional dan kehati-hatian berhak menyampaikan pendapat yang berbeda dengan anggota dewan komisaris lainnya yang wajib dicatat dalam Berita Acara Rapat Dewan Komisaris dan pendapat yang berbeda yang bersifat material, wajib dimasukkan dalam laporan tahunan.

2.2.3.6. Rumus Perhitungan Komisaris Independen

Menurut Fadli (2016: 1211) proporsi dewan komisaris dapat diukur dengan cara membandingkan antara komisaris independen dengan total komisaris.

Menurut Fitriyawati (2018: 13) “Proporsi komisaris independen diukur dengan membagi total komisaris independen dengan total dewan komisaris perusahaan.”

Menurut Ramadani dan Hartiyah (2020: 242) komisaris Independen dapat dihitung dengan rumus yaitu membandingkan antara total komisaris independen dengan total dewan komisaris.

2.3. Variabel Dependen

2.3.1. Agresivitas Pajak Perusahaan

2.3.1.1. Pengertian Agresivitas Pajak

Agresivitas pajak merupakan tindakan yang umum terjadi di kalangan perusahaan-perusahaan besar di seluruh dunia. Hal ini dikarenakan perusahaan menganggap pajak merupakan beban yang dapat mengurangi pendapatan atau laba perusahaan, adapun perusahaan sebagai wajib pajak badan menginginkan laba secara maksimal, sehingga perusahaan akan melakukan tindakan agresivitas pajak yang bertujuan untuk meminimalkan beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan.

Menurut Fahrani dkk (2018: 52-53) “Agresivitas pajak atau perencanaan pajak adalah suatu skema transaksi yang ditujukan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan–kelemahan ketentuan perpajakan suatu negara sehingga ahli pajak menyatakan legal karena tidak melanggar peraturan perpajakan.”

Menurut Blouin (2011) dalam Kholis dkk (2020: 779) “Agresivitas pajak adalah suatu tindakan menurunkan laba kena pajak melalui perencanaan pajak baik menggunakan cara yang dianggap atau tidak dianggap *tax evasion*.”

Berdasarkan penjelasan mengenai agresivitas pajak di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa agresivitas pajak merupakan kegiatan atau aktivitas perencanaan lebih spesifik yang bertujuan untuk menurunkan beban pajak dengan cara yang tergolong legal dalam arti menggunakan ketentuan yang diperbolehkan atau dengan memanfaatkan kelemahan–kelemahan ketentuan perpajakan (*loophole*) suatu negara, karena ahli pajak menyatakan tidak melanggar peraturan perpajakan atau dengan memanfaatkan *grey area* yang tidak dijelaskan secara khusus dalam undang-undang.

Apabila perusahaan melakukan tindakan menurunkan beban pajak dengan cara yang tergolong ilegal (melakukan dengan cara melanggar ketentuan perpajakan) berarti perusahaan melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*).

Menurut Pohan (2016: 18-19) memaparkan beberapa hal yang mempengaruhi perilaku wajib pajak untuk meminimumkan kewajiban pembayaran pajaknya, baik secara legal maupun ilegal adalah sebagai berikut:

1. Tingkat kerumitan suatu peraturan (*Complexity of rule*)

Makin rumit peraturan perpajakan, muncul kecenderungan wajib pajak untuk menghindarinya karena biaya untuk mematuhi (*compliance cost*) menjadi tinggi.

2. Besarnya pajak yang dibayar (*Tax required to pay*)

Makin besar jumlah pajak yang harus dibayar, akan makin besar pula kecenderungan wajib pajak untuk melakukan kecurangan dengan cara memperkecil jumlah pembayaran pajaknya.

3. Biaya untuk negosiasi (*Cost of bribe*)

Disengaja atau tidak, kadang-kadang wajib pajak melakukan negosiasi dan memberikan uang sogokan kepada fiskus dalam pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakannya. Makin tinggi uang sogokan yang dibayarkan, semakin kecil pula kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran.

4. Risiko deteksi (*Probability of detection*)

Risiko deteksi ini berhubungan dengan tingkat probabilitas apakah pelanggaran ketentuan perpajakan ini akan terdeteksi atau tidak. Makin rendah risiko terdeteksi, wajib pajak cenderung untuk melakukan pelanggaran. Sebaliknya, bila suatu pelanggaran mudah diketahui, wajib pajak akan memilih posisi konservatif dengan tidak melanggar aturan.

5. Besarnya denda (*Size of penalty*)

Makin berat sanksi perpajakan yang bisa dikenakan, maka wajib pajak akan cenderung mengambil posisi konservatif dengan tidak melanggar ketentuan perpajakan. Sebaliknya makin ringan sanksi atau bahkan ketiadaan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan wajib pajak, maka kecenderungan untuk melanggar akan lebih besar.

6. Moral masyarakat

Moral masyarakat akan memberi warna tersendiri dalam menentukan kepatuhan dan kesadaran mereka dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

2.3.1.2. Keuntungan dan Kerugian Melakukan Agresivitas Pajak

Praktik penghindaran pajak secara agresif ini membawa kerugian. Selain berpotensi mendatangkan kerugian, praktik agresivitas pajak juga memiliki tujuan meraih keuntungan, salah satunya adalah menghemat pengeluaran atas pajak agar keuntungan pengusaha semakin besar. Keuntungan tersebut nantinya dapat dimanfaatkan untuk mendanai investasi yang dapat meningkatkan keuntungan perusahaan di masa mendatang. Keuntungan lainnya adalah bagi manajemen, agresivitas pajak dapat meningkatkan kompensasi yang diterima dari pemilik atau pemegang saham perusahaan. Contoh praktik agresivitas pajak yaitu dengan

melakukan *leverage*. *Leverage* adalah penggunaan sumber dana yang memiliki beban tetap (*fixed rate of return*). Tujuannya untuk memberi keuntungan lebih besar dari pada biaya tetapnya sehingga akan meningkatkan pengembalian bagi pemegang saham. Aplikasi *leverage* adalah sumber dana melalui utang. Bunga yang harus dibayar oleh perusahaan akibat utang merupakan beban tetap. Perusahaan dimungkinkan menggunakan utang untuk memenuhi kebutuhan operasional dan investasi. Semakin besar utang maka laba kena pajak perusahaan semakin kecil, dengan begitu tindakan agresivitas pajak dikategorikan sebagai tindakan pajak agresif. Celah regulasi yang dimanfaatkan adalah Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Nomor 36 tahun 2008 yang berbunyi: “Bunga sebagai bagian dari biaya usaha yang boleh dikurangkan sebagai biaya (*deductible expense*) dalam proses perhitungan Pajak Penghasilan (PPH) badan”. Adapun faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak adalah likuiditas perusahaan yang rendah. Likuiditas yang rendah dapat mencerminkan perusahaan mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Kesulitan likuiditas dapat memicu perusahaan tidak taat terhadap peraturan pajak sehingga dapat mengarah pada tindakan agresif terhadap pajak perusahaan. Tindakan ini dilakukan oleh perusahaan untuk mengurangi pengeluaran beban pajak dan memanfaatkan penghematan yang dilakukan untuk mempertahankan arus kas. Oleh karena itu, perusahaan dengan rasio likuiditas yang rendah akan cenderung memiliki tingkat agresivitas pajak yang tinggi.

2.3.1.3. Metode Pengukuran Agresivitas Pajak

Menurut Rejeki (2019: 23) agresivitas pajak dapat diukur dengan menggunakan beberapa proksi yaitu:

1. *Effective Tax Rate* (ETR)
2. *Net Profit Margin* (NPM)
3. *Book Tax Differences* (BTD)
4. *Cash Effective Tax Rate* (CETR)

Adapun uraian dari metode pengukuran agresivitas pajak adalah sebagai berikut:

1. *Effective Tax Rate* (ETR), merupakan proksi yang digunakan untuk mengukur agresivitas pajak dengan cara membandingkan antara beban pajak penghasilan dengan laba sebelum pajak.
2. *Net Profit Margin* (NPM), merupakan proksi yang digunakan untuk mengukur agresivitas pajak dengan cara membandingkan antara NPM perusahaan dengan NPM industri.
3. *Book Tax Differences* (BTD), merupakan proksi yang digunakan untuk mengukur agresivitas pajak dengan cara pengurangan antara laba sebelum bunga dan pajak perusahaan i pada periode ke t ($EBIT_{i,t}$) dengan penghasilan kena pajak (*taxable income*) dibandingkan dengan total aktiva (*total asset*).

4. *Cash Effective Tax Rate* (CETR), merupakan proksi yang digunakan untuk mengukur agresivitas pajak dengan cara membandingkan antara pembayaran pajak perusahaan i pada periode ke t (pembayaran pajak $_{i,t}$) dengan pendapatan sebelum pajak perusahaan i pada periode ke t (pendapatan sebelum pajak $_{i,t}$).

Menurut Maulana (2020: 158) variabel agresivitas pajak dihitung melalui ETR (*Effective Tax Rate*) pada perusahaan yaitu dengan cara membandingkan antara beban pajak penghasilan dengan pendapatan sebelum pajak.

Dalam penelitian ini menggunakan proksi ETR dalam pengukuran agresivitas pajaknya. Alasan penelitian ini menggunakan proksi ETR karena beberapa penelitian sebelumnya banyak menggunakan ETR untuk mengukur agresivitas pajak. Menurut Indrajati dkk (2017: 126) “Rasio ini banyak digunakan oleh berbagai penelitian terdahulu karena dianggap dapat memperlihatkan perbedaan antara laba menurut akuntansi dengan laba menurut fiskal.” Menurut Suprimarini dan Suprasto (2017: 1361) “Rendahnya nilai ETR menggambarkan tingginya tingkat agresivitas pajak. Sebaliknya tingginya nilai ETR menggambarkan rendahnya tingkat agresivitas pajak.”

2.4. Penelitian Sebelumnya dan Kerangka Pemikiran

2.4.1. Penelitian Sebelumnya

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya mengenai pengaruh likuiditas, *leverage* dan komisaris independen terhadap agresivitas pajak perusahaan dengan antara lain sebagai berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti, Tahun, Judul	Variabel	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian	Publikasi
1.	Hidayat, K., Ompusunggu, A. P., & Suratno, H. (2016). Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak Dengan Insentif Pajak Sebagai Pemoderasi (Studi pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar	Variabel Independen: <i>Corporate Social Responsibility</i> . Variabel Pemoderasi: Insentif Pajak (<i>tax deduction</i>). Variabel Kontrol: <i>Leverage</i> ,	Variabel Independen: - CSRDI: • Jumlah item pengungkapan CSR yang dipenuhi • Jumlah semua item pengungkapan CSR (79 item indikator pengungkapan CSR menurut GRI 3.0). Variabel Pemoderasi: - TI (<i>Tax Incentive</i>): • Variabel <i>dummy</i> ; kategori 1 untuk perusahaan yang memperoleh insentif	<i>Moderated Regression Analysis</i> (MRA)	<i>The result showed that CSR has negative influence to tax aggressiveness. The higher the level of corporation's CSR disclosure, the lower is the level of tax aggressiveness. Tax incentives was proven and capable to strengthen the relation between CSR and tax aggressiveness. CSR simulantly tested</i>	JIAFE (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi). Vol. 2. No. 2. 2016. ISSN: 2502-3020. E-ISSN: 2502-4159.

	di BEI).	<p><i>Size, Return on Assets (ROA), Capital Intensity dan Inventory Intensity.</i></p> <p>Variabel Dependen: Agresivitas Pajak</p>	<p>pajak (membebankan CSR secara fiskal) dan kategori 0 untuk perusahaan yang tidak memperoleh insentif pajak (tidak membebankan CSR secara fiskal).</p> <p>Variabel Kontrol:</p> <ul style="list-style-type: none"> - DER: <ul style="list-style-type: none"> • <i>Total Liabilities</i> • <i>Equity</i> - Ukuran Perusahaan: <ul style="list-style-type: none"> • <i>Total Asset</i> - ROA: <ul style="list-style-type: none"> • <i>Net Income</i> • <i>Total Aset</i> - CAPINT: <ul style="list-style-type: none"> • <i>Total Net Fixed Assets</i> • <i>Total Assets</i> - INVINT: <ul style="list-style-type: none"> • <i>Total Persediaan</i> • <i>Total Aset</i> <p>Variabel Dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ETR: <ul style="list-style-type: none"> • <i>Total Beban Pajak Penghasilan</i> • <i>Total Laba Sebelum Pajak.</i> 		<p><i>with the control variables showed similar result. It has negative influence. The higher the level of corporation's CSR disclosure, the lower is the level of tax aggressiveness.</i></p>	
2.	Muliasari, R., & Hidayat, A. (2020). Pengaruh Likuiditas, Leverage dan Komisaris Independen Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan.	<p>Variabel Independen: Likuiditas, Leverage dan Komisaris Independen.</p> <p>Variabel Dependen: Agresivitas Pajak</p>	<p>Variabel Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Likuiditas (LIQ): <ul style="list-style-type: none"> • Aktiva Lancar • Utang Lancar - Leverage: <ul style="list-style-type: none"> • Total Utang • Total Asset - INDEP: <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Anggota Dewan Komisaris Independen • Jumlah Total Anggota Dewan Komisaris <p>Variabel Dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ETR: <ul style="list-style-type: none"> • <i>Beban Pajak Penghasilan</i> 	Analisis regresi linear berganda	<p>Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa likuiditas yang menggunakan quick ratio tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak, lalu leverage berpengaruh terhadap agresivitas pajak dan untuk komisaris independen juga berpengaruh</p>	<p>SULTANIS T: Jurnal Manajemen dan Keuangan. Vol. 8. No. 1. 2020. ISSN: 2338-4328. E-ISSN: 2686-2646.</p>

			<ul style="list-style-type: none"> • Laba Sebelum Pajak 		terhadap agresivitas pajak, leverage dan komisaris independen berpengaruh terhadap agresivitas pajak perusahaan secara simultan.	
3.	Indrajati, D., Djumena, S., & Yuniarwati. (2017). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Agresivitas Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI 2013–2015.	<p>Variabel Independen: <i>Leverage</i>, Likuiditas, <i>Capital Intensity</i> dan Komisaris Independen.</p> <p>Variabel Dependen: Agresivitas Pajak</p>	<p>Variabel Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Debt to Asset Ratio</i>: • <i>Total Debt</i> • <i>Total Asset</i> - <i>Current Ratio</i>: • <i>Current Asset</i> • <i>Current Liability</i> - <i>Capital Intensity Ratio</i>: • <i>Fixed Asset</i> • <i>Total Asset</i> - Komisaris Independen: • Total Komisaris Independen • Total Dewan Komisaris <p>Variabel Dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Effective Tax Rate</i>: • <i>Total Tax Expense</i> • <i>Pre-Tax Income</i> 	Analisis regresi linear berganda	Hasil penelitian menunjukkan hanya likuiditas yang memiliki pengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan sedangkan pengujian secara simultan memiliki pengaruh. Didapati juga bahwa semua variabel independen mempunyai pengaruh positif terhadap agresivitas pajak, sehingga hipotesis H2 dan H4 ditolak. Likuiditas perusahaan agaknya lebih ditujukan untuk berekspansi jangka pendek, dan komisaris independen belum mampu meredam agresivitas pajak perusahaan.	Jurnal Muara Ilmu Ekonomi dan Bisnis. Vol. 1. No. 1. 2017. ISSN: 2579-6224. E-ISSN: 2579-6232.
4.	Sukmawati, F., & Rebecca, C. (2016). Pengaruh Likuiditas dan Leverage Terhadap	<p>Variabel Independen: Likuiditas dan Leverage.</p>	<p>Variabel Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Likuiditas: • Total Aktiva Lancar • Total Hutang Lancar - Leverage: • Total Hutang • Total Aktiva 	Analisis regresi linear berganda	Hasil penelitian menunjukan bahwa likuiditas berpengaruh dalam memberikan kontribusi terhadap agresivitas pajak,	<i>Conference on Management and Behavioral Studies</i> . 2016. ISSN:

	Agresivitas Pajak Perusahaan pada Perusahaan Industri Barang Konsumsi di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2014.	Variabel Dependen: Agresivitas Pajak	Variabel Dependen: - Agresivitas Pajak: • Pembayaran Pajak • Laba Sebelum Pajak		leverage berpengaruh dalam memberikan kontribusi terhadap agresivitas pajak dan likuiditas dan leverage berpengaruh dalam memberikan kontribusi terhadap agresivitas pajak.	2541-3400. E-ISSN: 2541-2850.
5.	Maulana, I. A. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Agresivitas Pajak pada Perusahaan Properti dan Real Estate.	Variabel Independen: <i>Capital Intensity</i> , Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Ukuran Perusahaan, <i>Inventory Intensity</i> . Variabel Dependen: Agresivitas Pajak	Variabel Independen: - CINT: • Total Aset Bersih • Total Aset - ROA: • <i>Earning After Tax</i> • Modal sendiri - LEV: • Hutang Jangka Panjang • Total Aset - <i>SIZE</i> : • Total Aset - INVINT: • Total Persediaan • Total Aset Variabel Dependen: - ETR: • Beban Pajak Penghasilan • Pendapatan Sebelum Pajak	Analisis regresi linear berganda	Hasil dari penelitian ini diperoleh bahwa variabel <i>Capital Intensity</i> , Profitabilitas, dan <i>Inventory Intensity</i> berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak, sedangkan <i>Leverage</i> dan Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak.	Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi. Vol. 11. No. 2. 2020. ISSN: 2301-8879. E-ISSN: 2599-1809.
6.	Natalya, D. (2018). Pengaruh <i>Capital Intensity</i> , <i>Leverage</i> dan Profitabilitas Terhadap Tax Agresivitas Dengan Kinerja Pasar Sebagai Variabel Moderating.	Variabel Independen: <i>Capital Intensity</i> , <i>Leverage</i> dan Profitabilitas. Variabel Pemoderasi: Kinerja Pasar.	Variabel Independen: - CAPINT: • Total Aset Tetap • Total Aset - LEV: • Total Utang • Total Aset - ROA: • Laba Bersih Sebelum Pajak • Total Asset	Alat uji yang digunakan dalam penelitian ini adalah STATA	Hasil penelitian ini adalah <i>Capital Intensity</i> berpengaruh signifikan terhadap Tax Agresivitas, <i>Leverage</i> berpengaruh signifikan terhadap Tax Agresivitas, Profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap Tax Agresivitas,	Media Akuntansi Perpajakan. Vol. 3. No. 1. 2018. ISSN: 2355-9993. E-ISSN: 2527-953X.

		Variabel Dependen: Tax Agresivitas	Variabel Pemoderasi: - Tobin's Q Variabel Dependen: - ETR: • Beban Pajak Penghasilan • Pendapatan Sebelum Pajak		moderasi Kinerja Pasar tidak mampu memperkuat pengaruh Capital Intensity terhadap Tax Agresivitas, moderasi Kinerja Pasar tidak mampu memperkuat pengaruh Leverage terhadap Tax Agresivitas dan moderasi Kinerja Pasar mampu memperkuat pengaruh Profitabilitas terhadap Tax Agresivitas.	
7.	Dharmayanti, N. (2019). Pengaruh Likuiditas, Leverage dan Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Termasuk dalam LQ45 pada Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2013-2017).	Variabel Independen: Likuiditas, <i>Leverage</i> dan Profitabilitas. Variabel Dependen: Agresivitas Pajak	Variabel Independen: - Rasio Lancar: • Aset Lancar • Kewajiban Lancar - LEV: • Total Kewajiban • Ekuitas - ROA: • Laba Sebelum Pajak • Total Aset Variabel Dependen: - ETR: • Total Beban Pajak Penghasilan • Laba Sebelum Pajak	Analisis regresi berganda	<i>The results showed that partially liquidity and leverage variables significantly affect the aggressiveness of taxes. While profitability has no significant effect on tax aggressiveness. The results of research simultaneously show the result that the variable liquidity, leverage and profitability simultaneously affect the aggressiveness of taxes.</i>	Simposium Nasional Multidisiplin (SinaMu) 2019. E-ISSN 2714-5603.
8.	Ramadani, D. C., & Hartiyah, S. (2020). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Leverage, Likuiditas,	Variabel Independen: <i>Corporate Social Responsibility, Leverage, Likuiditas, Ukuran</i>	Variabel Independen: - CSR: • Jumlah item CSR yang diungkapkan perusahaan • 78 item pengungkapan yang disarankan GRI – 4 - <i>Leverage</i> : • Total Utang • Total Aset	Analisis regresi berganda	Hasil pengujian menunjukkan bahwa corporate social responsibility, likuiditas dan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap	<i>Journal of Economic, Business and Engineering (JEBE)</i> . Vol. 1. No. 2. 2020. E-ISSN: 2716-

	Ukuran Perusahaan, dan Komisaris Independen Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014 sampai 2018).	Perusahaan dan Komisaris Independen. Variabel Dependen: Agresivitas Pajak	- Likuiditas: • Aktiva Lancar • Hutang Lancar - Ukuran perusahaan: • Total Asset - Komisaris Independen: • \sum Komisaris Independen • \sum Dewan Komisaris Variabel Dependen: - ETR: • Beban Pajak Penghasilan • Laba Sebelum Pajak		agresivitas pajak. leverage dan komisaris independen berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.	2583.
9.	Kartikasari, W., Munthe, I. L. S., & Fatahurrizak. (2017). Pengaruh Manajemen Laba, Return On Asset, Current Ratio, dan Komisaris Independen Terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2016.	Variabel Independen: Manajemen Laba, <i>Return On Asset</i> , <i>Current Ratio</i> dan Komisaris Independen. Variabel Dependen: Agresivitas Pajak	Variabel Independen: - DTA: • <i>Total accrual</i> (TAC) • <i>Dikurang Nondiscretionary total accrual</i> (NDTA) - ROA: • Laba Bersih Sesudah Pajak • Total Aset - CR: • Aset Lancar • Hutang Lancar - Komisaris Independen: • \sum Komisaris Independen • \sum Dewan Komisaris Variabel Dependen: - ETR: • Beban Pajak Penghasilan • Laba Sebelum Pajak	Analisis regresi berganda	Hasil pengujian secara simultan bahwa variabel Manajemen Laba, Return On Asset, Current Ratio dan Komisaris Independen berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Secara Parsial Return On Asset dan Komisaris Independen berpengaruh terhadap Agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2016, sedangkan Manajemen Laba, dan Current Ratio tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia	Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Maritim Raja Ali Haji. 2017.

					Tahun 2013-2016.	
10.	Nurjanah, I., Hanum, A. N., & Alwiyah. (2018). Pengaruh Likuiditas, Leverage, Corporate Social Responsibility, Ukuran Perusahaan dan Komisaris Independen Terhadap Agresivitas Pajak Badan.	Variabel Independen: Likuiditas, <i>Leverage</i> , <i>Corporate Social Responsibility</i> , Ukuran Perusahaan dan Komisaris Independen. Variabel Dependen: Agresivitas Pajak Badan.	Variabel Independen: - <i>Liq_{it}</i> : • Aktiva Lancar • Hutang Lancar - <i>Leverage (LEV)</i> : • Total Utang • Total Aset - <i>CSRDI_j</i> : • <i>Dummy variable</i> . (1= jika item i diungkapkan; 0= jika item i tidak diungkapkan) • Jumlah item untuk perusahaan j, $n_j \leq 91$. - Ukuran Perusahaan: • Total Asset - Komisaris Independen (KI): • Komisaris Independen • Total komisaris Variabel Dependen: - <i>Effective Tax Rate (ETR)</i> : • Beban Pajak Penghasilan • Laba Sebelum Pajak	Analisis regresi linear berganda	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel independen ukuran perusahaan secara parsial berpengaruh signifikan, tetapi variabel independen likuiditas, leverage, corporate social responsibility dan komisaris independen secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak badan. Dan hasil uji koefisien determinasi menunjukkan angka sebesar 0,183, hal ini mengindikasikan bahwa secara simultan variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen agresivitas pajak sebanyak 18,3%, sedangkan sisanya sebesar 81,7% dijelaskan oleh variabel lain.	Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan, Vol. 1. 2018. ISSN: 2301-9093. E-ISSN: 2654-766X.

Pada penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian-penelitian terdahulu yaitu untuk variabel likuiditas memiliki persamaan dengan penelitian Muliarsi dan Hidayat (2020), penelitian Indrajati dkk (2017), penelitian Dharmayanti (2019), penelitian Ramadani dan Hartiyah (2020), penelitian Nurjanah dkk (2018). Untuk variabel *leverage* memiliki persamaan dengan penelitian Muliarsi dan Hidayat (2020), penelitian Indrajati dkk (2017), penelitian Maulana (2020), penelitian Natalya (2018), penelitian Ramadani dan Hartiyah (2020), penelitian Nurjanah dkk (2018). Untuk variabel komisaris independen memiliki persamaan dengan penelitian Muliarsi dan Hidayat (2020), penelitian Indrajati dkk (2017), penelitian Ramadani dan Hartiyah (2020), penelitian Kartikasari dkk (2017), penelitian Nurjanah dkk (2018).

Perbedaan dalam penelitian ini yaitu unit analisis penelitian adalah perusahaan sub sektor makanan dan minuman, sedangkan penelitian terdahulu memiliki beragam unit analisis yaitu penelitian Muliastuti dan Hidayat (2020) yaitu pada perusahaan Jakarta Islamic Index tahun 2013-2017. Penelitian Indrajati dkk (2017) yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan pembatasan periode pengamatan selama tahun 2013-2015. Penelitian Dharmayanti (2019) yaitu perusahaan manufaktur yang termasuk dalam LQ45 pada Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2013-2017. Penelitian Ramadani dan Hartiyah (2020) yaitu perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 sampai 2018. Penelitian Nurjanah dkk (2018) yaitu perusahaan pertanian dan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 2012-2016. Penelitian Maulana (2020) yaitu seluruh perusahaan Properti dan Real Estate yang terdaftar di BEI. Penelitian Natalya (2018) yaitu perusahaan manufaktur sektor konsumsi barang industri tahun 2010-2016. Penelitian Kartikasari dkk (2017) yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2016.


Berdasarkan uraian dan tabel dari penelitian sebelumnya, maka disimpulkan dalam tabel hasil penelitian terdahulu untuk mempermudah dalam pengambilan hipotesis yang tertera dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.2 Matriks Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Variabel Penelitian	Dependen (Y)
		Independen (X)	Agresivitas Pajak Perusahaan
1.	(Hidayat et al., 2016)	<i>Leverage</i>	TS
2.	(Muliastuti & Hidayat, 2020)	Likuiditas	TS
		<i>Leverage</i>	S
		Komisaris Independen	S
3.	(Indrajati et al., 2017)	<i>Leverage</i>	TS
		Likuiditas	S
		Komisaris Independen	TS
4.	(Sukmawati & Rebecca, 2016)	Likuiditas	S
		<i>Leverage</i>	S
5.	(Maulana, 2020)	<i>Leverage</i>	TS
6.	(Natalya, 2018)	<i>Leverage</i>	S
7.	(Dharmayanti, 2019)	Likuiditas	S

		<i>Leverage</i>	S
8.	(Ramadani & Hartiyah, 2020)	<i>Leverage</i>	S
		Likuiditas	S
		Komisaris Independen	S
9.	(Kartikasari et al., 2017)	Komisaris Independen	S
10.	(Nurjanah et al., 2018)	Likuiditas	TS
		<i>Leverage</i>	TS
		Komisaris Independen	TS
Total			19
Berpengaruh Signifikan		Likuiditas	4
		<i>Leverage</i>	4
		Komisaris Independen	3
Tidak Berpengaruh Signifikan		Likuiditas	2
		<i>Leverage</i>	4
		Komisaris Independen	2

Keterangan:

 : Proksi penelitian terdahulu telah disesuaikan dengan proksi yang dipilih untuk penelitian

S : Berpengaruh Signifikan

TS : Tidak Berpengaruh Signifikan

2.4.2. Kerangka Pemikiran

Pajak memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia. Hal ini dikarenakan pajak merupakan sumber dana pemerintah untuk mendanai pembangunan di pusat dan daerah yang bertujuan untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat, sehingga pajak disebut sebagai pendapatan utama negara. Pentingnya peranan pajak bagi negara menyebabkan pemerintah menciptakan berbagai program dan regulasi yang ditujukan untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak. Adapun perusahaan sebagai wajib pajak badan yang menganggap pajak merupakan beban atau biaya yang dapat mengurangi keuntungan dan memperkecil laba bersih perusahaan. Hal itu karena tujuan pemerintah memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak bertentangan dengan tujuan perusahaan sebagai wajib pajak badan yang menginginkan laba secara maksimal. Sehingga perusahaan menginginkan pembayaran pajak yang minimum maka timbul ketidakpatuhan yang dilakukan oleh wajib pajak badan atau manajemen perusahaan yang akan berdampak pada upaya

untuk melakukan agresivitas pajak. Agresivitas pajak merupakan tindakan perusahaan untuk menurunkan beban pajak yang dibayar atau mengurangi kewajiban pajak yang seharusnya dibayar melalui perencanaan pajak baik secara legal (*tax avoidance*) atau dengan cara memanfaatkan kelemahan-kelemahan ketentuan perpajakan (*loophole*) suatu negara atau dengan cara ilegal (*tax evasion*) yaitu dengan cara melanggar ketentuan perpajakan. Sehingga tidak semua tindakan perencanaan pajak melanggar hukum, akan tetapi semakin banyak celah yang digunakan perusahaan tersebut dianggap semakin agresif dalam perpajakan.

2.4.2.1. Pengaruh Likuiditas Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan

Likuiditas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Penelitian ini membuktikan bahwa semakin tinggi likuiditas maka agresivitas pajak semakin meningkat. Hal ini disebabkan perusahaan dengan rasio likuiditas yang tinggi menunjukkan tingginya kemampuan perusahaan dalam memenuhi utang jangka pendeknya, yang menandakan bahwa perusahaan dalam kondisi keuangan yang sehat. Likuiditas yang terlalu tinggi juga tidak baik karena menggambarkan tingginya uang tunai yang menganggur sehingga dianggap kurang produktif. Karena perusahaan dengan likuiditas yang tinggi maka akan mengarah pada tindakan agresivitas pajak (Ramadani & Hartiyah, 2020). Semakin tinggi rasio likuiditas perusahaan, maka tindakan untuk mengurangi laba akan makin rendah dengan alasan perusahaan mampu untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya termasuk dalam kewajiban perpajakan (Dharmayanti, 2019).

Dalam hubungannya dengan pajak, perusahaan yang memiliki likuiditas yang tinggi menunjukkan kemampuan perusahaan yang baik dalam memenuhi utang jangka pendeknya, yang berarti mempunyai hubungan negatif. Semakin tinggi nilai likuiditas perusahaan semakin rendah nilai *effective tax rate*, yang berarti tingkat agresivitas pajak perusahaan semakin meningkat. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya kemungkinan perusahaan menggunakan aset lancarnya untuk meningkatkan kegiatan operasional perusahaan dalam menghasilkan laba (Indrajati et al., 2017).

Uraian tersebut didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ramadani dan Hartiyah (2020) yang menjelaskan bahwa likuiditas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Penelitian Dharmayanti (2019) yang menjelaskan bahwa likuiditas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap agresivitas pajak serta memiliki arah negatif. Penelitian Indrajati dkk (2017) yang menjelaskan bahwa likuiditas signifikan negatif mempengaruhi agresivitas pajak.

H1 : Likuiditas berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan pada Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2016-2019.

2.4.2.2. Pengaruh *Leverage* Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan

Leverage merupakan suatu ukuran seberapa besar asset yang dimiliki perusahaan dibiayai oleh utang. *Leverage* merupakan jumlah utang yang dimiliki perusahaan untuk pembiayaan dan dapat mengukur besarnya aktiva yang dibiayai utang. Tingginya ketergantungan perusahaan pada pinjaman atau hutang menunjukkan tingginya tingkat *leverage* perusahaan, sedangkan perusahaan dengan *leverage* rendah membiayai asetnya dengan modal sendiri. Penggunaan hutang akan menimbulkan biaya tetap yaitu beban bunga yang harus dibayar perusahaan. Biaya pembayaran bunga atas hutang perusahaan dapat digunakan sebagai biaya pengurang dalam penentuan penghasilan kena pajak dimana perusahaan akan memiliki nilai *effective tax ratio* (ETR) yang lebih rendah dari tarif penentuan pajak, hal ini tentu menurunkan beban pembiayaan perusahaan. Bunga pinjaman baik yang dibayar maupun yang belum dibayar pada saat jatuh tempo adalah biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan. Sehingga dengan biaya bunga yang dikenakan atas hutang, perusahaan akan lebih memilih menggunakan hutang dalam pembiayaan. Tingkat *leverage* dapat menggambarkan risiko keuangan perusahaan (Muliarsi & Hidayat, 2020).

Sumber dana yang didapatkan perusahaan tidak hanya berasal dari internal perusahaan, namun juga dapat berasal dari eksternal perusahaan atau biasa dikatakan sebagai hutang perusahaan. Dana yang berasal dari eksternal perusahaan juga bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional dan investasi perusahaan. Semakin besar hutang perusahaan maka akan menimbulkan beban pajak menjadi kecil karena adanya penambahan unsur biaya usaha dan pengurangan tersebut sangat berarti bagi perusahaan yang terkena tarif pajak yang tinggi (Fenny Wirna 2014). Semakin tinggi nilai dari rasio *leverage*, berarti semakin tinggi jumlah pendanaan dari hutang yang digunakan perusahaan dan semakin tinggi pula biaya bunga yang timbul dari utang tersebut. Biaya bunga yang semakin tinggi akan memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak perusahaan. Jika perusahaan mendanai biaya perusahaan dengan hutang maka perusahaan memperoleh beban bunga yang harus ditanggung oleh perusahaan, maka beban bunga yang ditimbulkan dari hutang perusahaan akan mengurangi penghasilan perusahaan dan beban pajak yang ditanggung perusahaan juga berkurang. Perusahaan yang melakukan pembiayaan dengan berhutang agar mengurangi beban pajak dapat dikatakan bahwa perusahaan tersebut melakukan *tax agresivitas* (Natalya, 2018).

Uraian tersebut didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Muliarsi dan Hidayat (2020) yang menjelaskan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap agresivitas pajak perusahaan. Penelitian Natalya (2018) yang menjelaskan bahwa *leverage* memiliki pengaruh signifikan terhadap *Tax Agresivitas*.

H2 : *Leverage* berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan pada Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2016-2019.

2.4.2.3. Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan

Semakin besar proporsi dewan komisaris independen maka semakin besar pengaruhnya untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja manajemen. Dengan Pengawasan yang semakin besar, manajemen akan berhati-hati dalam menjalankan perusahaan sehingga meminimalkan terjadinya penghindaran pajak. Secara Proaktif, dewan komisaris independen juga dapat mendorong manajemen untuk mematuhi peraturan perundangan perpajakan yang berlaku. Sehingga kehadiran dewan komisaris dapat mengurangi perilaku agresif terhadap pajak yang dilakukan manajemen (Kartikasari et al., 2017).

Komisaris independen memiliki peranan penting dalam perusahaan yaitu sebagai pengawas dan mengarahkan agar perusahaan beroperasi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Komisaris independen menjadi penengah antara manajemen perusahaan dan pemilik perusahaan dalam pengambilan keputusan-keputusan strategi atau kebijakan agar tidak melanggar peraturan yang berlaku, hal ini termasuk dalam keputusan perpajakan. Komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang berasal dari luar manajemen perusahaan dan bukan merupakan pegawai perusahaan tersebut tetapi berurusan langsung dengan organisasi dalam perusahaan, perusahaan mengangkat komisaris independen untuk mengawasi bagaimana organisasi dalam perusahaan dijalankan dan dapat menjadi penengah antara komisaris dalam dan pihak pemegang saham apabila terjadi konflik, komisaris independen dipercaya menjadi penengah diantara kedua belah pihak karena bersikap objektif dan memiliki risiko yang kecil dalam konflik internal (Muliasari & Hidayat, 2020).

Uraian tersebut didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kartikasari dkk (2017) yang menjelaskan bahwa komisaris independen berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Penelitian Muliasari dan Hidayat (2020) yang menjelaskan bahwa komisaris independen berpengaruh secara signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan.

H3 : Komisaris Independen berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan pada Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2016-2019.

2.4.2.4. Pengaruh Likuiditas, *Leverage* dan Komisaris Independen Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan

Tingkat likuiditas yang tinggi menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi utang jangka pendek. Hal ini menunjukkan keuangan perusahaan dalam kondisi yang sehat. Likuiditas yang terlalu tinggi juga tidak baik karena menggambarkan tingginya uang tunai yang menganggur sehingga dianggap kurang produktif. Karena perusahaan dengan likuiditas yang tinggi maka akan mengarah pada tindakan agresivitas pajak. Semakin tinggi nilai likuiditas perusahaan semakin

rendah nilai *effective tax rate*, yang berarti tingkat agresivitas pajak perusahaan semakin meningkat. Perusahaan yang mengalami kesulitan likuiditas kemungkinan tidak akan mematuhi peraturan perpajakan. Kesulitan dalam memenuhi utang jangka pendek dapat membuat suatu perusahaan melakukan tindakan agresivitas pajak karena perusahaan lebih mementingkan untuk mempertahankan arus kas daripada harus membayar pajak yang tinggi.

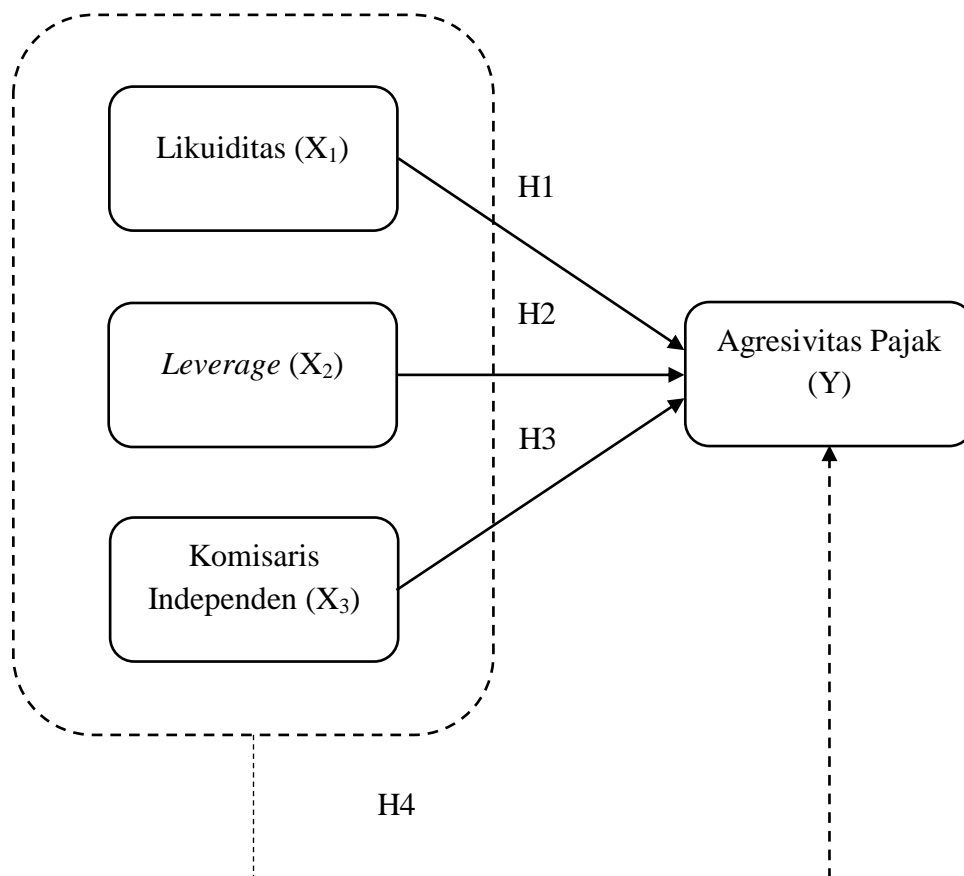
Tingginya ketergantungan perusahaan pada pinjaman atau hutang menunjukkan tingginya tingkat *leverage* perusahaan, sedangkan perusahaan dengan *leverage* rendah membiayai asetnya dengan modal sendiri. Sumber dana yang didapatkan perusahaan tidak hanya berasal dari internal perusahaan, namun juga dapat berasal dari eksternal perusahaan atau biasa dikatakan sebagai hutang perusahaan. Perusahaan dimungkinkan menggunakan utang untuk memenuhi kebutuhan operasional dan investasi perusahaan. Akan tetapi, utang akan menimbulkan beban tetap (*fixed rate of return*) bagi perusahaan yang disebut dengan bunga. Biaya pembayaran bunga atas hutang perusahaan dapat digunakan sebagai biaya pengurang dalam penentuan penghasilan kena pajak dimana perusahaan akan memiliki nilai *effective tax ratio* (ETR) yang lebih rendah dari tarif penentuan pajak, hal ini tentu menurunkan beban pembiayaan perusahaan. Semakin besar utang perusahaan maka beban pajak akan menjadi lebih kecil karena bertambahnya unsur biaya usaha dan pengurangan tersebut sangat berarti bagi perusahaan yang terkena pajak tinggi. Semakin tinggi nilai dari rasio *leverage*, berarti semakin tinggi jumlah pendanaan dari hutang yang digunakan perusahaan dan semakin tinggi pula biaya bunga yang timbul dari utang tersebut. Perusahaan yang melakukan pembiayaan dengan berhutang agar mengurangi beban pajak dapat dikatakan bahwa perusahaan tersebut melakukan *tax agresivitas*.

Semakin besar proporsi dewan komisaris independen maka semakin besar pengaruhnya untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja manajemen. Sehingga kehadiran dewan komisaris dapat mengurangi perilaku agresif terhadap pajak yang dilakukan manajemen. Komisaris independen memiliki peranan penting dalam perusahaan yaitu sebagai pengawas dan mengarahkan agar perusahaan beroperasi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Komisaris independen menjadi penengah antara manajemen perusahaan dan pemilik perusahaan dalam pengambilan keputusan-keputusan strategi atau kebijakan agar tidak melanggar peraturan yang berlaku, hal ini termasuk dalam keputusan perpajakan.

H4 : Likuiditas, *Leverage* dan Komisaris Independen secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan pada Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2016-2019.

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Likuiditas yang diproksikan dengan Rasio Lancar (*Current Ratio*), *Leverage* yang diproksikan dengan *Debt to Asset Ratio* (*Debt Ratio*) dan Komisaris Independen

berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan yang diproksikan dengan ETR (*Effective Tax Rate*).



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Keterangan:

X_1, X_2, X_3 = Variabel Independen

Y = Variabel Dependen

—————▶ = Berpengaruh secara parsial

-----▶ = Berpengaruh secara simultan atau bersama-sama

2.5. Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian merupakan dugaan atau jawaban sementara terhadap perumusan masalah penelitian yang harus dibuktikan kebenarannya berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian. Berdasarkan definisi tersebut, maka hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Likuiditas berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan pada Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2016-2019.
2. *Leverage* berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan pada Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2016-2019.
3. Komisaris Independen berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan pada Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2016-2019.
4. Likuiditas, *Leverage* dan Komisaris Independen secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan pada Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2016-2019.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian verifikatif. Dalam penelitian ini analisis verifikatif digunakan untuk mengetahui pengaruh Likuiditas, *Leverage* dan Komisaris Independen terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan pada Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2016-2019. Penelitian ini menggunakan metode penelitian *Explanatory Survey* yaitu metode yang bertujuan untuk menguji hipotesis. Teknik penelitian ini menggunakan statistik inferensial dan teknik analisis data statistik deskriptif.

3.2. Objek, Unit Analisis dan Lokasi Penelitian

3.2.1. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah objek yang diteliti dan dianalisis. Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian yaitu variabel-variabel meliputi Likuiditas yang diproksikan dengan Rasio Lancar (*Current Ratio*), *Leverage* yang diproksikan dengan *Debt to Asset Ratio (Debt Ratio)* dan Komisaris Independen yang tercatat didalam laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan serta pengaruhnya terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan yang diproksikan dengan ETR (*Effective Tax Rate*) pada Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2016-2019.

3.2.2. Unit Analisis

Dalam penelitian ini unit analisis yang digunakan berupa *organization*, yaitu yang diteliti adalah suatu organisasi/perusahaan, sehingga sumber data merupakan respons dari divisi/organisasi/perusahaan pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2016-2019.

3.2.3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat variabel-variabel penelitian dianalisis seperti organisasi/perusahaan/instansi atau daerah tertentu. Lokasi penelitian ini adalah perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2016-2019.

3.3. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis data penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu data mengenai jumlah, tingkatan, perbandingan, volume, yang berupa angka-angka yang dapat diperoleh dari laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2016-2019. Jenis data penelitian ini berdasarkan waktu atau periode pengumpulannya adalah data *time series*.
Data

adalah *time series* karena data dalam penelitian ini adalah data dalam runtut waktu tertentu yaitu periode 2016-2019.

Sumber data penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung, tetapi diperoleh dari penyedia data seperti: situs www.idnfinancials.com, situs BEI www.idx.co.id, situs www.sahamok.net serta *website* perusahaan. Data yang dimaksud meliputi laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan sub sektor makanan dan minuman pada periode 2016-2019.

3.4. Operasionalisasi Variabel

3.4.1. Variabel Independen

Menurut Sugiyono (2019: 69) “Variabel ini sering disebut sebagai variabel *stimulus*, *prediktor*, *antecedent*. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel bebas. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat).”

Dalam penelitian ini, terdapat tiga variabel independen yang digunakan yaitu Likuiditas, *Leverage* dan Komisaris Independen.

1. Likuiditas

Jenis-jenis rasio yang ada dalam rasio likuiditas yaitu rasio lancar (*current ratio*), rasio cepat (*quick ratio* atau *acid test ratio*), rasio kas (*cash ratio*), rasio perputaran kas (*cash turn over*) dan *Inventory to Net Working Capital*.

Dalam penelitian ini, likuiditas diukur dengan menggunakan proksi rasio lancar (*current ratio*). Pemilihan menggunakan proksi ini karena rasio lancar (*current ratio*) digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aktiva lancar yang tersedia pada perusahaan. Di samping itu rasio lancar mempunyai kemampuan memprediksi kebangkrutan yang baik.

Adapun rumus untuk mencari rasio lancar (*current ratio*) yaitu dengan cara membandingkan antara total aktiva lancar (*current assets*) dengan total utang lancar (*current liabilities*).

2. Leverage

Jenis-jenis rasio yang ada dalam rasio solvabilitas (*leverage*) yaitu *Debt to Asset Ratio (Debt Ratio)*, *Debt to Equity Ratio*, *Long Term Debt to Equity Ratio (LTDtER)*, *Times Interest Earned* dan *Fixed Charge Coverage (FCC)*.

Dalam penelitian ini, *leverage* diukur dengan menggunakan proksi *Debt to Asset Ratio (Debt Ratio)*. Pemilihan menggunakan proksi ini karena menurut Kasmir (2019: 158) “Merupakan rasio utang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva. Dengan kata lain, seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva.”

Adapun rumus untuk mencari *Debt to Asset Ratio (Debt Ratio)* yaitu dengan cara membandingkan antara total *debt* dengan total *assets*.

3. Komisaris Independen

Komisaris independen adalah anggota komisaris yang berasal dari luar perusahaan dan bukan merupakan pegawai perusahaan tersebut tetapi berurusan langsung dengan organisasi dalam perusahaan, tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada perusahaan, tidak memiliki hubungan afiliasi dengan emiten atau perusahaan, komisaris lainnya, direktur, pemegang saham utama atau pengendali maupun perusahaan publik, tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung serta bebas dari hubungan bisnis lainnya yang berkaitan dengan usaha emiten atau perusahaan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Adapun komisaris independen dapat diukur yaitu dengan cara membandingkan antara total komisaris independen dengan total dewan komisaris.

3.4.2. Variabel Dependen

Menurut Sugiyono (2019: 69) “Variabel dependen sering disebut sebagai variabel *output*, kriteria, konsekuen. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas.”

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Agresivitas Pajak Perusahaan. Agresivitas pajak dapat diukur dengan menggunakan beberapa proksi yaitu: *Effective Tax Rate (ETR)*, *Net Profit Margin (NPM)*, *Book Tax Differences (BTD)* dan *Cash Effective Tax Rate (CETR)*.

Dalam penelitian ini, agresivitas pajak diukur dengan menggunakan proksi ETR (*Effective Tax Rate*). Pemilihan menggunakan proksi ini karena beberapa penelitian sebelumnya banyak menggunakan ETR untuk mengukur agresivitas pajak. Proksi ETR dianggap dapat memperlihatkan perbedaan antara laba menurut akuntansi dengan laba menurut fiskal. Adapun nilai ETR yang rendah menggambarkan tingginya tingkat agresivitas pajak. Sebaliknya nilai ETR yang tinggi menggambarkan rendahnya tingkat agresivitas pajak.

Rumus untuk mencari ETR (*Effective Tax Rate*) yaitu dengan cara membandingkan antara beban pajak penghasilan dengan pendapatan sebelum pajak.

Operasionalisasi variabel diperlukan untuk menentukan variabel, sub variabel (dimensi), indikator, ukuran serta skala pengukuran yang akan digunakan dalam penelitian. Selain itu penjabaran mengenai variabel, sub variabel (dimensi), indikator, ukuran serta skala pengukuran dapat memudahkan untuk memahami mengenai variabel yang akan digunakan dalam penelitian. Sehingga penelitian dengan menggunakan alat bantu statistika dapat dilakukan dengan tepat. Adapun

penjabaran masing-masing variabel ke dalam indikator, ukuran dan skala data, dapat ditampilkan dalam bentuk tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel

Pengaruh Likuiditas, *Leverage* dan Komisaris Independen Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2016-2019)

Variabel Independen				
Variabel	Sub Variabel (Dimensi)	Indikator	Ukuran	Skala Pengukuran
Likuiditas (X ₁)	Rasio Lancar (<i>Current Ratio</i>)	- Aset - Liabilitas	$\frac{\text{Aset}}{\text{Liabilitas}}$	Rasio
<i>Leverage</i> (X ₂)	<i>Debt to Asset Ratio (Debt Ratio)</i>	- <i>Total Debt</i> - <i>Total Assets</i>	$\frac{\text{Total Debt}}{\text{Total Assets}}$	Rasio
Komisaris Independen (X ₃)	Komisaris Independen	- Total Komisaris Independen - Total Dewan Komisaris	$\frac{\text{Total Komisaris Independen}}{\text{Total Dewan Komisaris}}$	Rasio
Variabel Dependen				
Variabel	Sub Variabel (Dimensi)	Indikator	Ukuran	Skala Pengukuran
Agresivitas Pajak Perusahaan (Y)	ETR (<i>Effective Tax Rate</i>)	- Beban Pajak Penghasilan - Pendapatan Sebelum Pajak	$\frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Pendapatan Sebelum Pajak}}$	Rasio

Sumber: Data diolah oleh penulis, (2021)

3.5. Metode Penarikan Sampel

Menurut Sugiyono (2019: 126) populasi adalah keseluruhan *element* yang akan dijadikan wilayah generalisasi. Elemen populasi adalah keseluruhan subjek yang akan diukur, yang merupakan unit yang diteliti.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2016-2019. Jumlah populasi adalah sebanyak 32 perusahaan dan tidak semua populasi ini akan menjadi objek penelitian, sehingga perlu dilakukan pengambilan sampel lebih lanjut.

Berikut ini adalah tabel 3.2 yang menunjukkan populasi penelitian.

Tabel 3.2 Daftar Populasi Penelitian

No.	Kode Perusahaan	Nama Perusahaan
1.	ADES	Akasha Wira International Tbk
2.	AISA	Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk
3.	ALTO	Tri Banyan Tirta Tbk
4.	BTEK	Bumi Teknokultura Unggul Tbk
5.	BUDI	Budi Starch & Sweetener Tbk
6.	CAMP	Campina Ice Cream Tbk
7.	CEKA	Wilmar Cahaya Indonesia Tbk
8.	CLEO	Sariguna Primatirta Tbk
9.	COCO	Wahana Interfood Nusantara Tbk
10.	DLTA	Delta Djakarta Tbk
11.	DMND	Diamond Food Indonesia Tbk
12.	FOOD	Sentra Food Indonesia Tbk
13.	GOOD	Garudafood Putra Putri Jaya Tbk
14.	HOKI	Buyung Poetra Sembada Tbk
15.	ICBP	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
16.	IIKP	Inti Agri Resources Tbk
17.	IKAN	Era Mandiri Cemerlang Tbk
18.	INDF	Indofood Sukses Makmur Tbk
19.	KEJU	Mulia Boga Raya Tbk
20.	MGNA	Magna Investama Mandiri Tbk
21.	MLBI	Multi Bintang Indonesia Tbk
22.	MYOR	Mayora Indah Tbk
23.	PANI	Pratama Abadi Nusa Industri Tbk
24.	PCAR	Prima Cakrawala Abadi Tbk
25.	PSDN	Prasidha Aneka Niaga Tbk
26.	PSGO	Palma Serasih Tbk

27.	ROTI	Nippon Indosari Corpindo Tbk
28.	SKBM	Sekar Bumi Tbk
29.	SKLT	Sekar Laut Tbk
30.	STTP	Siantar Top Tbk
31.	TBLA	Tunas Baru Lampung Tbk
32.	ULTJ	Ultra Jaya Milk Industry & Trading Company Tbk

Sumber: Data diolah dari idx.co.id, (2021)

Menurut Sugiyono (2019: 127) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif (mewakili).

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *Non Probability Sampling* yaitu cara mengambil sampel dengan tidak memberikan kesempatan yang sama bagi populasi yang dipilih sebagian untuk dijadikan sebagai sampel. Dalam teknik *Non Probability Sampling*, metode penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode *Purposive Sampling*. Menurut Sugiyono (2019: 133) *Sampling Purposive* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.

Pemilihan menggunakan metode penarikan sampel *Purposive Sampling* karena tidak semua sampel memiliki kriteria sesuai dengan yang telah penulis tentukan. Oleh karena itu, sampel yang dipilih ditentukan oleh penulis untuk mendapatkan sampel yang sesuai dengan kriteria penulis. Adapun kriteria yang digunakan dalam teknik pengambilan sampel untuk menentukan sampel penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2016 hingga 2019.
2. Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman yang mengungkapkan laporan keuangan dan laporan tahunan lengkap secara berturut-turut selama periode pengamatan yaitu periode 2016 hingga 2019.
3. Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman yang tidak mengalami kerugian selama periode pengamatan yaitu periode 2016 hingga 2019.
4. Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman yang memiliki Komisaris Independen yang diungkapkan dalam laporan keuangan dan laporan tahunan selama periode pengamatan yaitu periode 2016 hingga 2019.

Keterangan:

- ✓ = Sesuai kriteria
 - = Tidak sesuai kriteria

Berikut ini adalah tabel 3.3 yang menunjukkan populasi yang akan dijadikan sampel sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan.

Tabel 3.3 Daftar Pemilihan Sampel Penelitian

No.	Kode	Nama Perusahaan	Kriteria				Total
			1	2	3	4	
1.	ADES	Akasha Wira International Tbk	✓	✓	-	✓	-
2.	AISA	Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk	✓	✓	-	✓	-
3.	ALTO	Tri Banyan Tirta Tbk	✓	✓	-	✓	-
4.	BTEK	Bumi Teknokultura Unggul Tbk	✓	✓	-	✓	-
5.	BUDI	Budi Starch & Sweetener Tbk	✓	✓	-	✓	-
6.	CAMP	Campina Ice Cream Tbk	✓	-	-	✓	-
7.	CEKA	Wilmar Cahaya Indonesia Tbk	✓	✓	-	✓	-
8.	CLEO	Sariguna Primatirta Tbk	✓	✓	✓	-	-
9.	COCO	Wahana Interfood Nusantara Tbk	✓	-	✓	✓	-
10.	DLTA	Delta Djakarta Tbk	✓	✓	-	✓	-
11.	DMND	Diamond Food Indonesia Tbk	✓	-	✓	✓	-
12.	FOOD	Sentra Food Indonesia Tbk	✓	-	-	✓	-
13.	GOOD	Garudafood Putra Putri Jaya Tbk	✓	-	-	✓	-
14.	HOKI	Buyung Poetra Sembada Tbk	✓	-	✓	✓	-
15.	ICBP	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	✓	✓	✓	✓	✓
16.	IIKP	Inti Agri Resources Tbk	✓	✓	-	✓	-
17.	IKAN	Era Mandiri Cemerlang Tbk	✓	-	✓	✓	-

18.	INDF	Indofood Sukses Makmur Tbk	✓	✓	✓	✓	✓
19.	KEJU	Mulia Boga Raya Tbk	✓	-	✓	-	-
20.	MGNA	Magna Investama Mandiri Tbk	✓	✓	-	✓	-
21.	MLBI	Multi Bintang Indonesia Tbk	✓	✓	✓	✓	✓
22.	MYOR	Mayora Indah Tbk	✓	✓	✓	✓	✓
23.	PANI	Pratama Abadi Nusa Industri Tbk	✓	-	✓	✓	-
24.	PCAR	Prima Cakrawala Abadi Tbk	✓	-	-	-	-
25.	PSDN	Prasidha Aneka Niaga Tbk	✓	✓	-	✓	-
26.	PSGO	Palma Serasih Tbk	✓	-	-	✓	-
27.	ROTI	Nippon Indosari Corpindo Tbk	✓	✓	-	✓	-
28.	SKBM	Sekar Bumi Tbk	✓	✓	-	✓	-
29.	SKLT	Sekar Laut Tbk	✓	✓	✓	✓	✓
30.	STTP	Siantar Top Tbk	✓	✓	-	✓	-
31.	TBLA	Tunas Baru Lampung Tbk	✓	✓	-	✓	-
32.	ULTJ	Ultra Jaya Milk Industry & Trading Company Tbk	✓	✓	✓	✓	✓
Total							6

Sumber: Data diolah dari idx.co.id yang telah diolah penulis, (2021)

Sampel penelitian yang memenuhi kriteria pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2016-2019, maka dapat dilihat melalui tabel 3.4 sebagai berikut:

Tabel 3.4 Daftar Sampel Penelitian

No.	Kode Perusahaan	Nama Perusahaan
1.	ICBP	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
2.	INDF	Indofood Sukses Makmur Tbk
3.	MLBI	Multi Bintang Indonesia Tbk

4.	MYOR	Mayora Indah Tbk
5.	SKLT	Sekar Laut Tbk
6.	ULTJ	Ultra Jaya Milk Industry & Trading Company Tbk

Sumber: Data diolah oleh penulis, (2021)

3.6. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan prosedur sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Dalam penelitian ini metode pengumpulan data ditentukan berdasarkan sumber data sekunder. Metode pengumpulan data sekunder dilakukan dengan studi pustaka, yaitu melakukan pengumpulan data pendukung dari buku, maupun dari penelitian pihak terdahulu. Selain itu metode pengumpulan data sekunder berupa laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan sub sektor makanan dan minuman pada periode 2016-2019 yaitu dengan cara mengunduh data dari *website* penyedia data seperti situs BEI www.idx.co.id, situs www.idnfinancials.com serta situs perusahaan yang akan diteliti. Data juga didapatkan dari www.sahamok.net sebagai bahan penunjang penelitian. Data tersebut dimaksud agar dapat mendukung informasi menjadi lebih akurat dan lengkap.

3.7. Metode Pengolahan atau Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan statistik yaitu statistik deskriptif. Uji asumsi klasik yaitu uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi, uji regresi linear berganda serta uji hipotesis (uji statistik t atau parsial, uji statistik F atau simultan dan koefisien determinasi). Metode pengolahannya adalah menggunakan program SPSS 25 yang dioperasikan melalui komputer.

3.7.1. Statistik Deskriptif

Menurut Ghazali (2018: 19) statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, *range*, kurtosis dan *skewness* (kemencengan distribusi).

Dalam penelitian ini analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran atas variabel-variabel yang digunakan, yaitu Likuiditas yang diproksikan dengan Rasio Lancar (*Current Ratio*), *Leverage* yang diproksikan dengan *Debt to Asset Ratio (Debt Ratio)*, Komisaris Independen dan Agresivitas Pajak Perusahaan yang diproksikan dengan ETR (*Effective Tax Rate*).

3.7.2. Uji Asumsi Klasik

3.7.2.1. Uji Normalitas

Menurut Ghazali (2018: 161) uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal.

Dalam penelitian ini uji statistik yang digunakan untuk uji normalitas adalah menggunakan uji statistik non-parametrik *Kolmogorov-Smirnov (One-Sample K-S)*. *One-Sample Kolmogorov-Smirnov test* memiliki dasar pengambilan keputusan yaitu sebagai berikut:

1. Suatu data dikatakan normal, apabila nilai Asymp. Sig (2-tailed) $> 0,05$.
2. Suatu data dikatakan tidak normal, apabila nilai Asymp. Sig (2-tailed) $< 0,05$.

3.7.2.2. Uji Multikolonieritas

Menurut Ghozali (2018: 107) uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Uji multikolonieritas dapat dilihat dari nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor*.

1. Nilai *cut off* yang menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai *Tolerance* ≤ 0.10 atau sama dengan nilai $VIF \geq 10$.
2. Nilai *cut off* yang menunjukkan tidak terjadi multikolonieritas atau bebas multikolonieritas adalah nilai *Tolerance* ≥ 0.10 atau sama dengan nilai $VIF \leq 10$.

3.7.2.3. Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2018: 137) uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik yaitu model regresi yang tidak terjadi heteroskedastisitas, atau disebut juga model yang homoskedastisitas. Untuk melakukan uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan uji Spearman's rho. Pengambilan keputusan uji Spearman's rho menunjukkan bahwa:

1. Jika Sig. (2-tailed) lebih besar $>$ dari $0,05$ maka tidak ada heteroskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.
2. Jika Sig. (2-tailed) lebih kecil $<$ dari $0,05$ maka ada heteroskedastisitas atau terjadi heteroskedastisitas.

3.7.2.4. Uji Autokorelasi

Menurut Ghozali (2018: 111) uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada *problem* autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Model regresi yang baik adalah

regresi yang bebas dari autokorelasi. Salah satu ukuran dalam menentukan ada tidaknya masalah autokorelasi pada penelitian ini adalah dengan menggunakan uji Durbin - Watson (DW test). Uji Durbin - Watson (DW test) hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat satu (*first order autocorrelation*) dan mensyaratkan adanya *intercept* (konstanta) dalam model regresi dan tidak ada variabel lag di antara variabel independen. Adapun ketentuan pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi dapat dilihat melalui tabel 3.5 sebagai berikut:

Tabel 3.5 Pengambilan Keputusan Uji Durbin - Watson (DW test)

Hipotesis nol	Keputusan	Jika
Tidak ada autokorelasi positif	Tolak	$0 < d < dl$
Tidak ada autokorelasi positif	<i>No decision</i>	$dl \leq d \leq du$
Tidak ada korelasi negatif	Tolak	$4 - dl < d < 4$
Tidak ada korelasi negatif	<i>No decision</i>	$4 - du \leq d \leq 4 - dl$
Tidak ada autokorelasi positif atau negatif	Tidak ditolak	$du < d < 4 - du$

Sumber: Ghozali (2018: 112)

Setelah dilakukan Uji Durbin - Watson (DW test), maka selanjutnya dalam penelitian ini untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi yaitu dengan melakukan uji *Run test*. Menurut Ghozali (2018: 121) *run test* sebagai bagian dari statistik non-parametrik dapat pula digunakan untuk menguji apakah antar residual terdapat korelasi yang tinggi. Jika antar residual tidak terdapat hubungan korelasi maka dikatakan bahwa residual adalah acak atau random. Adapun ketentuan pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi adalah sebagai berikut:

1. Jika nilai Asymp. Sig (2-tailed) lebih kecil < dari 0,05 maka terdapat gejala autokorelasi.
2. Jika nilai Asymp. Sig (2-tailed) lebih besar > dari 0,05 maka tidak terdapat gejala autokorelasi.

3.7.3. Analisis Regresi Linear Berganda

Menurut Gujarati (2003) dalam Ghozali (2018: 95) analisis regresi pada dasarnya adalah studi mengenai ketergantungan variabel dependen (terikat) dengan satu atau lebih variabel independen (variabel penjelas/bebas).

Penelitian ini menggunakan analisis linear berganda karena jumlah variabel independen terdiri lebih dari satu. Penelitian ini akan menggunakan analisis regresi linear berganda untuk menguji pengaruh antara variabel dependen yaitu Agresivitas Pajak Perusahaan yang diproksikan dengan ETR (*Effective Tax Rate*) dengan ketiga variabel independen yaitu Likuiditas yang diproksikan dengan Rasio Lancar (*Current Ratio*), *Leverage* yang diproksikan dengan *Debt to Asset Ratio (Debt Ratio)* dan Komisaris Independen. Tujuan analisis regresi linear berganda yaitu menggunakan nilai-nilai variabel independen yang diketahui, untuk meramalkan atau memprediksi nilai variabel dependen.

Maka, persamaan regresi linear bergandanya adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

Y	: Agresivitas Pajak Perusahaan
α	: Konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3$: Koefisien regresi
X_1	: Likuiditas
X_2	: <i>Leverage</i>
X_3	: Komisaris Independen
e	: <i>Error term (regression error)</i>

3.7.4. Uji Hipotesis

Penelitian ini menguji seberapa besarnya pengaruh variabel independen berupa Likuiditas yang diproksikan dengan Rasio Lancar (*Current Ratio*), *Leverage* yang diproksikan dengan *Debt to Asset Ratio (Debt Ratio)* dan Komisaris Independen terhadap variabel dependennya yaitu Agresivitas Pajak Perusahaan yang diproksikan dengan ETR (*Effective Tax Rate*). Pengujian ini dilakukan menggunakan uji statistik t untuk melihat pengaruh secara parsial dan menggunakan uji statistik F untuk melihat pengaruh secara simultan. Serta koefisien determinasi untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen.

3.7.4.1. Uji Statistik t atau Parsial

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Pengujian secara parsial (uji statistik t) dan dalam pengujian hipotesis ini peneliti menetapkan dengan menggunakan uji signifikan, dengan penetapan hipotesis (H_0) dan hipotesis alternatif (H_a). Uji statistik t menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Pada akhirnya akan

diambil suatu kesimpulan H_0 ditolak atau H_a diterima dari hipotesis yang telah dirumuskan.

Kriteria untuk penerimaan atau penolakan hipotesis nol (H_0) yang digunakan dengan tingkat kesalahan 0,05 atau 5% adalah sebagai berikut:

- H_0 diterima apabila : $\text{sig} > 0,05$
- H_0 ditolak apabila : $\text{sig} < 0,05$

Bila H_0 diterima, maka hal ini diartikan bahwa pengaruh variabel independen secara parsial tidak terdapat pengaruh terhadap variabel dependen dinilai tidak signifikan. Sedangkan penolakan H_0 menunjukkan terdapat pengaruh dari variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Untuk pengujian parsial digunakan rumus hipotesis sebagai berikut:

H_{01} : ($\beta_1 \neq 0$) : Likuiditas berpengaruh signifikan terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan.

H_{a1} : ($\beta_1 = 0$) : Likuiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan.

H_{02} : ($\beta_2 \neq 0$) : *Leverage* berpengaruh signifikan terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan.

H_{a2} : ($\beta_2 = 0$) : *Leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan.

H_{03} : ($\beta_3 \neq 0$) : Komisaris Independen berpengaruh signifikan terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan.

H_{a3} : ($\beta_3 = 0$) : Komisaris Independen tidak berpengaruh signifikan terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan.

3.7.4.2. Uji Statistik F atau Simultan

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat.

Kriteria untuk penerimaan atau penolakan hipotesis nol (H_0) yang digunakan dengan tingkat kesalahan 0,05 atau 5% adalah sebagai berikut:

- H_0 diterima apabila : $\text{sig} > 0,05$
- H_0 ditolak apabila : $\text{sig} < 0,05$
- Jika $F_{\text{hitung}} < F_{\text{tabel}}$ maka H_0 diterima.
- Jika $F_{\text{hitung}} > F_{\text{tabel}}$ maka H_0 ditolak.

Untuk pengujian simultan digunakan rumus hipotesis sebagai berikut:

$H_{04} : (\beta_1 = \beta_2 = \beta_3 \neq 0)$: Likuiditas, *Leverage* dan Komisaris Independen berpengaruh secara simultan atau bersama-sama terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan.

$H_{a4} : (\beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0)$: Likuiditas, *Leverage* dan Komisaris Independen tidak berpengaruh secara simultan atau bersama-sama terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan.

3.7.4.3. Koefisien Determinasi

Menurut Ghozali (2018: 97) “Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.”

Semakin besar nilai R^2 suatu regresi atau nilainya mendekati 1, maka hasil regresi tersebut semakin baik. Hal ini berarti variabel-variabel independen memberikan hampir seluruh informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen penelitian. Sebaliknya jika semakin kecil nilai R^2 suatu regresi atau nilainya menjauh dari 1, maka hasil regresi tersebut kurang baik.

Kriteria dalam melakukan analisis koefisien determinasi adalah sebagai berikut:

1. Jika nilai R^2 (Koefisien determinasi) mendekati 0, maka pengaruh variabel independen yaitu Likuiditas, *Leverage* dan Komisaris Independen terhadap variabel dependen yaitu Agresivitas Pajak Perusahaan dikatakan lemah.
2. Jika nilai R^2 (Koefisien determinasi) mendekati 1, maka pengaruh variabel independen yaitu Likuiditas, *Leverage* dan Komisaris Independen terhadap variabel dependen yaitu Agresivitas Pajak Perusahaan dikatakan kuat.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1. Hasil Pengumpulan Data

Data yang diperlukan untuk mendukung penelitian ini merupakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung, tetapi diperoleh dari penyedia data, objek dalam penelitian ini adalah likuiditas, *leverage* dan komisar independen terhadap agresivitas pajak perusahaan. Penulis memperoleh data dan informasi yang diperlukan melalui Bursa Efek Indonesia (BEI) yang dapat diakses melalui website resmi yaitu www.idx.co.id, situs www.idnfinancials.com, data juga didapatkan dari www.sahamok.net sebagai bahan penunjang penelitian. Serta situs perusahaan. Data yang dikumpulkan berupa laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2016-2019. Data diolah menggunakan alat bantu statistika yaitu SPSS (*Statistical Product and Service Solution*) Versi 25 untuk memudahkan pengolahan data sehingga dapat menjelaskan variabel-variabel yang diteliti.

Pada tahun 2020 terdapat 32 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) secara berturut-turut selama periode pengamatan. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, maka sampel perusahaan yang berhasil diperoleh melalui metode *purposive sampling* adalah 6 perusahaan dengan periode pengamatan selama 4 tahun sehingga terdapat 24 sampel yang digunakan. Nama-nama perusahaan tersebut dapat dilihat melalui tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1 Daftar Perusahaan yang Dijadikan Sampel Penelitian

No.	Kode Perusahaan	Nama Perusahaan
1.	ICBP	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
2.	INDF	Indofood Sukses Makmur Tbk
3.	MLBI	Multi Bintang Indonesia Tbk
4.	MYOR	Mayora Indah Tbk
5.	SKLT	Sekar Laut Tbk
6.	ULTJ	Ultra Jaya Milk Industry & Trading Company Tbk

Sumber: Data diolah oleh penulis, (2021)

4.2. Kondisi/Fakta Variabel yang Diteliti

4.2.1. Data Likuiditas (Rasio Lancar/*Current Ratio*) pada Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2019

Rasio likuiditas berhubungan dengan ketidakmampuan perusahaan dalam membayar seluruh atau sebagian utang (kewajibannya) yang sudah jatuh tempo pada saat ditagih. Likuiditas adalah kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek yang dimiliki secara tepat waktu atau yang sudah jatuh tempo dengan melihat aktiva lancar perusahaan terhadap utang lancarnya. Likuiditas sebagai salah satu pengukur kinerja manajemen dalam mengelola keuangan perusahaan.

Menurut Kasmir (2019: 130) Rasio likuiditas atau sering juga disebut dengan nama rasio modal kerja merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa likuidnya suatu perusahaan. Caranya adalah dengan membandingkan komponen yang ada di neraca, yaitu total aktiva lancar dengan total passiva lancar (utang jangka pendek). Penilaian dapat dilakukan untuk beberapa periode sehingga terlihat perkembangan likuiditas perusahaan dari waktu ke waktu. Terdapat dua hasil penilaian terhadap pengukuran rasio likuiditas, yaitu apabila perusahaan mampu memenuhi kewajibannya, dikatakan perusahaan tersebut dalam keadaan likuid. Sebaliknya, apabila perusahaan tidak mampu memenuhi kewajiban tersebut, dikatakan perusahaan dalam keadaan illikuid.

Sedangkan menurut Sugiono dan Untung (2016: 54) Kreditur jangka pendek lebih menekankan untuk menilai kemampuan perusahaan untuk membayar hutang-hutang yang segera harus dilunasi. Dalam jangka pendek jumlah aktiva lancar yang dimiliki akan menentukan kemampuan perusahaan dalam melunasi hutang jangka pendeknya, atau dengan kata lain dengan cara melihat tingkat likuiditasnya (*liquidity*).

Berikut ini hasil perhitungan likuiditas pada 6 Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Periode 2016-2019:

Tabel 4.2 Rasio Lancar (*Current Ratio*) pada Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Periode 2016-2019

Kode Emiten	Rasio Lancar (<i>Current Ratio</i>)				MEAN
	2016	2017	2018	2019	
ICBP	2,41	2,43	1,95	2,54	2,33
INDF	1,51	1,50	1,07	1,27	1,34
MLBI	0,68	0,83	0,78	0,73	0,76
MYOR	2,25	2,39	2,65	3,43	2,68
SKLT	1,32	1,26	1,22	1,29	1,27

ULTJ	4,84	4,19	4,40	4,44	4,47
MEAN	2,17	2,10	2,01	2,28	
MIN	0,68	0,83	0,78	0,73	
MAX	4,84	4,19	4,40	4,44	

Sumber: Data diolah dari idx.co.id yang telah diolah penulis, (2021)

Berdasarkan Tabel 4.2 pada tahun 2016 menunjukkan rata-rata rasio lancar (*current ratio*) pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman sebesar 2,17. PT Multi Bintang Indonesia Tbk (MLBI) memiliki tingkat likuiditas yang terendah yaitu sebesar 0,68. Sedangkan perusahaan yang memiliki tingkat likuiditas tertinggi dihasilkan oleh PT Ultra Jaya Milk Industry & Trading Company Tbk (ULTJ) yaitu sebesar 4,84.

Pada tahun 2017 rata-rata rasio lancar (*current ratio*) sebesar 2,10 mengalami penurunan sebesar 0,07% jika dibandingkan dengan tahun 2016. PT Multi Bintang Indonesia Tbk (MLBI) memiliki tingkat likuiditas yang terendah yaitu sebesar 0,83. Sedangkan perusahaan yang memiliki tingkat likuiditas tertinggi dihasilkan oleh PT Ultra Jaya Milk Industry & Trading Company Tbk (ULTJ) yaitu sebesar 4,19.

Pada tahun 2018 rata-rata rasio lancar (*current ratio*) sebesar 2,01 mengalami penurunan sebesar 0,09% jika dibandingkan dengan tahun 2017. Rasio lancar (*current ratio*) terendah sebesar 0,78 pada PT Multi Bintang Indonesia Tbk (MLBI). Dan rasio lancar (*current ratio*) tertinggi sebesar 4,40 dihasilkan oleh PT Ultra Jaya Milk Industry & Trading Company Tbk (ULTJ).

Pada tahun 2019 rata-rata rasio lancar (*current ratio*) sebesar 2,28 terjadi peningkatan sebesar 0,27% jika dibandingkan dengan tahun 2018. PT Multi Bintang Indonesia Tbk (MLBI) memiliki tingkat likuiditas yang terendah yaitu sebesar 0,73. Dan perusahaan yang memiliki tingkat likuiditas tertinggi dihasilkan oleh PT Ultra Jaya Milk Industry & Trading Company Tbk (ULTJ) yaitu sebesar 4,44.

Menurut Hanafi dan Halim (2016: 75) Rasio yang rendah menunjukkan risiko likuiditas yang tinggi, sedangkan rasio lancar yang tinggi menunjukkan adanya kelebihan aktiva lancar, yang akan mempunyai pengaruh yang tidak baik terhadap profitabilitas perusahaan. Aktiva lancar secara umum menghasilkan *return* yang lebih rendah dibandingkan dengan aktiva tetap.

Menurut Kasmir (2019: 135) Apabila rasio lancar rendah, dapat dikatakan bahwa perusahaan kurang modal untuk membayar utang. Namun, apabila hasil pengukuran rasio tinggi, belum tentu kondisi perusahaan sedang baik. Hal ini dapat saja terjadi karena kas tidak digunakan sebaik mungkin.

4.2.2. Data Leverage (Debt to Asset Ratio/Debt Ratio) pada Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2019

Rasio *leverage* atau rasio solvabilitas berhubungan dengan sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. *Leverage* adalah rasio yang digunakan untuk

mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajibannya (utang) baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan tersebut dilikuidasi.

Menurut Savitri dan Rahmawati (2017: 24) “*Leverage* adalah salah satu rasio keuangan yang menggambarkan hubungan antara hutang perusahaan terhadap modal maupun aset perusahaan.” Menurut Kasmir (2019: 153) “Rasio solvabilitas atau *leverage ratio* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Artinya berapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivanya. Dalam arti luas dikatakan bahwa rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan dibubarkan (dilikuidasi).” Sedangkan menurut Muliasari dan Hidayat (2020: 30) “*Leverage* merupakan suatu ukuran seberapa besar asset yang dimiliki perusahaan dibiayai oleh utang. *Leverage* merupakan jumlah utang yang dimiliki perusahaan untuk pembiayaan dan dapat mengukur besarnya aktiva yang dibiayai utang.”

Berikut ini hasil perhitungan *leverage* pada 6 Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Periode 2016-2019:

Tabel 4.3 *Debt to Asset Ratio (Debt Ratio)* pada Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Periode 2016-2019

Kode Emiten	<i>Debt to Asset Ratio (Debt Ratio)</i>				MEAN
	2016	2017	2018	2019	
ICBP	0,36	0,36	0,34	0,31	0,34
INDF	0,47	0,47	0,48	0,44	0,47
MLBI	0,64	0,58	0,60	0,60	0,61
MYOR	0,52	0,51	0,51	0,48	0,51
SKLT	0,48	0,52	0,55	0,52	0,52
ULTJ	0,18	0,19	0,14	0,14	0,16
MEAN	0,44	0,44	0,44	0,42	
MIN	0,18	0,19	0,14	0,14	
MAX	0,64	0,58	0,60	0,60	

Sumber: Data diolah dari idx.co.id yang telah diolah penulis, (2021)

Berdasarkan Tabel 4.3 pada tahun 2016 menunjukkan rata-rata *debt to asset ratio (debt ratio)* pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman sebesar 0,44. PT Ultra Jaya Milk Industry & Trading Company Tbk (ULTJ) memiliki tingkat *debt to asset ratio (debt ratio)* yang terendah yaitu sebesar 0,18. Sedangkan perusahaan yang memiliki tingkat *debt to asset ratio (debt ratio)* tertinggi dihasilkan oleh PT Multi Bintang Indonesia Tbk (MLBI) yaitu sebesar 0,64.

Pada tahun 2017 rata-rata *debt to asset ratio (debt ratio)* sebesar 0,44 atau sama dengan tahun 2016 yaitu sebesar 0,44. PT Ultra Jaya Milk Industry & Trading Company Tbk (ULTJ) memiliki tingkat *debt to asset ratio (debt ratio)* yang terendah

yaitu sebesar 0,19. Sedangkan perusahaan yang memiliki tingkat *debt to asset ratio* (*debt ratio*) tertinggi dihasilkan oleh PT Multi Bintang Indonesia Tbk (MLBI) yaitu sebesar 0,58.

Pada tahun 2018 rata-rata *debt to asset ratio* (*debt ratio*) sebesar 0,44 atau sama dengan tahun 2017 yaitu sebesar 0,44. *Debt to asset ratio* (*debt ratio*) terendah sebesar 0,14 pada PT Ultra Jaya Milk Industry & Trading Company Tbk (ULTJ). *Debt to asset ratio* (*debt ratio*) tertinggi sebesar 0,60 dihasilkan oleh PT Multi Bintang Indonesia Tbk (MLBI).

Pada tahun 2019 rata-rata *debt to asset ratio* (*debt ratio*) sebesar 0,42 mengalami penurunan sebesar 0,02% jika dibandingkan dengan tahun 2018. PT Ultra Jaya Milk Industry & Trading Company Tbk (ULTJ) memiliki tingkat *debt to asset ratio* (*debt ratio*) yang terendah yaitu sebesar 0,14. Perusahaan yang memiliki tingkat *debt to asset ratio* (*debt ratio*) tertinggi dihasilkan oleh PT Multi Bintang Indonesia Tbk (MLBI) yaitu sebesar 0,60.

Menurut Sugiono dan Untung (2016: 60) Para kreditur menginginkan *debt ratio* yang rendah karena semakin tinggi rasio ini maka semakin besar risiko para kreditur. Semakin besar rasio ini berarti semakin besar pembelian asset menggunakan utang yang menunjukkan semakin tingginya resiko kreditur (orang/perusahaan yang memberikan pinjaman).

Menurut Kasmir (2019: 158) Apabila rasionya tinggi, artinya pendanaan dengan utang semakin banyak, maka semakin sulit bagi perusahaan untuk memperoleh tambahan pinjaman karena dikhawatirkan perusahaan tidak mampu menutupi utang-utangnya dengan aktiva yang dimilikinya. Demikian pula apabila rasionya rendah, semakin kecil perusahaan dibiayai dengan utang. Standar pengukuran untuk menilai baik tidaknya rasio perusahaan, digunakan rasio rata-rata industri yang sejenis.

Menurut Fahmi (2020: 131-132) Penggunaan utang yang terlalu tinggi akan membahayakan perusahaan karena perusahaan akan masuk dalam kategori *extreme leverage* (utang ekstrem) yaitu perusahaan terjebak dalam tingkat utang yang tinggi dan sulit untuk melepaskan beban utang tersebut. Karena itu sebaiknya perusahaan harus menyeimbangkan berapa utang yang layak diambil dan dari mana sumber-sumber yang dapat dipakai untuk membayar utang.

4.2.3. Data Komisaris Independen pada Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2019

Komisaris independen adalah anggota komisaris yang berasal dari luar perusahaan dan bukan merupakan pegawai perusahaan tersebut tetapi berurusan langsung dengan organisasi dalam perusahaan, tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada perusahaan, tidak memiliki hubungan afiliasi dengan emiten atau perusahaan, komisaris lainnya, direktur, pemegang saham utama atau pengendali maupun perusahaan publik, tidak memiliki hubungan usaha baik

langsung maupun tidak langsung serta bebas dari hubungan bisnis lainnya yang berkaitan dengan usaha emiten atau perusahaan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Menurut Alijoyo dan Zaini (2004: 54) Komisaris independen adalah anggota komisaris yang berasal dari luar perusahaan (tidak memiliki hubungan afiliasi dengan perusahaan) yang dipilih secara transparan dan independen, memiliki integritas dan kompetensi yang memadai, bebas dari pengaruh yang berhubungan dengan kepentingan pribadi atau pihak lain, serta dapat bertindak secara objektif dan independen dengan berpedoman pada prinsip-prinsip *good corporate governance* (*transparency, accountability, responsibility, fairness*).

Berikut ini hasil perhitungan komisaris independen pada 6 Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Periode 2016-2019:

Tabel 4.4 Komisaris Independen pada Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Periode 2016-2019

Kode Emiten	Komisaris Independen				MEAN
	2016	2017	2018	2019	
ICBP	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
INDF	0,375	0,375	0,375	0,375	0,375
MLBI	0,571429	0,5	0,5	0,571429	0,535715
MYOR	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
SKLT	0,333333	0,333333	0,333333	0,333333	0,333333
ULTJ	0,333333	0,333333	0,333333	0,5	0,375
MEAN	0,418849	0,406944	0,406944	0,446627	
MIN	0,333333	0,333333	0,333333	0,333333	
MAX	0,571429	0,5	0,5	0,571429	

Sumber: Data diolah dari idx.co.id yang telah diolah penulis, (2021)

Berdasarkan Tabel 4.4 pada tahun 2016 menunjukkan rata-rata komisaris independen pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman sebesar 0,418849. PT Sekar Laut Tbk (SKLT) dan PT Ultra Jaya Milk Industry & Trading Company Tbk (ULTJ) memiliki tingkat komisaris independen yang terendah yaitu sebesar 0,333333. Sedangkan perusahaan yang memiliki tingkat komisaris independen tertinggi dihasilkan oleh PT Multi Bintang Indonesia Tbk (MLBI) yaitu sebesar 0,571429.

Pada tahun 2017 rata-rata komisaris independen sebesar 0,406944 mengalami penurunan sebesar 0,011% jika dibandingkan dengan tahun 2016. PT Sekar Laut Tbk (SKLT) dan PT Ultra Jaya Milk Industry & Trading Company Tbk (ULTJ) memiliki tingkat komisaris independen yang terendah yaitu sebesar 0,333333. Sedangkan perusahaan yang memiliki tingkat komisaris independen tertinggi dihasilkan oleh PT

Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP) dan PT Multi Bintang Indonesia Tbk (MLBI) yaitu sebesar 0,5.

Pada tahun 2018 rata-rata komisaris independen sebesar 0,406944 atau sama dengan tahun 2017 yaitu sebesar 0,406944. Komisaris independen terendah sebesar 0,333333 pada PT Sekar Laut Tbk (SKLT) dan PT Ultra Jaya Milk Industry & Trading Company Tbk. Komisaris independen tertinggi sebesar 0,5 dihasilkan oleh PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP) dan PT Multi Bintang Indonesia Tbk (MLBI).

Pada tahun 2019 rata-rata komisaris independen sebesar 0,446627 terjadi peningkatan sebesar 0,039% jika dibandingkan dengan tahun 2018. PT Sekar Laut Tbk (SKLT) memiliki tingkat komisaris independen yang terendah yaitu sebesar 0,333333. Perusahaan yang memiliki tingkat komisaris independen tertinggi dihasilkan oleh PT Multi Bintang Indonesia Tbk (MLBI) yaitu sebesar 0,571429.

Menurut Kartikasari dkk (2017: 3) Proporsi komisaris independen yang besar dalam struktur dewan komisaris akan memberi pengawasan yang ketat sehingga mampu meminimalkan kesempatan melakukan kecurangan dari manajemen perusahaan.

4.2.4. Data Agresivitas Pajak Perusahaan (ETR/*Effective Tax Rate*) pada Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2019

Agresivitas pajak merupakan tindakan yang umum terjadi di kalangan perusahaan-perusahaan besar di seluruh dunia. Hal ini dikarenakan perusahaan menganggap pajak merupakan beban yang dapat mengurangi pendapatan atau laba perusahaan, adapun perusahaan sebagai wajib pajak badan menginginkan laba secara maksimal, sehingga perusahaan akan melakukan tindakan agresivitas pajak yang bertujuan untuk meminimalkan beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan. Agresivitas pajak merupakan kegiatan atau aktivitas perencanaan lebih spesifik yang bertujuan untuk menurunkan beban pajak dengan cara yang tergolong legal dalam arti menggunakan ketentuan yang diperbolehkan atau dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan ketentuan perpajakan (*loophole*) suatu negara, karena ahli pajak menyatakan tidak melanggar peraturan perpajakan atau dengan memanfaatkan *grey area* yang tidak dijelaskan secara khusus dalam undang-undang. Apabila perusahaan melakukan tindakan menurunkan beban pajak dengan cara yang tergolong ilegal (melakukan dengan cara melanggar ketentuan perpajakan) berarti perusahaan melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*).

Berikut ini hasil perhitungan agresivitas pajak Perusahaan pada 6 Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Periode 2016-2019:

Tabel 4.5 ETR (*Effective Tax Rate*) pada Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Periode 2016-2019

Kode Emiten	ETR (<i>Effective Tax Rate</i>)				MEAN
	2016	2017	2018	2019	
ICBP	0,27	0,32	0,28	0,28	0,29
INDF	0,34	0,33	0,33	0,33	0,33
MLBI	0,26	0,26	0,27	0,26	0,26
MYOR	0,25	0,25	0,26	0,25	0,25
SKLT	0,18	0,16	0,19	0,21	0,19
ULTJ	0,24	0,31	0,26	0,25	0,27
MEAN	0,26	0,27	0,27	0,26	
MIN	0,18	0,16	0,19	0,21	
MAX	0,34	0,33	0,33	0,33	

Sumber: Data diolah dari idx.co.id yang telah diolah penulis, (2021)

Berdasarkan Tabel 4.5 pada tahun 2016 menunjukkan rata-rata ETR (*Effective Tax Rate*) pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman sebesar 0,26. PT Sekar Laut Tbk (SKLT) memiliki tingkat ETR (*Effective Tax Rate*) yang terendah yaitu sebesar 0,18. Sedangkan perusahaan yang memiliki tingkat ETR (*Effective Tax Rate*) tertinggi dihasilkan oleh PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) yaitu sebesar 0,34.

Pada tahun 2017 rata-rata ETR (*Effective Tax Rate*) sebesar 0,27 terjadi peningkatan sebesar 0,01% jika dibandingkan dengan tahun 2016. PT Sekar Laut Tbk (SKLT) memiliki tingkat ETR (*Effective Tax Rate*) yang terendah yaitu sebesar 0,16. Sedangkan perusahaan yang memiliki tingkat ETR (*Effective Tax Rate*) tertinggi dihasilkan oleh PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) yaitu sebesar 0,33.

Pada tahun 2018 rata-rata ETR (*Effective Tax Rate*) sebesar 0,27 atau sama dengan tahun 2017 yaitu sebesar 0,27. ETR (*Effective Tax Rate*) terendah sebesar 0,19 pada PT Sekar Laut Tbk (SKLT). Sedangkan ETR (*Effective Tax Rate*) tertinggi sebesar 0,33 dihasilkan oleh PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF).

Pada tahun 2019 rata-rata ETR (*Effective Tax Rate*) sebesar 0,26 mengalami penurunan sebesar 0,01% jika dibandingkan dengan tahun 2018. PT Sekar Laut Tbk (SKLT) memiliki tingkat ETR (*Effective Tax Rate*) yang terendah yaitu sebesar 0,21. Perusahaan yang memiliki tingkat ETR (*Effective Tax Rate*) tertinggi dihasilkan oleh PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) yaitu sebesar 0,33.

Menurut Suprimarini dan Suprasto (2017: 1361) Rendahnya nilai ETR menggambarkan tingginya tingkat agresivitas pajak. Sebaliknya tingginya nilai ETR menggambarkan rendahnya tingkat agresivitas pajak.

4.3. Analisis Data

Dalam menguji “Pengaruh Likuiditas, *Leverage* dan Komisaris Independen terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2016-2019)” dilakukan dengan pengujian statistik. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda dengan alat bantu statistika yaitu SPSS (*Statistical Product and Service Solution*) Versi 25. Beberapa pengujian yang dilakukan yaitu uji asumsi klasik (uji normalitas, uji multikolonieritas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi), uji regresi linear berganda serta uji hipotesis (uji statistik t atau parsial, uji statistik F atau simultan dan koefisien determinasi). Adapun variabel yang diteliti yaitu likuiditas (rasio lancar/*current ratio*) dengan indikator membandingkan antara total aktiva lancar (*current assets*) dengan total utang lancar (*current liabilities*) (X_1), *leverage* (*debt to asset ratio/debt ratio*) dengan indikator membandingkan antara total *debt* dengan total *assets* (X_2) dan komisaris independen dengan indikator membandingkan antara total komisaris independen dengan total dewan komisaris (X_3) dan agresivitas pajak perusahaan (*ETR/Effective Tax Rate*) dengan indikator membandingkan antara beban pajak penghasilan dengan pendapatan sebelum pajak (Y).

4.3.1. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk menyajikan gambaran atau deskripsi suatu data atas variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian. Gambaran yang dimaksud meliputi nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata (*mean*) dan standar deviasi. Berikut ini disajikan mengenai hasil analisis statistik deskriptif dengan menggunakan SPSS versi 25 dalam penelitian ini:

Tabel 4.6 Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Y	24	0,16	0,34	0,2642	0,04772
X1	24	0,68	4,84	2,1408	1,27946
X2	24	0,14	0,64	0,4329	0,14848
X3	24	0,33	0,57	0,4198	0,08154
Valid N (listwise)	24				

Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan SPSS 25, Tahun 2021

Berdasarkan data keseluruhan dengan $N = 24$. Likuiditas yang dihitung dengan rasio lancar (*current ratio*) memiliki nilai terendah sebesar 0,68 dan nilai tertinggi sebesar 4,84. Sedangkan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 2,1408. Nilai standar deviasi sebesar 1,27946. Nilai standar deviasi yang lebih kecil dari nilai rata-rata menunjukkan bahwa data likuiditas memiliki keragaman data yang kecil. Likuiditas dengan nilai terendah sebesar 0,68 terdapat pada PT Multi Bintang Indonesia Tbk

(MLBI) tahun 2016 dan nilai tertinggi sebesar 4,84 terdapat pada PT Ultra Jaya Milk Industry & Trading Company Tbk (ULTJ) tahun 2016.

Leverage yang dihitung dengan *debt to asset ratio* (*debt ratio*) memiliki nilai terendah sebesar 0,14 dan nilai tertinggi sebesar 0,64. Sedangkan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,4329. Nilai standar deviasi sebesar 0,14848. Nilai standar deviasi yang lebih kecil dari nilai rata-rata menunjukkan bahwa data *leverage* memiliki keragaman data yang kecil. *Leverage* dengan nilai terendah sebesar 0,14 terdapat pada PT Ultra Jaya Milk Industry & Trading Company Tbk (ULTJ) tahun 2018 dan tahun 2019. Nilai tertinggi sebesar 0,64 terdapat pada PT Multi Bintang Indonesia Tbk (MLBI) tahun 2016.

Komisaris independen yang dihitung dengan membandingkan antara total komisaris independen dengan total dewan komisaris memiliki nilai terendah sebesar 0,33 dan nilai tertinggi sebesar 0,57. Sedangkan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,4198. Nilai standar deviasi sebesar 0,08154. Nilai standar deviasi yang lebih kecil dari nilai rata-rata menunjukkan bahwa data komisaris independen memiliki keragaman data yang kecil. Komisaris independen dengan nilai terendah sebesar 0,33 terdapat pada PT Sekar Laut Tbk (SKLT) tahun 2016, tahun 2017, tahun 2018, tahun 2019 dan PT Ultra Jaya Milk Industry & Trading Company Tbk (ULTJ) tahun 2016, tahun 2017, tahun 2018. Nilai tertinggi sebesar 0,57 terdapat pada PT Multi Bintang Indonesia Tbk (MLBI) tahun 2016 dan tahun 2019.

Agresivitas pajak perusahaan yang dihitung dengan ETR (*Effective Tax Rate*) memiliki nilai terendah sebesar 0,16 dan nilai tertinggi sebesar 0,34. Sedangkan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,2642. Nilai standar deviasi sebesar 0,04772. Nilai standar deviasi yang lebih kecil dari nilai rata-rata menunjukkan bahwa data agresivitas pajak perusahaan memiliki keragaman data yang kecil. Agresivitas pajak perusahaan dengan nilai terendah sebesar 0,16 terdapat pada PT Sekar Laut Tbk (SKLT) tahun 2017 dan nilai tertinggi sebesar 0,34 terdapat pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) tahun 2016.

4.3.2. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui apakah data yang digunakan layak untuk dianalisis atau tidak, karena tidak semua data dapat dianalisis dengan regresi. Uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji multikolonieritas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi.

1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Adapun cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi secara normal, yaitu dengan menggunakan uji statistik non-parametrik *Kolmogorov-Smirnov* (*One-Sample K-S*).

Dalam penelitian ini menggunakan metode uji statistik non-parametrik *Kolmogorov-Smirnov* (*One-Sample K-S*). Hasil uji dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.7 Hasil Uji Normalitas dengan *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test*

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		24
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	0,04400701
Most Extreme Differences	Absolute	0,136
	Positive	0,111
	Negative	-0,136
Test Statistic		0,136
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan SPSS 25, Tahun 2021

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai *Unstandardized Residual* Asymp. Sig. (2-tailed) yaitu sebesar 0,200, artinya data pada penelitian ini terdistribusi normal dan layak dipakai untuk memprediksi antar variabel. Karena nilai Asymp. Sig. (2-tailed) yaitu $0,200 > 0,05$. Suatu data dikatakan normal, apabila nilai Asymp. Sig. (2-tailed) $> 0,05$.

2. Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Untuk mendeteksi adanya atau tidak terjadi multikolonieritas dalam penelitian ini dengan menggunakan nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Apabila nilai *Tolerance* ≥ 0.10 atau sama dengan nilai $VIF \leq 10$, artinya nilai *cut off* yang menunjukkan tidak terjadi multikolonieritas atau bebas multikolonieritas. Hasil uji dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.8 Hasil Uji Multikolonieritas

		Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	0,330	0,109		3,033	0,007		
	X1	-0,017	0,016	-0,452	-1,051	0,306	0,230	4,339
	X2	-0,201	0,136	-0,625	-1,472	0,157	0,236	4,237
	X3	0,137	0,125	0,234	1,097	0,286	0,935	1,070

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan SPSS 25, Tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas hasil dari uji multikolonieritas dapat dilihat pada kolom *Collinearity Statistics* yang menunjukkan bahwa nilai *tolerance* CR sebesar 0,230, nilai *tolerance* DAR sebesar 0,236 dan nilai *tolerance* KI sebesar 0,935. Maka nilai *tolerance* CR sebesar $0,230 \geq 0,10$, nilai *tolerance* DAR sebesar $0,236 \geq 0,10$ dan nilai *tolerance* KI sebesar $0,935 \geq 0,10$. Sedangkan nilai VIF CR sebesar 4,339, nilai VIF DAR sebesar 4,237 dan nilai VIF KI sebesar $1,070 \leq 10$. Maka nilai VIF CR sebesar $4,339 \leq 10$, nilai VIF DAR sebesar $4,237 \leq 10$ dan nilai VIF KI sebesar $1,070 \leq 10$. Jadi, dapat disimpulkan bahwa variabel independen yang digunakan dalam model regresi penelitian ini tidak terjadi multikolonieritas atau bebas multikolonieritas, sehingga model regresi layak dipakai untuk memprediksi agresivitas pajak perusahaan berdasarkan variabel-variabel yang mempengaruhinya yaitu likuiditas, *leverage* dan komisaris independen.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik yaitu model regresi yang tidak terjadi heteroskedastisitas, atau disebut juga model yang homoskedastisitas. Adapun cara untuk mendeteksi adanya atau tidak terjadi heteroskedastisitas dalam penelitian ini dengan menggunakan uji Spearman's rho. Hasil uji dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.9 Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan Spearman's Rho

			Correlations			
			X1	X2	X3	Unstandardized Residual
Spearman's rho	X1	Correlation Coefficient	1,000	-0,815**	-0,213	0,030
		Sig. (2-tailed)	.	0,000	0,318	0,888
		N	24	24	24	24
	X2	Correlation Coefficient	-0,815**	1,000	0,222	-0,066
		Sig. (2-tailed)	0,000	.	0,297	0,758
		N	24	24	24	24
	X3	Correlation Coefficient	-0,213	0,222	1,000	0,095
		Sig. (2-tailed)	0,318	0,297	.	0,657
		N	24	24	24	24
	Unstandardized Residual	Correlation Coefficient	0,030	-0,066	0,095	1,000
		Sig. (2-tailed)	0,888	0,758	0,657	.
		N	24	24	24	24

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan SPSS 25, Tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas hasil dari uji heteroskedastisitas Spearman's rho dapat dilihat pada baris *Unstandardized Residual Sig. (2-tailed)* yang menunjukkan bahwa nilai Sig. (2-tailed) pada CR sebesar 0,888, nilai Sig. (2-tailed) pada DAR sebesar 0,758 dan nilai Sig. (2-tailed) pada KI sebesar 0,657. Maka nilai Sig. (2-tailed) CR sebesar $0,888 > 0,05$, nilai Sig. (2-tailed) DAR sebesar $0,758 > 0,05$ dan nilai Sig. (2-tailed) KI sebesar $0,657 > 0,05$. Jika Sig. (2-tailed) lebih besar $>$ dari 0,05 maka tidak ada heteroskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Jadi, dapat disimpulkan bahwa variabel independen yang digunakan dalam model regresi penelitian ini tidak ada heteroskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas, sehingga model regresi layak dipakai untuk memprediksi agresivitas pajak perusahaan berdasarkan variabel-variabel yang mempengaruhinya yaitu likuiditas, *leverage* dan komisaris independen.

4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada *problem* autokorelasi. Autokorelasi muncul karena

observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Adapun cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi dalam penelitian ini dengan menggunakan uji Durbin - Watson (DW test) dan uji *Run test*.

a. Hasil Uji Autokorelasi dengan Durbin - Watson (DW test)

Adapun ketentuan pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi dapat dilihat melalui tabel sebagai berikut:

Tabel 4.10 Pengambilan Keputusan Ada atau Tidaknya Autokorelasi

Hipotesis nol	Keputusan	Jika
Tidak ada autokorelasi positif	Tolak	$0 < d < dl$
Tidak ada autokorelasi positif	<i>No decision</i>	$dl \leq d \leq du$
Tidak ada korelasi negatif	Tolak	$4 - dl < d < 4$
Tidak ada korelasi negatif	<i>No decision</i>	$4 - du \leq d \leq 4 - dl$
Tidak ada autokorelasi positif atau negatif	Tidak ditolak	$du < d < 4 - du$

Sumber: Ghozali (2018: 112)

Adapun hasil pengujian autokorelasi dengan menggunakan uji Durbin - Watson (DW test) dapat dilihat melalui tabel sebagai berikut:

Tabel 4.11 Hasil Uji Autokorelasi dengan Durbin - Watson (DW Test)

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	0,387 ^a	0,150	0,022	0,04719	0,766

a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan SPSS 25, Tahun 2021

Berdasarkan tabel 4.11 dapat dilihat bahwa nilai Durbin - Watson sebesar 0,766 akan dibandingkan dengan nilai tabel dengan menggunakan nilai signifikansi 5%,

jumlah sampel 6 (n) dan jumlah variabel independen 3 (k-3), maka di tabel 4.12 Durbin Watson akan didapatkan nilai sebagai berikut:

Tabel 4.12 Durbin Watson *Test Bound*

	K=3	
n	Dl	du
24	1,1010	1,6565
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
6	0	0

Sumber: Ghozali (2018: 113) yang telah diolah oleh penulis, Tahun 2021

Oleh karena nilai DW 0,766 lebih besar dari batas atas (du) 0 dan kurang dari $4 - 0$ ($4 - du$), maka dapat disimpulkan bahwa tidak bisa menolak H_0 yang menyatakan bahwa tidak ada autokorelasi positif atau negatif dan dapat disimpulkan tidak terdapat autokorelasi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa variabel independen yang digunakan dalam model regresi penelitian ini tidak ada autokorelasi positif atau negatif dan tidak terdapat autokorelasi, sehingga model regresi layak dipakai untuk memprediksi agresivitas pajak perusahaan berdasarkan variabel-variabel yang mempengaruhinya yaitu likuiditas, *leverage* dan komisaris independen.

b. Hasil Uji Autokorelasi dengan *Run Test*

Adapun hasil pengujian autokorelasi dengan menggunakan uji *Run test* dapat dilihat melalui tabel sebagai berikut:

Tabel 4.13 Hasil Uji Autokorelasi dengan *Run Test*

Runs Test	
	Unstandardized Residual
Test Value ^a	-0,00783
Cases < Test Value	12
Cases >= Test Value	12
Total Cases	24
Number of Runs	11
Z	-0,626
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,531

a. Median

Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan SPSS 25, Tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas hasil dari uji autokorelasi *Run test* dapat dilihat pada kolom *Unstandardized Residual Asymp. Sig. (2-tailed)* yang menunjukkan bahwa nilai *Unstandardized Residual Asymp. Sig. (2-tailed)* yaitu sebesar 0,531. Jika nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* lebih besar > dari 0,05 maka tidak terdapat gejala autokorelasi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa variabel independen yang digunakan dalam model regresi penelitian ini tidak terdapat gejala autokorelasi, sehingga model regresi layak dipakai untuk memprediksi agresivitas pajak perusahaan berdasarkan variabel-variabel yang mempengaruhinya yaitu likuiditas, *leverage* dan komisaris independen.

4.3.3. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk menguji pengaruh atau hubungan variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini untuk menguji pengaruh antara variabel dependen yaitu agresivitas pajak perusahaan yang diproksikan dengan ETR (*Effective Tax Rate*) dengan ketiga variabel independen yaitu likuiditas yang diproksikan dengan rasio lancar (*current ratio*), *leverage* yang diproksikan dengan *debt to asset ratio (debt ratio)* dan komisaris independen. Hasil uji dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.14 Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	0,330	0,109		3,033	0,007
	X1	-0,017	0,016	-0,452	-1,051	0,306
	X2	-0,201	0,136	-0,625	-1,472	0,157
	X3	0,137	0,125	0,234	1,097	0,286

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan SPSS 25, Tahun 2021

Maka, model persamaan regresi linear bergandanya adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

$$Y = 0,330 - 0,017 \text{ CR} - 0,201 \text{ DAR} + 0,137 \text{ KI} + e$$

Keterangan:

Y : Agresivitas Pajak Perusahaan yang diproksikan dengan ETR (*Effective Tax Rate*)

α : Konstanta

β_1 : Koefisien regresi untuk Likuiditas

β_2 : Koefisien regresi untuk *Leverage*

β_3	: Koefisien regresi untuk Komisaris Independen
X_1	: CR (<i>Current Ratio</i>)
X_2	: DAR (<i>Debt to Asset Ratio/Debt Ratio</i>)
X_3	: KI (Komisaris Independen)
e	: <i>Error term (regression error)</i>

1. Konstanta (α)

Nilai konstanta (α) yaitu sebesar 0,330. Hal ini bahwa jika variabel independen likuiditas, *leverage* dan komisaris independen nilainya 0, maka besarnya agresivitas pajak yaitu sebesar 0,330.

2. Koefisien regresi untuk likuiditas

Nilai koefisien regresi variabel independen likuiditas yang diproksikan dengan *Current Ratio* (CR) bernilai negatif, yaitu sebesar -0,017. Hal ini menunjukkan bahwa CR memiliki hubungan yang berlawanan arah dengan tindakan agresivitas pajak. Setiap peningkatan CR sebesar satuan maka dapat mengakibatkan turunnya ETR (agresivitas pajak) sebesar -0,017 dengan asumsi bahwa variabel independen lainnya dalam model regresi ini nilainya konstan.

3. Koefisien regresi untuk *leverage*

Nilai koefisien regresi variabel independen *leverage* yang diproksikan dengan *Debt to Asset Ratio/Debt Ratio* (DAR) bernilai negatif, yaitu sebesar -0,201. Hal ini menunjukkan bahwa DAR memiliki hubungan yang berlawanan arah dengan tindakan agresivitas pajak. Setiap peningkatan DAR sebesar satuan maka dapat mengakibatkan turunnya ETR (agresivitas pajak) sebesar -0,201 dengan asumsi bahwa variabel independen lainnya dalam model regresi ini nilainya konstan.

4. Koefisien regresi untuk komisaris independen

Nilai koefisien regresi variabel independen komisaris independen yang diukur dengan cara membandingkan antara total komisaris independen dengan total dewan komisaris bernilai positif, yaitu sebesar 0,137. Hal ini menunjukkan bahwa KI memiliki hubungan yang searah dengan tindakan agresivitas pajak. Setiap peningkatan KI sebesar satuan maka dapat mengakibatkan naiknya ETR (agresivitas pajak) sebesar 0,137 dengan asumsi bahwa variabel independen lainnya dalam model regresi ini nilainya konstan.

4.3.4. Pengujian Hipotesis

Uji hipotesis bertujuan untuk memberikan dugaan atau jawaban sementara terhadap perumusan masalah penelitian. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini

menggunakan metode analisis regresi linear berganda melalui uji statistik t (parsial), uji statistik F (simultan) dan uji koefisien determinasi.

1. Uji Statistik t atau Parsial

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Pada akhirnya akan diambil suatu kesimpulan H_0 ditolak atau H_a diterima dari hipotesis yang telah dirumuskan. Kriteria untuk penerimaan atau penolakan hipotesis nol (H_0) yang digunakan dengan tingkat kesalahan 0,05 atau 5% yaitu H_0 diterima apabila : $\text{sig} > 0,05$ dan H_0 ditolak apabila : $\text{sig} < 0,05$. Bila H_0 diterima, maka hal ini diartikan bahwa pengaruh variabel independen secara parsial tidak terdapat pengaruh terhadap variabel dependen dinilai tidak signifikan. Sedangkan penolakan H_0 menunjukkan terdapat pengaruh dari variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Hasil uji koefisien regresi secara parsial (uji statistik t) dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.15 Hasil Uji Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji Statistik t)

Coefficients^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	0,330	0,109		3,033	0,007
	X1	-0,017	0,016	-0,452	-1,051	0,306
	X2	-0,201	0,136	-0,625	-1,472	0,157
	X3	0,137	0,125	0,234	1,097	0,286

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan SPSS 25, Tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas hasil uji koefisien regresi secara parsial (uji statistik t) menunjukkan bahwa ketiga variabel independen yang dimasukkan ke dalam model regresi, yaitu variabel likuiditas yang diproksikan dengan rasio lancar (*current ratio*), *leverage* yang diproksikan dengan *debt to asset ratio* (*debt ratio*) dan komisaris independen adalah tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi untuk likuiditas (X_1) sebesar 0,306, nilai signifikansi untuk *leverage* (X_2) sebesar 0,157 dan nilai signifikansi untuk komisaris independen (X_3) sebesar 0,286. Ketiga variabel tersebut memiliki nilai signifikansi $> 0,05$. Jadi, dapat disimpulkan bahwa ketiga variabel independen yang digunakan dalam model regresi penelitian ini menunjukkan tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan secara parsial.

2. Uji Statistik F atau Simultan

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat. Kriteria untuk penerimaan atau penolakan hipotesis nol (H_0) yang digunakan dengan tingkat kesalahan 0,05 atau 5% yaitu H_0 diterima apabila : $\text{sig} > 0,05$ dan H_0 ditolak apabila : $\text{sig} < 0,05$ atau Jika $F \text{ hitung} < F \text{ tabel}$ maka H_0 diterima dan Jika $F \text{ hitung} > F \text{ tabel}$ maka H_0 ditolak. Bila H_0 diterima, maka hal ini diartikan bahwa pengaruh variabel independen secara simultan tidak terdapat pengaruh terhadap variabel dependen dinilai tidak signifikan. Sedangkan penolakan H_0 menunjukkan terdapat pengaruh dari variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen. Hasil uji koefisien regresi secara simultan (uji statistik F) dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.16 Hasil Uji Koefisien Regresi Secara Simultan (Uji Statistik F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	0,008	3	0,003	1,174	0,345 ^b
	Residual	0,045	20	0,002		
	Total	0,052	23			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X3, X2, X1

Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan SPSS 25, Tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas hasil uji koefisien regresi secara simultan (uji statistik F) menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 1,174 dengan Sig. 0,345. Karena $\text{Sig.} > 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa model regresi penelitian ini menunjukkan tidak berpengaruh secara simultan atau bersama-sama terhadap agresivitas pajak perusahaan. Adapun terlihat bahwa F_{hitung} sebesar 1,174. Dengan menggunakan tingkat keyakinan 95%, $\alpha = 5\%$, df_1 (jumlah variabel - 1) atau $4-1 = 3$, dan df_2 ($n-k-1$) atau $24-3-1 = 20$, (n adalah jumlah data observasi dan k adalah jumlah variabel independen), sehingga diperoleh F tabel sebesar 3,10 atau $F \text{ hitung} < F \text{ tabel}$ ($1,174 < 3,10$). Jadi, dapat disimpulkan bahwa ketiga variabel independen yaitu likuiditas, *leverage* dan komisaris independen tidak berpengaruh secara simultan atau bersama-sama terhadap agresivitas pajak perusahaan.

3. Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Semakin besar nilai R^2 suatu regresi atau nilainya mendekati 1, maka hasil regresi tersebut semakin baik. Sebaliknya jika semakin kecil nilai R^2 suatu regresi atau nilainya menjauh dari 1, maka hasil regresi tersebut kurang baik. Hasil uji koefisien determinasi (R^2) dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.17 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,387 ^a	0,150	0,022	0,04719

a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan SPSS 25, Tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas hasil uji koefisien determinasi (R^2) menunjukkan bahwa koefisien determinasi terdiri dari nilai korelasi berganda (R), nilai koefisien determinasi (R Square), nilai koefisien determinasi yang disesuaikan ($Adjusted R$ Square) dan ukuran kesalahan prediksi ($Std. Error of the Estimate$).

R Square (R^2) menunjukkan nilai koefisien determinasi yaitu persentase sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen jika dalam regresi menggunakan tidak lebih dari dua variabel independen. Nilai R Square sebesar 0,150 yang berarti bahwa variabel independen (likuiditas, *leverage* dan komisaris independen) mempengaruhi variabel dependen (agresivitas pajak perusahaan) sebesar 15% dan sisanya sebesar 85% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

$Adjusted R$ Square adalah R Square yang telah disesuaikan yaitu persentase sumbangan variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai $Adjusted R$ Square sebesar 0,022. Nilai $Adjusted R$ Square sebesar 0,022 yang berarti bahwa variabel independen (likuiditas, *leverage* dan komisaris independen) mempengaruhi variabel dependen (agresivitas pajak perusahaan) sebesar 2,2% dan sisanya sebesar 97,8% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

Standar Error of the Estimate adalah ukuran kesalahan prediksi. Kesalahan dapat terjadi dalam memprediksi agresivitas pajak sebesar 0,04719.

4.4. Pembahasan dan Interpretasi Hasil Penelitian

4.4.1. Rekonsiliasi Fiskal

Rekonsiliasi antara laba sebelum beban pajak penghasilan, sebagaimana tercantum pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan estimasi laba kena pajak perusahaan. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian mencerminkan bagian kelompok usaha atas hasil operasi dari entitas asosiasi. Bila terdapat perubahan yang diakui langsung pada ekuitas entitas asosiasi, kelompok usaha mengakui bagiannya atas perubahan tersebut dan mengungkapkan hal ini, jika relevan, dalam laporan perubahan ekuitas konsolidasian. Laba atau rugi sebagai hasil dari transaksi-transaksi antara kelompok

usaha dengan entitas asosiasi dieliminasi pada jumlah sesuai dengan porsi kepemilikan kelompok usaha dalam entitas asosiasi. Terdapat dua jenis rekonsiliasi fiskal yaitu beda temporer (terutama terdiri dari perbedaan penyusutan antara perpajakan dan komersial serta penyisihan untuk liabilitas imbalan kerja karyawan) dan beda tetap (terutama terdiri dari beban kesejahteraan karyawan, representasi dan sumbangan).

Proses laba komersial menjadi laba fiskal bisa disebut sebagai rekonsiliasi fiskal. Rekonsiliasi fiskal dilakukan karena adanya akibat perbedaan pencatatan antara laporan keuangan komersial (akuntansi) dan laporan keuangan fiskal (pajak). Rekonsiliasi fiskal ini dilakukan untuk menyusun laporan keuangan suatu perusahaan dimana harus sesuai dengan peraturan fiskal yang ada dan kemudian akan dijadikan dasar untuk pembuatan SPT PPh suatu perusahaan yang akan dilaporkan kepada kantor pajak. Rekonsiliasi fiskal merupakan penyesuaian antara laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal yaitu penyesuaian terhadap biaya atau pendapatan akibat adanya perbedaan tetap dan temporer. Perbedaan tetap atau permanen timbul adanya peraturan yang berbeda terkait dengan pengakuan hasil dan biaya antara SAK dengan ketentuan Undang-Undang perpajakan. Sedangkan perbedaan temporer timbul akibat adanya perbedaan waktu pengakuan penghasilan dan biaya antara SAK dan Undang-Undang perpajakan. Apabila ada perbedaan permanen atau temporer maka laporan keuangan komersial dilakukan koreksi positif atau negatif. Koreksi positif adalah koreksi yang mengakibatkan Penghasilan Kena Pajak (PKP) bertambah sedangkan koreksi negatif adalah koreksi yang mengakibatkan Penghasilan Kena Pajak (PKP) Berkurang.

Tabel 4.18 Koreksi Fiskal terhadap Laporan Keuangan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk Tahun 2019 (Dalam Jutaan Rupiah)

Uraian	Komersial	Koreksi Fiskal		Fiskal
		Positif	Negatif	
PENJUALAN BERSIH	42,296,703			42,296,703
Beban pokok penjualan	(27,892,690)			(27,892,690)
LABA KOTOR	14,404,013			14,404,013
BEBAN USAHA				
Beban Penjualan dan distribusi				
Iklan dan promosi	(1,543,623)			(1,543,623)
Pengangkutan dan penanganan	(1,194,804)			(1,194,804)
Gaji, upah dan imbalan kerja karyawan	(600,838)			(600,838)
Distribusi	(455,566)			(455,566)
Beban royalti	(404,302)	404,302		0
Barang rusak	(252,338)			(252,338)
Sewa dan penyusutan	(182,030)			(182,030)

Lain-lain masing-masing dibawah Rp 65.000	(372,743)	372,743		0
Jumlah beban penjualan	(5,006,244)			(4,229,199)
Biaya Umum dan Administrasi				
Gaji	(1,053,020)			(1,053,020)
Sumbangan dan representasi	(309,797)	309,797		0
Sewa dan penyusutan	(179,407)			(179,407)
Utilitas, perbaikan dan pemeliharaan	(125,741)			(125,741)
Outsourcing	(91,844)			(91,844)
Jasa manajemen	(91,415)			(91,415)
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 65.000)	(268,403)	268,403		0
Jumlah Biaya Umum dan Administrasi	(2,119,627)			(1,541,427)
Jumlah Beban Usaha	(7,125,871)			(5,770,626)
LABA USAHA	7,278,142			8,633,387
Pendapatan (Beban) Lain-lain				
Penjualan barang bekas	188,681			188,681
Penghasilan jasa teknik	90,838			90,838
Lain-lain masing-masing di bawah Rp 30.000	154,738	154,738		0
Amortisasi aset tak berwujud	(133,238)			(133,238)
Rugi selisih kurs	(125,112)			(125,112)
Penyisihan penurunan nilai aset	(42,788)			(42,788)
Lain-lain di bawah 25.000	11,144	11,144		22,288
Beban Bunga	(161,444)	55,599.20		(105,845)
Penghasilan bunga	277,996		(277,996)	0

Berdasarkan tabel 4.18 rekonsiliasi fiskal di atas terdapat penjelasan koreksi yang dilakukan yaitu :

Beban royalti tidak bisa dibebankan sebagai biaya dalam perhitungan pajak. Royalti BUT yang dibayarkan kepada kantor pusat tidak bisa dibebankan sebagai biaya dan tidak bisa dipajaki di Indonesia sehingga harus di koreksi positif. Besarnya biaya royalti yaitu Rp 404.302.

Perusahaan telah melakukan koreksi positif terhadap sumbangan atau donasi. Menurut pasal 9 ayat (1) Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2016, harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan tidak dapat dijadikan biaya pengurang penghasilan bruto, kecuali yang diatur dalam PMK dan KMK seperti Peraturan Menteri Keuangan No. 609/PMK.03/ yang menyatakan sumbangan yang dapat dijadikan penghasilan bruto sehubungan pemberian bantuan kemanusiaan dalam bencana alam yang terjadi. Dalam hal ini perusahaan memberikan sumbangan untuk menjaga keamanan dan perawatan jalan di daerah pabrik PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk sehingga perusahaan harus mengoreksi positif biaya sumbangan dan dalam

prakteknya perusahaan telah benar melakukan koreksi fiskal atas biaya sumbangan sebesar Rp. 309.797.

Beban lain-lain masuk dalam rekonsiliasi positif karena perusahaan tidak membuat daftar normatif dalam biaya-biaya yang berkaitan dengan biaya lain-lain dan dengan biaya yang berkaitan langsung terhadap operasional perusahaan. Sehingga biaya-biaya tersebut dianggap tidak ada (fiktif). Dengan kesimpulan perusahaan telah benar melakukan koreksi dalam biaya lain-lain tahun 2019 sebesar Rp 641.146.

Atas jasa giro PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk menanggung beban bunga atas pajak final yang dipotong bank. Tetapi perusahaan belum melakukan koreksi atas beban bunga ini. Pajak ini merupakan final yang tidak bisa dijadikan sebagai beban perusahaan. Oleh karena itu berdasarkan Peraturan PP No.131 Tahun 2000 tentang pemotongan pajak penghasilan atas bunga deposito dan koreksi fiskal positif sebesar 20% dari pendapatan bunga pada laporan laba rugi. Besarnya koreksi yang harus dilakukan oleh perusahaan atas bebabn bunga yang bersifat final tahun 2019 adalah $Rp\ 277.996 \times 20\% = Rp\ 55.599,20$.

Berdasarkan PP 131 Tahun 2000 dan Keputusan Menteri Keuangan No 51/KMK.04/2000 menyatakan bahwa jasa giro dan bunga deposito merupakan penghasilan yang dikenakan final. Perusahaan harus mengeluarkan biaya ini dari penghasilan karena sudah terkena pajak final tetapi dalam kenyataannya perusahaan belum melakukan koreksi atas penghasilan bunga tersebut. Oleh karena itu berdasarkan peraturan yang ada sebaiknya perusahaan melakukan koreksi fiskal negatif terhadap penghasilan bunga karena bersifat final dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Besarnya koreksi final yang harus dilakukan oleh perusahaan sebesar tahun 2019 sebesar Rp. 277.996.

Tabel 4.19 Koreksi Fiskal terhadap Laporan Keuangan PT Indofood Sukses Makmur Tbk Tahun 2019 (Dalam Jutaan Rupiah)

Uraian	Komersial	Koreksi Fiskal		Fiskal
		Positif	Negatif	
PENJUALAN BERSIH	76,592,955			76,592,955
Beban pokok penjualan	(53,876,594)			(53,876,594)
LABA KOTOR	22,716,361			22,716,361
BEBAN USAHA				
Beban Penjualan dan distribusi				
Iklan dan promosi	(1,697,366)			(1,697,366)
Pengangkutan dan penanganan	(2,540,079)			(2,540,079)
Gaji, upah dan imbalan kerja karyawan	(1,608,483)	347,667		(1,260,816)
Outsourcing	(527,333)			(527,333)
Distribusi	(513,781)			(513,781)

Barang rusak	(448,861)			(448,861)
Sewa dan penyusutan	(402,028)			(402,028)
Perjalanan dinas dan transportasi	(126,959)			(126,959)
Perbaikan dan pemeliharaan	(110,071)			(110,071)
Pajak ekspor, administrasi ekspor, pajak lainnya dan perizinan	(65,276)			(65,276)
Piutang tak tertagih	(62,603)	62,603		0
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 50.000)	(386,516)	386,516		0
Total beban penjualan dan distribusi	(8,489,356)			(7,692,570)
Biaya Umum dan Administrasi				
Gaji	(2,816,577)			(2,816,577)
Sumbangan, dan representasi	(530,576)	530,576		0
Sewa dan penyusutan	(348,439)			(348,439)
Utilitas, perbaikan dan pemeliharaan	(220,785)			(220,785)
Outsourcing	(170,785)			(170,785)
Pajak dan perizinan	(118,065)	118,065		0
Perjalanan dinas dan transportasi	(107,966)			(107,966)
Hubungan investor dan masyarakat	(97,180)			(97,180)
Jasa tenaga ahli	(84,251)			(84,251)
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 50.000)	(202,549)	202,549		0
Jumlah Biaya Umum dan Administrasi	(4,697,173)			(3,845,983)
Jumlah Beban Usaha	(13,186,529)			(11,538,553)
LABA USAHA	9,529,832			11,177,808
Pendapatan (Beban) Lain-lain				
Penghasilan royalti dan teknis	317,317		(317,317)	0
Penjualan barang bekas	225,192			225,192
Laba dari penjualan aset dan persediaan	35,752			35,752
Laba selisih kurs	(133,238)			(133,238)
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 25.000)	291,709	291,709		0
Rugi neto selisih kurs	(257,721)			(257,721)
Penyisihan atas piutang plasma	(139,277)			(139,277)
Amortisasi aset tak berwujud	(133,238)			(133,238)

Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 25.000)	(228,895)	228,895		0
Penghasilan bunga	(554,267)		(554,267)	0
Laba neto selisih kurs	275,566			275,566
Beban bunga	(1,458,597)	110,853		(1,347,744)
Pinjaman bank	(268,421)			(268,421)
Beban lain-lain (net)	(2,028,118)			(1,743,129)
Laba sebelum pajak penghasilan	7,501,714			9,434,679
PPH tahun 2019	(1,875,428.50)			(2,358,669.85)
Laba bersih	5,626,286			7,076,010

Berdasarkan tabel 4.19 rekonsiliasi fiskal di atas terdapat penjelasan koreksi yang dilakukan yaitu :

Beban pajak yang berbeda dengan perusahaan sebelumnya dimana terdapat beban pajak. Perusahaan menanggung biaya pajak dalam laporan laba rugi. Hal ini tidak bisa dijadikan biaya. Untuk itu biaya tersebut harus dikeluarkan sebagai koreksi positif sebesar Rp 118.065. Selain itu ada beban yang dikoreksi positif yaitu beban lain-lain, sumbangan. Penghasilan royalti dan penghasilan bunga menjadi beban dengan koreksi negatif.

Atas beban bunga ini. Pajak ini merupakan final yang tidak bisa dijadikan sebagai beban perusahaan. Oleh karena itu berdasarkan Peraturan PP No.131 Tahun 2000 tentang pemotongan pajak penghasilan atas bunga deposito dan koreksi fiskal positif sebesar 20% dari pendapatan bunga pada laporan laba rugi. Besarnya koreksi yang harus dilakukan oleh perusahaan atas beban bunga yang bersifat final tahun 2019 adalah $Rp\ 554.267 \times 20\% = Rp\ 110.853$.

Tabel 4.20 Koreksi Fiskal terhadap Laporan Keuangan PT Multi Bintang Indonesia Tbk Tahun 2019 (Dalam Jutaan Rupiah)

Uraian	Komersial	Koreksi Fiskal		Fiskal
		Positif	Negatif	
PENJUALAN BERSIH	3,711,405			3,711,405
Beban pokok penjualan	(1,426,351)			(1,426,351)
LABA KOTOR	2,285,054			2,285,054
BEBAN USAHA				
Beban Penjualan				
Promosi	(237,384)			(237,384)
Gaji dan tunjangan	(96,977)			(96,977)
Lain-lain	(33,566)	33,566		0
Jumlah beban penjualan	(367,927)			(334,361)

Biaya Umum dan Administrasi				
Gaji dan kompensasi karyawan	(72,511)			(72,511)
Penyusutan dan amortisasi	(12,380)			(12,380)
Perjalanan, komunikasi, jasa profesional dll.	(122,963)	61,482		(61,482)
Jumlah Biaya Umum dan Administrasi	(207,854)			(146,373)
Jumlah Beban Usaha	(575,781)			(480,734)
LABA USAHA	1,709,273			1,804,321
Pendapatan (Beban) Lain-lain				
Beban Bunga	(871)	2,006		1,135
Penghasilan bunga	10,029		(10,029)	0
Dividen	222,063	222,063		444,126
Perjamuan, sumbangan, dan lainnya	(4,171)	4,171		0
Beban lain-lain	227,050			
Laba sebelum pajak penghasilan	1,482,223			1,804,321
PPh tahun 2019	(420,553)			(451,080.13)
Laba bersih	1,061,670			1,353,240

Berdasarkan tabel 4.20 rekonsiliasi fiskal di atas terdapat penjelasan koreksi yang dilakukan yaitu :

Beban lain-lain karena PT Multi Bintang Indonesia tidak membuat daftar normatif dalam biaya-biaya yang berkaitan dengan kegiatan operasional perusahaan sehingga tidak dapat dijadikan pengurang bruto. Sehingga biaya tersebut dianggap tidak (fiktif). Dengan kesimpulan perusahaan telah benar melakukan koreksi positif dalam biaya lain-lain sebesar Rp 33.566.

Selanjutnya yaitu biaya komunikasi, biaya komunikasi ini dikeluarkan perusahaan untuk membiayai telepon kantor, voucher dan biaya komunikasi pihak-pihak yang mempunyai jabatan khusus. Pegawai dengan jabatan khusus akan menerima fasilitas pembelian voucher pulsa, pembelian handphone. Atas biaya pembelian telepon seluler yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% dari jumlah biaya perolehan sebagaimana telah dimaksud dalam Keputusan DJP No.KEP-220/PJ/2002. Adapun koreksi fiskal positif pada biaya komunikasi ini adalah sebesar Rp 61.482.

Berdasarkan PP 131 Tahun 2000 dan Keputusan Menteri Keuangan No. 51/KMK.04/2000 bahwa jasa giro dan bunga deposito merupakan penghasilan yang dikenakan pajak final. Oleh karena itu perusahaan harus mengeluarkan biaya ini. Besarnya koreksi negatif yang harus dilakukan perusahaan adalah sebesar Rp 10.029.

Tabel 4.21 Koreksi Fiskal terhadap Laporan Keuangan PT Mayora Indah Tbk Tahun 2019 (Dalam Jutaan Rupiah)

Uraian	Komersial	Koreksi Fiskal		Fiskal
		Positif	Negatif	
PENJUALAN BERSIH	25,026,739,472,547			25,026,739,472,547
Beban pokok penjualan	17,109,498,526,032			17,109,498,526,032
LABA KOTOR	7,917,240,946,515			7,917,240,946,515
BEBAN USAHA				
Beban Penjualan				
Iklan dan promosi	(3,393,230,779,946)			(3,393,230,779,946)
Pengiriman	(366,623,327,067)			(366,623,327,067)
Gaji	(170,410,307,644)			(170,410,307,644)
Survei dan penelitian	(47,512,672,713)			(47,512,672,713)
Perjalanan dinas	(16,226,683,816)			(16,226,683,816)
Sumbangan dan hiburan	(10,698,681,217)	10,698,681,217		0
Sewa	(8,599,775,042)			(182,030)
Asuransi	(6,461,061,208)	6,461,061,208		0
Pajak dan perijinan	(5,396,764,195)	5,396,764,195		0
Perbaikan dan pemeliharaan	(549,623,524)			(549,623,524)
Barang cetakan dan alat tulis	(210,222,797)			(210,222,797)
Lain-lain	(2,066,934,316)			(2,066,934,316)
Jumlah beban penjualan	(4,027,986,833,485)			(3,996,830,733,853)
Biaya Umum dan Administrasi				
Gaji	(264,827,232,726)			(264,827,232,726)
Imbalan kerja jangka panjang	(143,385,846,265)			(143,385,846,265)
Sewa	(122,872,290,778)			(122,872,290,778)
Penyusutan	(49,220,822,439)			(49,220,822,439)
Pajak dan perijinan	(21,227,926,442)	21,227,926,442		0
Perjalanan dinas	(19,524,917,112)			(19,524,917,112)
Sumbangan dan representasi	(18,736,108,767)	18,736,108,767		0
Asuransi	(17,302,840,184)			(17,302,840,184)
Penghapusan piutang tak tertagih	(16,298,407,205)			(16,298,407,205)
Pemeliharaan	(8,843,503,800)			(8,843,503,800)

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	(8,545,147,441)			(8,545,147,441)
Laboratorium	(6,863,627,059)			(6,863,627,059)
Jasa Profesional	(6,561,538,957)			(6,561,538,957)
Rekrutmen	(2,995,361,114)			(2,995,361,114)
Barang cetakan dan alat tulis	(2,686,262,976)			(2,686,262,976)
Rapat dan publikasi	(2,034,319,416)			(2,034,319,416)
Telepon dan faksimili	(1,707,226,841)	853,613,421		0
Listrik, air dan gas	(1,040,246,753)			(1,040,246,753)
Pajak final	(402,223,705)	402,223,705		0
Kerugian penurunan nilai piutang	(328,818,038)			(328,818,038)
Lain-lain	(1,584,893,978)	1,584,893,978		0
Jumlah Biaya Umum dan Administrasi	(716,989,561,996)			(673,331,182,263)
Jumlah Beban Usaha	(4,744,976,395,481)			(4,670,161,916,116)
LABA USAHA	3,172,264,551,034			3,247,079,030,399
Pendapatan (Beban) Lain-lain				
Jasa Giro	29,347,366,438		(29,347,366,438)	0
Deposito berjangka	23,005,476,639		(23,005,476,639)	0
Beban Bunga	(355,074,879,758)	10,470,568,615		(344,604,311,143)
Penjualan barang bekas	24,291,071,246			(133,238)
Pendapatan sewa	7,109,184,000			(125,112)
Klaim asuransi	3,007,053,643			(42,788)
Biaya administrasi bank	(5,858,305,365)			(5,858,305,365)
Pemulihan kerugian cadangan kerugian penurunan nilai	(25,161,400)			(25,161,400)
Lain-lain	10,324,258,599			10,324,258,599
Beban lain-lain	(263,873,935,958)			(340,163,820,447)
Laba sebelum pajak penghasilan	3,436,138,486,992			2,906,915,209,952
PPh tahun 2019	(859,034,621,748)			(726,728,802,488.00)
Laba bersih	2,577,103,865,244			2,180,186,407,464

Berdasarkan tabel 4.21 rekonsiliasi fiskal di atas terdapat penjelasan koreksi yang dilakukan yaitu :

Rekonsiliasi fiskal di atas perusahaan telah melakukan koreksi positif terhadap sumbangan atau donasi. Menurut pasal 9 ayat (1) Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2016, harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan tidak dapat dijadikan biaya pengurang penghasilan bruto, kecuali yang diatur dalam PMK dan KMK seperti Peraturan Menteri Keuangan No. 609/PMK.03/ yang menyatakan sumbangan yang dapat dijadikan penghasilan bruto sehubungan pemberian bantuan kemanusiaan dalam bencana alam yang terjadi. Dalam hal ini perusahaan memberikan sumbangan untuk menjaga keamanan dan perawatan jalan di daerah pabrik PT. Mayora Indah Tbk sehingga perusahaan harus mengoreksi positif biaya sumbangan dan dalam prakteknya perusahaan telah benar melakukan koreksi fiskal atas biaya sumbangan sebesar Rp. 10,698,681,217.

Selanjutnya koreksi yang dilakukan yaitu beban lain-lain karena PT Mayora Indah Tbk tidak membuat daftar normatif dalam biaya-biaya yang berkaitan dengan kegiatan operasional perusahaan sehingga tidak dapat dijadikan pengurang bruto. Sehingga biaya tersebut dianggap tidak (fiktif). Dengan kesimpulan perusahaan telah benar melakukan koreksi positif dalam biaya lain-lain sebesar Rp 1,584,893,978.

Selanjutnya yaitu biaya komunikasi, biaya komunikasi ini dikeluarkan perusahaan untuk membiayai telepon kantor, voucher dan biaya komunikasi pihak-pihak yang mempunyai jabatan khusus. Pegawai dengan jabatan khusus akan menerima fasilitas pembelian voucher pulsa, pembelian handphone. Atas biaya pembelian telepon seluler yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% dari jumlah biaya perolehan sebagaimana telah dimaksud dalam Keputusan DJP No.KEP-220/PJ/2002. Adapun koreksi fiskal positif pada biaya komunikasi ini adalah sebesar Rp 853,613,421.

Berdasarkan PP 131 Tahun 2000 dan Keputusan Menteri Keuangan No. 51/KMK.04/2000 bahwa jasa giro dan bunga deposito merupakan penghasilan yang dikenakan pajak final yaitu 402,223,705. Selain itu perusahaan harus mengeluarkan biaya ini. Besarnya koreksi negatif yang harus dilakukan perusahaan adalah sebesar Rp 10,470,568,615. Adapun beban pajak yang harus dikoreksi positif yaitu sebesar Rp 21,227,926,442.

Tabel 4.22 Koreksi Fiskal terhadap Laporan Keuangan PT Sekar Laut Tbk Tahun 2019 (Dalam Jutaan Rupiah)

Uraian	Komersial	Koreksi Fiskal		Fiskal
		Positif	Negatif	
PENJUALAN BERSIH	1.281.116.255.236			1.281.116.255.236
Beban pokok penjualan	(957.200.088.005)			(957.200.088.005)
LABA KOTOR	323.916.167.231			323.916.167.231
BEBAN USAHA				
Beban Penjualan				
Gaji dan tunjangan	(47.553.078.550)			(47.553.078.550)
Promosi dan iklan	(39.630.817.158)			(39.630.817.158)
Pengiriman	(25.049.802.511)			(25.049.802.511)
Angkutan ekspor	(5.266.752.176)			(5.266.752.176)

Perjalanan	(7.098.664.785)			(7.098.664.785)
Penyusutan	(5.919.425.618)		(10.350.865.935)	(16.270.291.553)
Sewa cold storage dan kendaraan	(1.757.855.054)			(1.757.855.054)
Pemeliharaan	(1.432.539.979)			(1.432.539.979)
Lainnya (masing-masing di bawah Rp 200 juta)	(1.161.893.313)	1.276.558.527		114.665.214
Total Beban Penjualan	(134.870.829.144)			(143.945.136.552)
Beban Umum dan Administrasi				
Gaji dan tunjangan	(52.150.983.922)	(4.880.215.186)		(47.270.768.736)
Kantor dan umum	(13.313.650.711)			(13.313.650.711)
Imbalan kerja	(13.744.230.209)			(13.744.230.209)
Air, listrik dan telepon	(5.598.892.799)			(5.598.892.799)
Pemeliharaan	(5.250.248.303)			(5.250.248.303)
Asuransi	(4.861.484.091)			(4.861.484.091)
Penyusutan	(3.572.319.069)	811.243.750		(2.761.075.319)
Perjalanan	(2.127.864.388)			(2.127.864.388)
Pajak	(1.769.159.037)	427.337.615		(1.341.821.422)
<i>Entertainment</i>	(1.515.111.233)			(1.515.111.233)
Admin bank	(606.348.759)			(606.348.759)
Sewa	(282.666.672)			(282.666.672)
Lainnya (masing-masing di bawah Rp 800 juta)	(3.013.057.459)	816.010.526		(2.197.046.933)
Total Beban Umum dan Administrasi	(107.805.716.652)			(100.871.209.575)
LABA USAHA	81.239.621.435			403.015.988.335
Pendapatan Lainnya				
Pendapatan bunga	151.903.261		(32.701.937)	119.201.324
Pendapatan sewa	3.761.221.568		(3.738.421.568)	22.800.000
Beban bunga	(21.525.483.689)			(21.525.483.689)
Laba Investasi pada entitas asosiasi	1.262.753.553		(11.709.864.290)	(10.447.110.737)
Laba (rugi) Selisih Kurs, neto	(686.963.074)			(686.963.074)
Laba penjualan aset tetap	651.613.502			651.613.502
Kerugian penurunan nilai piutang	(1.204.484.027)	4.438.303		(1.200.045.724)
Kerugian penurunan nilai persediaan	(7.127.011.169)		(96.091.900)	(7.223.103.069)
Lain-lain, neto	259.035.217		(1.642.793.273)	(1.383.758.056)
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	56.782.206.578			361.343.138.812
PPH tahun 2019	11.838.578.678			90.335.784.703
Laba bersih	44.943.627.900			271.007.354.109

Berdasarkan tabel 4.22 rekonsiliasi fiskal di atas terdapat penjelasan koreksi yang dilakukan yaitu :

Beban penyusutan, hal ini terjadi karena ada perbedaan temporer atau beda pengakuan waktu perhitungan beban penyusutan pada laporan komersial dan fiskal. Oleh karena itu perusahaan melakukan koreksi negatif terhadap beban penyusutan sebesar Rp 10.350.865.935.

Pendapatan sewa dikoreksi negatif karena pendapatan sewa termasuk PPh Final yang diatur dalam PPh Pasal 4 Ayat 2, dimana pendapatan tersebut telah dilakukan pemotongan saat terjadi. Oleh karena itu pendapatan sewa menjadi pengurang penghasilan kena pajak, agar pajak yang dikenakan tidak *double* sebesar Rp 3.738.421.568.

Perusahaan melakukan koreksi negatif atas keuntungan atas investasi karena penghasilan investasi lebih dari 25% sehingga keuntungan ini dianggap sebagai bukan objek pajak yang telah di atur dalam UU PPh Pasal 4 ayat 3. Oleh karena itu keuntungan atas investasi di koreksi negatif sebesar Rp 11.709.864.290.

Perusahaan telah melakukan koreksi positif terhadap jamuan, hadiah, sumbangan. Menurut pasal 9 ayat (1) Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2016, harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan tidak dapat dijadikan biaya pengurang penghasil bruto, kecuali yang diatur dalam PMK dan KMK seperti Peraturan Menteri Keuangan No. 609/PMK.03/ yang menyatakan sumbangan yang dapat dijadikan penghasilan bruto sehubungan pemberian bantuan kemanusiaan dalam bencana alam yang terjadi. Dalam hal ini perusahaan memberikan jamuan tidak nominatif, hadiah, dan sumbangan yang tidak berkaitan dengan kemanusiaan, maka perusahaan PT Sekar Laut Tbk melakukan koreksi positif sebesar Rp 460.548.001.

Beban pajak yang berbeda dengan perusahaan sebelumnya dimana terdapat beban pajak. Perusahaan menanggung biaya pajak dalam laporan laba rugi. Hal ini tidak bisa dijadikan biaya. Untuk itu biaya tersebut harus dikeluarkan sebagai koreksi positif sebesar Rp 427.337.615.

Berdasarkan pasal 6 ayat 1 bahwa piutang yang nyata-nyata tidak tertagih (memenuhi syarat) dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto dalam menghitung penghasilan kena pajak. Namun perusahaan ini tidak memenuhi syarat yaitu tidak membuat daftar piutang tidak tertagih dan belum membebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial. Oleh karena itu penghapusan piutang di koreksi positif sebesar Rp 4.438.303.

Koreksi atas pendapatan bunga karena pendapatan ini termasuk dalam PPh Pasal 4 ayat (2) yaitu pajak penghasilan yang dikenakan pajak final, sehingga pendapatan bunga ini akan mengurangi penghasilan kena pajak oleh karena itu pendapatan bunga pada perusahaan ini harus di koreksi negatif sebesar Rp 32.701.937.

Beban lain-lain masuk dalam rekonsiliasi positif karena perusahaan tidak membuat daftar normatif dalam biaya-biaya yang berkaitan dengan biaya lain-lain dan dengan biaya yang berkaitan langsung terhadap operasional perusahaan. Sehingga biaya-biaya tersebut dianggap tidak ada (fiktif). Dengan kesimpulan perusahaan telah benar melakukan koreksi dalam biaya lain-lain tahun 2019 sebesar Rp 816.010.526.

Perusahaan melakukan koreksi positif terhadap imbalan kerja karena adanya perbedaan pencatatan di laporan komersial dan laporan fiskal. Hal ini disebabkan karena imbalan kerja ini belum terealisasi, sehingga saat pencadangan dilakukan koreksi positif. Apabila imbalan kerja sudah terealisasi baru di koreksi negatif yaitu mengurangi laba kena pajak. Jadi perusahaan melakukan koreksi positif terhadap imbalan kerja sebesar Rp 4.880.215.186.

Perusahaan melakukan koreksi positif terhadap penyusutan aset tetap sebesar Rp 811.243.750 karena sesuai Pasal 6 ayat 1 bahwa nilai penyusutan menurut pajak lebih besar daripada komersial maka dilakukan koreksi positif yang mengakibatkan menambah penghasilan kena pajak.

Cadangan kerugian penurunan nilai piutang dengan neto dikoreksi positif Pasal 9 UU PPh disebutkan bahwa untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan oleh pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali: cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang. Cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan; cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan; cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan; dan cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri.

Cadangan kerugian penurunan persediaan dikoreksi positif, penurunan nilai persediaan menurut perpajakan, terkait penurunan nilai aset yang menyebabkan suatu kerugian yang dicatat dalam laporan laba rugi dalam pelaporan pajak akan dilakukan koreksi hal ini sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang meliputi : UU PPh Pasal 9 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Keuangan nomor 219/PMK.11/2012 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan nomor 81 Tahun 2009 tentang pembentukan atau pemupukan dana cadangan yang boleh dikurangkan sebagai biaya namun bagaimana atas kerugian akibat penurunan nilai aset yang telah dilakukan koreksi fiskal positif ditahun-tahun sebelumnya dimunculkan kembali menjadi koreksi fiskal negatif karena ternyata atas nilai persediaan yang telah diturunkan tersebut telah nyata-nyata mengalami kerugian di tahun bersangkutan, pada prinsipnya atas kerugian penurunan nilai aktiva dalam hal ini persediaan (industri

manufaktur dan perdagangan) tidak diperkenankan dilakukan pembiayaan sebagai pengurang dalam menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri walaupun dalam mekanisme dimana wajib pajak melakukan koreksi fiskal positif. Artinya dalam penghitungan perpajakan persediaannya tetap dihitung senilai yang dicatat tanpa penurunan nilai.

Perusahaan melakukan koreksi negatif terhadap utang usaha guna usaha karena jumlah pembayaran sewa guna usaha selama masa sewa guna usaha pertama tidak dapat menutupi harga perolehan barang modal yang disewa guna usahakan ditambah keuntungan yang diperhitungkan *lessor* dan perjanjian sewa guna usaha tidak memuat ketentuan mengenai opsi bagi *lessee* yang telah di atur oleh Pasal 4 KMK-1169/KMK.01/1991. Oleh karena itu perusahaan melakukan koreksi negatif sebesar Rp 1.642.793.273.

Tabel 4.23 Koreksi Fiskal terhadap Laporan Keuangan PT Ultra Jaya Milk Industry dan Trading Company Tahun 2019 (Dalam Jutaan Rupiah)

Uraian	Komersial	Koreksi Fiskal		Fiskal
		Positif	Negatif	
PENJUALAN BERSIH	6,241,419			6,241,419
Beban pokok penjualan	(3,891,701)			(3,891,701)
LABA KOTOR	2,349,718			2,349,718
BEBAN USAHA				
Beban Penjualan				
Iklan dan promosi	(455,752)			(455,752)
Angkutan	(223,193)			(223,193)
Gaji dan upah	(81,637)			(81,637)
Sewa	(56,482)			(56,482)
Kerusakan Barang	(7,105)			(7,105)
Bahan Bakar	(6,261)	3,131		(3,131)
Asuransi	(6,048)			(6,048)
Perjalanan dinas	(4,953)			(4,953)
Komunikasi	(4,109)	2,055		(2,055)
Penyusutan aset tetap	(1,333)			(1,333)
Pemeliharaan dan perbaikan	(691)			(691)
Lain-lain	(61,313)	61,313		-
Jumlah beban penjualan	(908,877)			(678,945)
Biaya Umum dan Administrasi				

Gaji dan upah	(108,168)			(108,168)
Penyusutan aset tetap	(9,517)			(9,517)
Listrik dan energi	(8,806)			(8,806)
Sewa	(4,659)			(4,659)
Amortisasi aset tak berwujud	(2,893)			(2,893)
Lain-lain	(68,840)	68,840		-
Jumlah Biaya Umum dan Administrasi	(202,883)			(134,043)
Jumlah Beban Usaha	(1,111,760)			(812,988)
LABA USAHA	1,237,958			1,536,730
Pendapatan (Beban) Lain-lain				
Penghasilan sewa	7,019			7,019
Penjualan barang bekas	3,919			3,919
Biaya dan denda pajak	(5,030)	5,030		0
Biaya kerusakan bahan baku dan barang jadi	(20,605)			(20,605)
Biaya bank	(2,616)			(2,616)
Rugi penjualan hewan ternak produksi	(5,426)			(5,426)
Lain-lain	108,154			108,154
Deposito	58,622		(58,622)	-
Investasi dalam obligasi pemerintah	1,658,060,329		(1,658,060,329)	0
Jasa giro dan lain-lain	3,778		(3,778)	0
Bunga pinjaman bank	(1,435)	1,435		-
Amortisasi beban keuangan	198			198
Lain-lain	(28)			(28)
Beban lain-lain	1,658,206,907			90,615
Laba sebelum pajak penghasilan	1,659,444,865			1,627,345
PPh tahun 2019	(414,861,216.25)			(406,836.25)
Laba bersih	1,244,583,649			1,220,509

Berdasarkan tabel 4.23 rekonsiliasi fiskal di atas terdapat penjelasan koreksi yang dilakukan yaitu :

Rekonsiliasi fiskal di atas perusahaan telah melakukan koreksi positif terhadap biaya bahan bakar. Biaya ini tidak termasuk dalam grey area, perpajakan tidak memperbolehkan perusahaan menanggung biaya tersebut secara penuh. Jadi, bahan bakar ini dapat dijadikan pengurang bruto dan dikenakan tarif 50% sebesar Rp 3,131. Selain itu, biaya komunikasi, biaya komunikasi ini dikeluarkan perusahaan untuk membiayai telepon kantor, voucher dan biaya komunikasi pihak-pihak yang mempunyai jabatan khusus. Pegawai dengan jabatan khusus akan menerima fasilitas

pembelian voucher pulsa, pembelian handphone. Atas biaya pembelian telepon seluler yang di miliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% dari jumlah biaya perolehan sebagaimana telah dimaksud dalam Keputusan DJP No.KEP-220/PJ/2002. Adapun koreksi fiskal positif pada biaya komunikasi ini adalah sebesar Rp 2,055.

Selanjutnya koreksi yang dilakukan yaitu beban lain-lain karena PT Ultrajaya Milk & Trading Company Tbk tidak membuat daftar normatif dalam biaya-biaya yang berkaitan dengan kegiatan operasional perusahaan sehingga tidak dapat dijadikan pengurang bruto. Sehingga biaya tersebut dianggap tidak (fiktif). Dengan kesimpulan perusahaan telah benar melakukan koreksi positif dalam biaya lain-lain sebesar Rp 130,153.

Atas jasa giro PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk menanggung beban bunga atas pajak final yang dipotong bank. Tetapi perusahaan belum melakukan koreksi atas beban bunga ini. Pajak ini merupakan final yang tidak bisa dijadikan sebagai beban perusahaan. Oleh karena itu berdasarkan Peraturan PP No.131 Tahun 2000 tentang pemotongan pajak penghasilan atas bunga deposito dan koreksi fiskal positif sebesar 20% dari pendapatan bunga pada laporan laba rugi. Besarnya koreksi yang harus dilakukan oleh perusahaan atas beban bunga yang bersifat final tahun 2019 adalah Rp 1,435 perusahaan menanggung biaya pajak dalam laporan laba rugi. Hal ini tidak bisa dijadikan biaya. Untuk itu biaya tersebut harus dikeluarkan dengan koreksi positif sebesar Rp 58,622. Perusahaan juga telah melakukan koreksi positif terhadap biaya pajak dalam laporan laba rugi. Hal ini tidak bisa dijadikan biaya. Untuk itu biaya tersebut harus dikeluarkan sebesar Rp 2,542,262,169.

4.4.2. Pengaruh Likuiditas Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan pada Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa

Efek Indonesia

Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel independen likuiditas yang diproksikan dengan rasio lancar (*current ratio*) (X_1) terlihat bahwa nilai signifikansi pada t_{hitung} sebesar -1,051 adalah sebesar 0,306. Maka nilai $sig > 0,05$ ($0,306 > 0,05$). Sehingga H_0 diterima dan H_1 ditolak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa likuiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan.

Berdasarkan hasil penelitian, likuiditas yang diproksikan dengan rasio lancar (*current ratio*) (X_1) tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan. Hal ini dibuktikan dengan pengujian koefisien regresi secara parsial (uji statistik t) dimana terlihat bahwa nilai signifikansi pada t_{hitung} sebesar -1,051 adalah sebesar 0,306 yang artinya lebih besar dari taraf nyata 0,05 atau ($0,306 > 0,05$). Tidak signifikannya hubungan likuiditas perusahaan terhadap tingkat agresivitas pajak pada penelitian ini dapat disebabkan karena tingkat likuiditas pada perusahaan

sub sektor makanan dan minuman yang relatif sama. Hal ini dapat ditunjukkan dengan nilai standar deviasi (*Std. Deviation*) pada hasil analisis statistik deskriptif sebesar 1,27946 lebih kecil dari rata-rata likuiditas perusahaan sub sektor makanan dan minuman yaitu sebesar 2,1408. Selain itu, rata-rata likuiditas perusahaan yang berada di kisaran 2,1408 menggambarkan bahwa perusahaan cenderung menjaga likuiditas pada angka tersebut yang dapat diartikan bahwa perusahaan memiliki kemampuan untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya termasuk kewajiban perpajakannya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tinggi rendahnya likuiditas perusahaan tidak akan mempengaruhi tindakan agresif terhadap beban pajak yang harus dibayar karena perusahaan cenderung menjaga likuiditas pada kondisi tertentu untuk meningkatkan kepercayaan investor.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurjanah dkk (2018) menjelaskan bahwa likuiditas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap agresivitas pajak. Hal ini dikarenakan tingkat likuiditas pada perusahaan yang relatif sama. Perusahaan cenderung menjaga likuiditas pada angka tersebut yang dapat diartikan bahwa perusahaan memiliki kemampuan untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya termasuk kewajiban perpajakannya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tinggi rendahnya likuiditas perusahaan tidak akan mempengaruhi tindakan agresif terhadap beban pajak yang harus dibayar karena perusahaan cenderung menjaga likuiditas pada kondisi tertentu untuk meningkatkan kepercayaan investor. Penelitian Muliastari dan Hidayat (2020) menjelaskan bahwa likuiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan. Hal ini dikarenakan nilai signifikansi $> 0,05$.

Tetapi penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ramadani dan Hartiyah (2020) menjelaskan bahwa likuiditas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Hal ini disebabkan perusahaan dengan rasio likuiditas yang tinggi menunjukkan tingginya kemampuan perusahaan dalam memenuhi utang jangka pendeknya, yang menandakan bahwa perusahaan dalam kondisi keuangan yang sehat. Likuiditas yang terlalu tinggi juga tidak baik karena menggambarkan tingginya uang tunai yang menganggur sehingga dianggap kurang produktif. Karena perusahaan dengan likuiditas yang tinggi maka akan mengarah pada tindakan agresivitas pajak. Penelitian Dharmayanti (2019) menjelaskan bahwa likuiditas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap agresivitas pajak serta memiliki arah negatif. Hal ini dikarenakan semakin tinggi rasio likuiditas perusahaan, maka tindakan untuk mengurangi laba akan makin rendah dengan alasan perusahaan mampu untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya termasuk dalam kewajiban perpajakan. Penelitian Indrajati dkk (2017) menjelaskan bahwa likuiditas signifikan negatif mempengaruhi agresivitas pajak. Hal ini dikarenakan dalam hubungannya dengan pajak, perusahaan yang memiliki likuiditas yang tinggi menunjukkan kemampuan perusahaan yang baik dalam memenuhi utang jangka pendeknya, yang berarti mempunyai hubungan negatif. Semakin tinggi nilai likuiditas perusahaan

semakin rendah nilai *effective tax rate*, yang berarti tingkat agresivitas pajak perusahaan semakin meningkat. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya kemungkinan perusahaan menggunakan aset lancarnya untuk meningkatkan kegiatan operasional perusahaan dalam menghasilkan laba.

4.4.3. Pengaruh *Leverage* Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan pada Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia

Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel independen *leverage* yang diprosikan dengan *debt to asset ratio* (*debt ratio*) (X_2) terlihat bahwa nilai signifikansi pada t_{hitung} sebesar -1,472 adalah sebesar 0,157. Maka nilai $sig > 0,05$ ($0,157 > 0,05$). Sehingga H_0 diterima dan H_2 ditolak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan.

Berdasarkan hasil penelitian, *leverage* yang diprosikan dengan *debt to asset ratio* (*debt ratio*) (X_2) tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan. Hal ini dibuktikan dengan pengujian koefisien regresi secara parsial (uji statistik t) dimana terlihat bahwa nilai signifikansi pada t_{hitung} sebesar -1,472 adalah sebesar 0,157 yang artinya lebih besar dari taraf nyata 0,05 atau ($0,157 > 0,05$). Tidak signifikannya hubungan *leverage* perusahaan terhadap tingkat agresivitas pajak dapat disebabkan karena tingkat *leverage* pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang relatif sama. Hal ini dapat ditunjukkan dengan nilai standar deviasi (*Std. Deviation*) pada hasil analisis statistik deskriptif sebesar 0,14848 lebih kecil dari rata-rata *leverage* perusahaan sub sektor makanan dan minuman yaitu sebesar 0,4329. Selain itu, tinggi rendahnya *leverage* perusahaan tidak akan mempengaruhi tindakan agresif terhadap beban pajak yang harus dibayar karena perusahaan cenderung menjaga hubungan baik dengan investor melalui penyajian laba kena pajak yang selalu stabil sehingga kepercayaan investor tetap terjaga.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurjanah dkk (2018) menjelaskan bahwa *leverage* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap agresivitas pajak. Hal ini dikarenakan tingkat *leverage* pada perusahaan yang relatif sama. Selain itu, tinggi rendahnya *leverage* perusahaan tidak akan mempengaruhi tindakan agresif terhadap beban pajak yang harus dibayar karena perusahaan cenderung menjaga hubungan baik dengan investor melalui penyajian laba kena pajak yang selalu stabil sehingga kepercayaan investor tetap terjaga. Penelitian Indrajati dkk (2017) menjelaskan bahwa *leverage* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap agresivitas pajak. Hal ini dikarenakan ada faktor tertentu yang membuat perusahaan tidak memanfaatkan beban bunga yang timbul dari utang untuk mengurangi beban pajak. Perusahaan memiliki pertimbangan apabila utang yang dimiliki perusahaan terlalu besar, maka resiko yang dihadapi perusahaan juga semakin besar. Selain itu, besarnya jumlah utang yang dimiliki perusahaan dapat

menurunkan kepercayaan investor karena investor menganggap perusahaan tersebut memiliki resiko yang besar. Penelitian Maulana (2020) menjelaskan bahwa *leverage* tidak mempengaruhi agresivitas pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar nilai utang perusahaan maka semakin rendah praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

Tetapi penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Muliastari dan Hidayat (2020) menjelaskan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap agresivitas pajak perusahaan. Hal ini dikarenakan *leverage* merupakan suatu ukuran seberapa besar asset yang dimiliki perusahaan dibiayai oleh utang. *Leverage* merupakan jumlah utang yang dimiliki perusahaan untuk pembiayaan dan dapat mengukur besarnya aktiva yang dibiayai utang. Tingginya ketergantungan perusahaan pada pinjaman atau hutang menunjukkan tingginya tingkat *leverage* perusahaan, sedangkan perusahaan dengan *leverage* rendah membiayai asetnya dengan modal sendiri. Penggunaan hutang akan menimbulkan biaya tetap yaitu beban bunga yang harus dibayar perusahaan. Biaya pembayaran bunga atas hutang perusahaan dapat digunakan sebagai biaya pengurang dalam penentuan penghasilan kena pajak dimana perusahaan akan memiliki nilai *effective tax ratio* (ETR) yang lebih rendah dari tarif penentuan pajak, hal ini tentu menurunkan beban pembiayaan perusahaan. Bunga pinjaman baik yang dibayar maupun yang belum dibayar pada saat jatuh tempo adalah biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan. Penelitian Natalya (2018) menjelaskan bahwa *leverage* berpengaruh signifikan terhadap *tax* agresivitas. Hal ini disebabkan sumber dana yang didapatkan perusahaan tidak hanya berasal dari internal perusahaan, namun juga dapat berasal dari eksternal perusahaan atau biasa dikatakan sebagai hutang perusahaan. Dana yang berasal dari eksternal perusahaan juga bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional dan investasi perusahaan. Semakin tinggi nilai dari rasio *leverage*, berarti semakin tinggi jumlah pendanaan dari hutang yang digunakan perusahaan dan semakin tinggi pula biaya bunga yang timbul dari utang tersebut. Biaya bunga yang semakin tinggi akan memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak perusahaan.

4.4.4. Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan pada Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia

Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel independen komisaris independen (X_3) terlihat bahwa nilai signifikansi pada t_{hitung} sebesar 1,097 adalah sebesar 0,286. Maka nilai $sig > 0,05$ ($0,286 > 0,05$). Sehingga H_0 diterima dan H_3 ditolak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan.

Berdasarkan hasil penelitian, komisaris independen (X_3) tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan. Hal ini dibuktikan dengan pengujian koefisien regresi secara parsial (uji statistik t) dimana terlihat bahwa nilai

signifikansi pada t_{hitung} sebesar 1,097 adalah sebesar 0,286 yang artinya lebih besar dari taraf nyata 0,05 atau ($0,286 > 0,05$). Tidak signifikannya hubungan proporsi komisaris independen terhadap tingkat agresivitas pajak dapat disebabkan juga karena jumlah komisaris independen pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang relatif sama. Dengan melihat hasil analisis statistik deskriptif yang menunjukkan bahwa nilai standar deviasi (*Std. Deviation*) sebesar 0,08154 lebih kecil dari rata-rata komisaris independen perusahaan sub sektor makanan dan minuman yaitu sebesar 0,4198. Selain itu, banyak sedikitnya proporsi komisaris independen yang dimiliki dianggap tidak mampu memberikan pengaruh terhadap tindakan agresivitas pajak yang terjadi di perusahaan. Hal ini dikarenakan komisaris independen juga memiliki keterbatasan dalam menangani masalah yang dihadapi oleh organisasi karena kurangnya informasi yang diperoleh, sehingga komisaris independen tidak bisa melakukan analisis secara lengkap dan mandiri. Di sisi lain adanya penambahan atau pengurangan anggota dewan komisaris hanya untuk memenuhi ketentuan yang ditetapkan.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurjanah dkk (2018) menjelaskan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap agresivitas pajak. Hal ini dikarenakan jumlah komisaris independen pada perusahaan yang relatif sama. Selain itu dalam hasil penelitian Nurjanah dkk (2018) juga memuat teori yang dikemukakan oleh Muntoro (2006) dalam Hidayati (2017) yang menjelaskan bahwa “banyak sedikitnya proporsi komisaris independen yang dimiliki dianggap tidak mampu memberikan pengaruh terhadap tindakan agresivitas pajak yang terjadi di perusahaan. Hal ini dikarenakan komisaris independen juga memiliki keterbatasan dalam menangani masalah yang dihadapi oleh organisasi karena kurangnya informasi yang diperoleh, sehingga komisaris independen tidak bisa melakukan analisis secara lengkap dan mandiri”. Di sisi lain adanya penambahan atau pengurangan anggota dewan komisaris hanya untuk memenuhi ketentuan yang ditetapkan. Penelitian Indrajati dkk (2017) menjelaskan bahwa komisaris independen tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap agresivitas pajak. Hal ini dikarenakan komisaris independen adalah pihak yang tidak terafiliasi dengan perusahaan. Komisaris independen memiliki nilai signifikansi $> 0,05$.

Tetapi penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kartikasari dkk (2017) menjelaskan bahwa komisaris independen berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hal ini disebabkan semakin besar proporsi dewan komisaris independen maka semakin besar pengaruhnya untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja manajemen. Dengan pengawasan yang semakin besar, manajemen akan berhati-hati dalam menjalankan perusahaan sehingga meminimalkan terjadinya penghindaran pajak. Secara proaktif, dewan komisaris independen juga dapat mendorong manajemen untuk mematuhi peraturan perundangan perpajakan yang berlaku. Sehingga kehadiran dewan komisaris dapat

mengurangi perilaku agresif terhadap pajak yang dilakukan manajemen. Penelitian Muliastuti dan Hidayat (2020) menjelaskan bahwa komisaris independen berpengaruh secara signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan. Hal ini disebabkan komisaris independen memiliki peranan penting dalam perusahaan yaitu sebagai pengawas dan mengarahkan agar perusahaan beroperasi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Komisaris independen menjadi penengah antara manajemen perusahaan dan pemilik perusahaan dalam pengambilan keputusan-keputusan strategi atau kebijakan agar tidak melanggar peraturan yang berlaku, hal ini termasuk dalam keputusan perpajakan. Komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang berasal dari luar manajemen perusahaan dan bukan merupakan pegawai perusahaan tersebut tetapi berurusan langsung dengan organisasi dalam perusahaan, perusahaan mengangkat komisaris independen untuk mengawasi bagaimana organisasi dalam perusahaan dijalankan dan dapat menjadi penengah antara komisaris dalam dan pihak pemegang saham apabila terjadi konflik, komisaris independen dipercaya menjadi penengah diantara kedua belah pihak karena bersikap objektif dan memiliki risiko yang kecil dalam konflik internal.

4.4.5. Pengaruh Likuiditas, *Leverage* dan Komisaris Independen Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan pada Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia

Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel independen likuiditas yang diprosikan dengan rasio lancar (*current ratio*) (X_1) terlihat bahwa nilai signifikansi pada t_{hitung} sebesar -1,051 adalah sebesar 0,306. Variabel independen *leverage* yang diprosikan dengan *debt to asset ratio* (*debt ratio*) (X_2) terlihat bahwa nilai signifikansi pada t_{hitung} sebesar -1,472 adalah sebesar 0,157. Variabel independen komisaris independen (X_3) terlihat bahwa nilai signifikansi pada t_{hitung} sebesar 1,097 adalah sebesar 0,286. Adapun secara simultan ketiga variabel independen tersebut memiliki nilai F hitung sebesar 1,174 dengan nilai signifikansi sebesar 0,345. Maka nilai $sig > 0,05$ ($0,345 > 0,05$). Adapun dengan menggunakan tingkat keyakinan 95%, $\alpha = 5\%$, df_1 (jumlah variabel - 1) atau $4-1 = 3$, dan df_2 ($n-k-1$) atau $24-3-1 = 20$, (n adalah jumlah data observasi dan k adalah jumlah variabel independen), sehingga diperoleh F tabel sebesar 3,10 atau F hitung $<$ F tabel ($1,174 < 3,10$). Sehingga H_0 diterima dan H_4 ditolak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa likuiditas, *leverage* dan komisaris independen tidak berpengaruh secara simultan atau bersama-sama terhadap agresivitas pajak perusahaan.

Berdasarkan hasil penelitian, secara simultan likuiditas, *leverage* dan komisaris independen (X_4) tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan. Hal ini dibuktikan dengan nilai R^2 (Koefisien determinasi) mendekati 0. Pada penelitian ini uji koefisien determinasi yaitu nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,022. Maka pengaruh variabel independen yaitu likuiditas, *leverage* dan komisaris independen terhadap variabel dependen yaitu agresivitas pajak perusahaan dikatakan lemah.

Selain itu pada penelitian ini dapat disebabkan karena tingkat likuiditas pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang relatif sama. Hal ini dapat ditunjukkan dengan nilai standar deviasi (*Std. Deviation*) pada hasil analisis statistik deskriptif sebesar 1,27946 lebih kecil dari rata-rata likuiditas perusahaan sub sektor makanan dan minuman yaitu sebesar 2,1408. Nilai standar deviasi yang lebih kecil dari nilai rata-rata menunjukkan bahwa data likuiditas memiliki keragaman data yang kecil.

Tingkat *leverage* pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang relatif sama. Hal ini dapat ditunjukkan dengan nilai standar deviasi (*Std. Deviation*) pada hasil analisis statistik deskriptif sebesar 0,14848 lebih kecil dari rata-rata *leverage* perusahaan sub sektor makanan dan minuman yaitu sebesar 0,4329. Nilai standar deviasi yang lebih kecil dari nilai rata-rata menunjukkan bahwa data *leverage* memiliki keragaman data yang kecil.

Jumlah komisaris independen pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang relatif sama. Dengan melihat hasil analisis statistik deskriptif yang menunjukkan bahwa nilai standar deviasi (*Std. Deviation*) sebesar 0,08154 lebih kecil dari rata-rata komisaris independen perusahaan sub sektor makanan dan minuman yaitu sebesar 0,4198. Nilai standar deviasi yang lebih kecil dari nilai rata-rata menunjukkan bahwa data komisaris independen memiliki keragaman data yang kecil.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menguji apakah likuiditas, *leverage* dan komisaris independen berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2019. Hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Likuiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan. Tidak signifikannya hubungan likuiditas perusahaan terhadap tingkat agresivitas pajak pada penelitian ini dapat disebabkan karena tingkat likuiditas pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang relatif sama. Hal ini dapat ditunjukkan dengan nilai standar deviasi (*Std. Deviation*) pada hasil analisis statistik deskriptif lebih kecil dari rata-rata likuiditas perusahaan sub sektor makanan dan minuman, menggambarkan bahwa perusahaan cenderung menjaga likuiditas pada angka tersebut yang dapat diartikan bahwa perusahaan memiliki kemampuan untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya termasuk kewajiban perpajakannya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tinggi rendahnya likuiditas perusahaan tidak akan mempengaruhi tindakan agresif terhadap beban pajak yang harus dibayar karena perusahaan cenderung menjaga likuiditas pada kondisi tertentu untuk meningkatkan kepercayaan investor.
2. *Leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan. Tidak signifikannya hubungan *leverage* perusahaan terhadap tingkat agresivitas pajak dapat disebabkan karena tingkat *leverage* pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang relatif sama. Hal ini dapat ditunjukkan dengan nilai standar deviasi (*Std. Deviation*) pada hasil analisis statistik deskriptif lebih kecil dari rata-rata *leverage* perusahaan sub sektor makanan dan minuman, Selain itu, tinggi rendahnya *leverage* perusahaan tidak akan mempengaruhi tindakan agresif terhadap beban pajak yang harus dibayar karena perusahaan cenderung menjaga hubungan baik dengan investor melalui penyajian laba kena pajak yang selalu stabil sehingga kepercayaan investor tetap terjaga.
3. Komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan. Tidak signifikannya hubungan proporsi komisaris independen terhadap tingkat agresivitas pajak dapat disebabkan juga karena jumlah komisaris independen pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang relatif sama. Dengan melihat hasil analisis statistik deskriptif yang menunjukkan bahwa nilai standar deviasi (*Std. Deviation*) lebih kecil dari rata-rata komisaris independen perusahaan sub sektor makanan dan minuman, Selain itu, banyak sedikitnya proporsi komisaris independen yang dimiliki dianggap tidak mampu

memberikan pengaruh terhadap tindakan agresivitas pajak yang terjadi di perusahaan. Hal ini

4. dikarenakan komisaris independen juga memiliki keterbatasan dalam menangani masalah yang dihadapi oleh organisasi karena kurangnya informasi yang diperoleh, sehingga komisaris independen tidak bisa melakukan analisis secara lengkap dan mandiri. Di sisi lain adanya penambahan atau pengurangan anggota dewan komisaris hanya untuk memenuhi ketentuan yang ditetapkan.
5. Likuiditas, *leverage* dan komisaris independen tidak berpengaruh secara simultan atau bersama-sama terhadap agresivitas pajak perusahaan.

5.2. Saran

Beberapa saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti selanjutnya
Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk mengganti variabel-variabel penelitian selain likuiditas, *leverage* dan komisaris independen. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan jumlah sampel yang lebih banyak dan tahun yang lebih lama agar dapat menghasilkan pengaruh yang signifikan. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan contoh perusahaan yang lain.
2. Bagi perusahaan
Perusahaan diharapkan agar tetap dapat menjaga tingkat likuiditas yang dimiliki karena dengan demikian perusahaan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Perusahaan diharapkan agar tetap dapat menjaga hubungan baik dengan investor melalui penyajian laba kena pajak yang selalu stabil sehingga kepercayaan investor tetap terjaga. Perusahaan diharapkan agar tetap dapat menjaga tingkat *leverage* yang dimiliki karena mengetahui pengambilan keputusan penggunaan sumber dana ke depan yaitu menggunakan modal sendiri atau modal pinjaman (utang). *Leverage* yang tinggi menunjukkan perusahaan memiliki risiko keuangan dan risiko gagal bayar yang tinggi. Perusahaan harus meningkatkan kinerja perusahaan tiap tahunnya agar perusahaan bisa meningkatkan profitabilitas dan tidak mengalami kesulitan dalam membiayai pengeluaran atau beban perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisamartha, I. B. P. F., & Noviari, N. (2015). Pengaruh Likuiditas, Leverage, Intensitas Persediaan dan Intensitas Aset Tetap pada Tingkat Agresivitas Wajib Pajak Badan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 13(3), 973–1000. Tersedia di: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/14496> [Diakses pada 27 November 2020].
- Andrean, D. (2018). Pengaruh Manajemen Laba, Corporate Governance dan Financial Leverage Terhadap Agresivitas Pajak [Islam Negeri Syarif Hidayatullah]. In *Journal of Materials Processing Technology* (Vol. 1, Issue 1). Tersedia di: <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/39664> [Diakses pada 1 Mei 2021].
- Anita, F. (2015). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Leverage, Likuiditas dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Real Estate dan Property yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2013). *JOM FEKON*, 2(2), 1–15. Tersedia di: <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFEKON/article/view/9167> [Diakses pada 1 Mei 2021].
- Ardyansah, D., & Zulaikha. (2014). Pengaruh Size, Leverage, Profitability, Capital Intensity Ratio dan Komisaris Independen Terhadap Effective Tax Rate (ETR). *Diponegoro Journal of Accounting*, 3(2), 1–9. Tersedia di: <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/6110> [Diakses pada 27 November 2020].
- Dharmayanti, N. (2019). Pengaruh Likuiditas, Leverage dan Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Termasuk dalam LQ45 pada Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2013-2017). *Simposium Nasional Multidisiplin (SinaMu)*, 1–14. Tersedia di: <http://jurnal.umt.ac.id/index.php/senamu/article/view/2143> [Diakses pada 31 Agustus 2020].
- Dinar, M., Yuesti, A., & Dewi, N. P. S. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas dan Leverage Terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI. *Jurnal Kharisma*, 2(1), 66–76. Tersedia di: <https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/kharisma/article/view/734> [Diakses pada 31 Agustus 2020].
- Fadli, I. (2016). Pengaruh Likuiditas, Leverage, Komisaris Independen, Manajemen Laba, dan Kepemilikan Institusional Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2013). *JOM Fekon*, 3(1), 1205–1219. Tersedia di:

<https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFEKON/article/view/11451> [Diakses pada 31 Agustus 2020].

- Fahrani, M., Nurlaela, S., & Chomsatu, Y. (2018). Pengaruh Kepemilikan Terkonsentrasi, Ukuran Perusahaan, Leverage, Capital Intensity dan Inventory Intensity Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Ekonomi Paradigma*, 19(02), 52–60. Tersedia di: <https://journal.uniba.ac.id/index.php/PRM/article/view/7> [Diakses pada 31 Agustus 2020].
- Fitriyawati, D. S. (2018). Pengaruh Karakteristik Eksekutif dan Dewan Komisaris Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2018). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 8(1), 1–24. Tersedia di: <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/6369> [Diakses pada 31 Agustus 2020].
- Hanim, H., & Fatahurrazak. (2018). Pengaruh Dewan Komisaris, Komisaris Independen, dan Kompensasi Dewan Komisaris dan Direksi Terhadap Tindakan Agresivitas Pajak pada Perusahaan Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2016 The Effect of The Board of Commisii. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Finansial Indonesia*, 1(2), 37–50. <https://doi.org/https://doi.org/10.31629/jiafi.v1i2.1243>. Tersedia di: <https://ojs.umrah.ac.id/index.php/jiafi/article/view/1243> [Diakses pada 28 Januari 2021].
- Hidayat, K., Ompusunggu, A. P., & Suratno, H. (2016). Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak Dengan Insentif Pajak Sebagai Pemoderasi (Studi pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di BEI). *JIAFE (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi)*, 2(2), 39–58. <https://doi.org/10.34204/jiafe.v2i2.543>. Tersedia di: <https://journal.unpak.ac.id/index.php/jiafe/article/view/543> [Diakses pada 2 Maret 2021].
- Indrajati, D., Djumena, S., & Yuniarwati. (2017). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Agresivitas Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI 2013–2015. *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 1(1), 125–134. <https://doi.org/10.24912/jmieb.v1i1.415>. Tersedia di: <https://journal.untar.ac.id/index.php/jmieb/article/view/415> [Diakses pada 27 November 2020].
- Indriawati, W. F. (2017). Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Kepemilikan Institusional Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderating. In *Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi*. Universitas Negeri Semarang.

- Kandaka, & Pratiwi, R. (2019). Pengaruh Komite Audit, Likuiditas, Leverage dan Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak (Studi pada Perusahaan Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2017). *STIE Multi Data Palembang*, 3(4), 56–73. Tersedia di: <https://core.ac.uk/download/pdf/187738889.pdf> [Diakses pada 31 Agustus 2020].
- Kartikasari, W., Munthe, I. L. S., & Fatahurrazak. (2017). Pengaruh Manajemen Laba, Return On Asset, Current Ratio, dan Komisaris Independen Terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2016. *Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Maritim Raja Ali Haji*, 1–20. <http://repository.umrah.ac.id/id/eprint/470>. Tersedia di: <http://repository.umrah.ac.id/470/> [Diakses pada 31 Agustus 2020].
- Kholis, N., K, I. A. K. R., & Mutmainah, H. (2020). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Agresivitas Pajak Perusahaan Pertambangan di Indonesia. *Jurnal Visi Manajemen*, 5(2), 777–791. Tersedia di: <http://stiepari.greenfrogs-ts.co.id/jurnal/index.php/JVM/article/view/194> [Diakses pada 31 Agustus 2020].
- Maulana, I. A. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Agresivitas Pajak pada Perusahaan Properti dan Real Estate. *Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 11(2), 155–163. <https://doi.org/https://doi.org/10.22225/kr.11.2.1178.155-163>. Tersedia di: <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/krisna/article/view/1178> [Diakses pada 31 Agustus 2020].
- Muliasari, R., & Hidayat, A. (2020). Pengaruh Likuiditas, Leverage dan Komisaris Independen Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan. *SULTANIST: Jurnal Manajemen Dan Keuangan*, 8(1), 28–36. <https://doi.org/https://doi.org/10.37403/sultanist.v8i1.183>. Tersedia di: <https://sultanist.ac.id/index.php/sultanist/article/view/183> [Diakses pada 31 Agustus 2020].
- Muliawati, I. A. P. Y., & Karyada, I. P. F. (2020). Pengaruh Leverage dan Capital Intensity Terhadap Agresivitas Pajak Dengan Komisaris Independen Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industry Barang dan Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018). *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 1(1), 495–524. Tersedia di: <https://ejournal.unhi.ac.id/index.php/HAK/article/view/788> [Diakses pada 31 Agustus 2020].
- Musthofa, F., Sofianty, D., & Nurcholisah, K. (2019). Pengaruh Likuiditas dan Leverage Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan

- Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi di Bursa Efek Indonesia 2013-2017). *Prosiding Akuntansi*, 5(2), 618–623. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29313/v0i0.19113>. Tersedia di: <http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/19113> [Diakses pada 31 Agustus 2020].
- Natalya, D. (2018). Pengaruh Capital Intensity, Leverage dan Profitabilitas Terhadap Tax Agresivitas Dengan Kinerja Pasar Sebagai Variabel Moderating. *Media Akuntansi Perpajakan*, 3(1), 37–55. Tersedia di: <http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/MAP/article/view/1260> [Diakses pada 31 Agustus 2020].
- Nurjanah, I., Hanum, A. N., & Alwiyah. (2018). Pengaruh Likuiditas, Leverage, Corporate Social Responsibility, Ukuran Perusahaan dan Komisaris Independen Terhadap Agresivitas Pajak Badan. *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, 1, 432–438. Tersedia di: <https://prosiding.unimus.ac.id/index.php/mahasiswa/article/view/182> [Diakses pada 31 Agustus 2020].
- Putri, L. T. Y. (2014). *Pengaruh Likuiditas, Manajemen Laba dan Corporate Governance Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar di BEI Periode 2008-2012)*. *Jurnal Akuntansi*, 2(3), 1–25. Tersedia di: <http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/view/1544/1167> [Diakses pada 31 Agustus 2020].
- Ramadani, D. C., & Hartiyah, S. (2020). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Leverage, Likuiditas, Ukuran Perusahaan, dan Komisaris Independen Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014 sampai 2018). *Journal of Economic, Business and Engineering (JEBE)*, 1(2), 238–247. Tersedia di: <https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/jebe/article/view/1219> [Diakses pada 31 Agustus 2020].
- Rejeki, D. (2019). Pengaruh Manajemen Laba, Likuiditas dan Corporate Social Responsibility (Csr) Terhadap Agresivitas Pajak Dengan Kepemilikan Mayoritas Sebagai Variabel Moderating. In *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi*. Universitas Negeri Semarang. Tersedia di: <http://lib.unnes.ac.id/33312/> [Diakses pada 31 Agustus 2020].
- Savitri, D. A. M., & Rahmawati, I. N. (2017). Pengaruh Leverage, Intensitas Persediaan, Intensitas Aset Tetap, dan Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi Terapan (JIMAT)*, 8(2), 19–32. Tersedia di: <http://jurnal.stietotalwin.ac.id/index.php/jimat/article/view/142> [Diakses pada 29 Agustus 2020].

- Sukmawati, F., & Rebecca, C. (2016). Pengaruh Likuiditas dan Leverage Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan pada Perusahaan Industri Barang Konsumsi di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2014. *Conference on Management and Behavioral Studies*, 498–509.
- Sulistyaningsih, D. (2019). Pengaruh Likuiditas, Intensitas Persediaan, Leverage, Intensitas Aset Tetap, Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Barang dan Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2016). In *Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta*. <http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/72246>. Tersedia di: <http://eprints.ums.ac.id/72246/> [Diakses pada 31 Agustus 2020].
- Suprimarini, N. P. D., & Suprasto, B. (2017). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Kualitas Audit, dan Kepemilikan Institusional pada Agresivitas Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 19(2), 1349–1377. Tersedia di: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/28253> [Diakses pada 1 Desember 2020].
- Suyanto, K. D., & Supramono. (2012). Likuiditas, Leverage, Komisaris Independen, dan Manajemen Laba Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 16(2), 167–177. <http://jurkubank.wordpress.com>. Tersedia di: <http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jkdp/article/view/1057> [Diakses pada 25 Agustus 2020].
- Tiaras, I., & Wijaya, H. (2015). Pengaruh Likuiditas, Leverage, Manajemen Laba, Komisaris Independen dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Akuntansi*, XIX(03), 380–397. <https://doi.org/10.24912/ja.v19i3.87>. Tersedia di: <https://www.neliti.com/id/publications/76040/pengaruh-likuiditas-leverage-manajemen-laba-komisaris-independen-dan-ukuran-peru> [Diakses pada 31 Agustus 2020].
- Wijaya, D., & Saebani, A. (2019). Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility, Leverage, dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Agresivitas Pajak. *Widyakala Journal*, 6(1), 55–76. <https://doi.org/10.36262/widyakala.v6i1.147>. Tersedia di: http://www.ojs.upj.ac.id/index.php/journal_widya/article/view/147 [Diakses pada 31 Agustus 2020].
- Alijoyo, Antonius dan Subarto Zaini. 2004. *Komisaris Independen Penggerak Praktik GCG di Perusahaan*. Jakarta: PT Indeks.
- Fahmi, Irham. 2020. *Analisis Laporan Keuangan*. Bandung: Alfabeta.
- Ghozali, Imam. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25 Edisi 9*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Hanafi, Mamduh M dan Abdul Halim. 2016. *Analisis Laporan Keuangan Edisi Kelima*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Kasmir. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Edisi Revisi*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan Edisi 2019*. Yogyakarta: ANDI.
- Panduan Praktis SPSS Olah Data dan Interpretasi*. Universitas Pakuan.
- Pohan, C.A. (2016). *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis Edisi Revisi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sugiono, Arief dan Edi Untung. 2016. *Panduan Praktis Dasar Analisa Laporan Keuangan*. Jakarta: PT Grasindo.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor : Kep-305/BEJ/07-2004. Tersedia di https://www.martinaberto.co.id/download/Peraturan_Bursa/Peraturan_I-A_Pencatatan_Saham.pdf [Diakses pada 31 Januari 2021].
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33 /POJK.04/2014. Tersedia di <http://aaui.or.id/wp-content/uploads/2018/08/POJK-33-2014-DIREKSI--DEWAN-KOMISARIS-EMITEN-ATAU-PERUSAHAAN-PUBLIK.pdf> [Diakses pada 30 Januari 2021].
- <https://hot.liputan6.com/read/4095338/ciri-ciri-pajak-yang-berlaku-di-indonesia-kenali-lebih-dalam> [Diakses pada 10 Januari 2021].
- https://id.wikipedia.org/wiki/Penghindaran_pajak [Diakses pada 10 Januari 2021].
- <https://news.ddtc.co.id/transparansi-pajak-solusi-atas-penghindaran-pajak-perusahaan-20328> [Diakses pada 10 Januari 2021].
- <https://www.cermati.com/artikel/pengertian-pajak-fungsi-dan-jenis-jenisnya> [Diakses pada 8 Februari 2021].
- <https://www.cermati.com/artikel/pahami-apa-itu-likuiditas-aspek-terpenting-dalam-perusahaan> [Diakses pada 28 Januari 2021].
- <https://news.ddtc.co.id/beda-penghindaran--penggelapan-pajak-hanya-setebal-dinding-penjara-19991> [Dakses pada 2 Februari 2021].

<https://finata.id/pengertian-leverage/> [Diakses pada 20 November 2020].

<https://www.maxmanroe.com/vid/finansial/pengertian-leverage.html> [Diakses pada 20 November 2020].

<https://www.jurnal.id/id/blog/pentingnya-likuiditas-perusahaan/> [Diakses pada 20 November 2020].

<https://www.jojonomic.com/blog/likuiditas/> [Diakses pada 20 November 2020].

<https://www.edusaham.com/2019/02/pengertian-komisaris-independen-beserta-tugas-tanggung-jawab.html> [Diakses pada 20 November 2020].

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/01/30/industri-makanan-dan-minum-tumbuh-di-atas-pdb-nasional> [Diakses pada 28 Desember 2020].

<https://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-01316389/pertumbuhan-industri-makanan-dan-minuman-sumbang-635-terhadap-pdb-nasional> [Diakses pada 28 Desember 2020].

<https://www.sahamok.net/emiten/sektor-industri-barang-konsumsi/sub-sektor-makanan-minuman/> [Diakses pada 5 Februari 2021].

<https://www.idx.co.id/perusahaan-tercatat/laporan-keuangan-dan-tahunan/> [Diakses pada 15 Februari 2021].

<https://www.idnfinancials.com/id/> [Diakses pada 17 Februari 2021].

<https://www.invesnesia.com/perusahaan-makanan-dan-minuman-di-bei> [Diakses pada 21 Februari 2021].

<https://www.spssindonesia.com/2017/03/autokorelasi-dengan-uji-run-test-spss.html> [Diakses pada 6 Maret 2021].

<https://www.pajak.go.id/id/undang-undang-nomor-36-tahun-2008> [Diakses pada 10 Maret 2021].

<https://ekonomi.bunghatta.ac.id/index.php/id/artikel/1469-agresivitas-pajak-simak-pemahaman-dan-risikonya> [Diakses pada 18 Juni 2021].

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ratu Alfiyya Rafiana

Alamat : Perum. Griya Cileungsi Asri Jl. Haji Satibi
Blok B No. 05 RT 004/RW 007 Kampung
Rawa Hingkik Desa Cileungsi Kecamatan
Cileungsi Kabupaten Bogor Kode Pos
16820

Tempat dan tanggal lahir : Bogor, 10 Juli 1999

Agama : Islam

Pendidikan

- SD : SD ABDI NEGARA BEKASI TIMUR
- SMP : SMP NEGERI 1 CILEUNGSI
- SMA : SMA NEGERI 2 CILEUNGSI
- Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS PAKUAN

Bogor, September 2021

Peneliti,

(Ratu Alfiyya Rafiana)

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Populasi Penelitian pada Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2016-2019

No.	Kode Perusahaan	Nama Perusahaan
1.	ADES	Akasha Wira International Tbk
2.	AISA	Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk
3.	ALTO	Tri Banyan Tirta Tbk
4.	BTEK	Bumi Teknokultura Unggul Tbk
5.	BUDI	Budi Starch & Sweetener Tbk
6.	CAMP	Campina Ice Cream Tbk
7.	CEKA	Wilmar Cahaya Indonesia Tbk
8.	CLEO	Sariguna Primatirta Tbk
9.	COCO	Wahana Interfood Nusantara Tbk
10.	DLTA	Delta Djakarta Tbk
11.	DMND	Diamond Food Indonesia Tbk
12.	FOOD	Sentra Food Indonesia Tbk
13.	GOOD	Garudafood Putra Putri Jaya Tbk
14.	HOKI	Buyung Poetra Sembada Tbk
15.	ICBP	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
16.	IIKP	Inti Agri Resources Tbk
17.	IKAN	Era Mandiri Cemerlang Tbk
18.	INDF	Indofood Sukses Makmur Tbk
19.	KEJU	Mulia Boga Raya Tbk
20.	MGNA	Magna Investama Mandiri Tbk
21.	MLBI	Multi Bintang Indonesia Tbk
22.	MYOR	Mayora Indah Tbk
23.	PANI	Pratama Abadi Nusa Industri Tbk
24.	PCAR	Prima Cakrawala Abadi Tbk

25.	PSDN	Prasidha Aneka Niaga Tbk
26.	PSGO	Palma Serasih Tbk
27.	ROTI	Nippon Indosari Corpindo Tbk
28.	SKBM	Sekar Bumi Tbk
29.	SKLT	Sekar Laut Tbk
30.	STTP	Siantar Top Tbk
31.	TBLA	Tunas Baru Lampung Tbk
32.	ULTJ	Ultra Jaya Milk Industry & Trading Company Tbk

Lampiran 2 Sampel Penelitian pada Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2016-2019

No.	Kode Perusahaan	Nama Perusahaan
1.	ICBP	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
2.	INDF	Indofood Sukses Makmur Tbk
3.	MLBI	Multi Bintang Indonesia Tbk
4.	MYOR	Mayora Indah Tbk
5.	SKLT	Sekar Laut Tbk
6.	ULTJ	Ultra Jaya Milk Industry & Trading Company Tbk

Lampiran 3 Laporan Keuangan Rasio Lancar (*Current Ratio*)

Nama Perusahaan	Tahun	Aktiva Lancar (<i>Current Assets</i>)	Utang Lancar (<i>Current Liabilities</i>)	CR
		(Dalam Jutaan Rupiah)		
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	2016	Rp 15.571.362	Rp 6.469.785	2,41
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	2017	Rp 16.579.331	Rp 6.827.588	2,43
Indofood CBP Sukses	2018	Rp 14.121.568	Rp 7.235.398	1,95

Makmur Tbk				
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	2019	Rp 16.624.925	Rp 6.556.359	2,54
Indofood Sukses Makmur Tbk	2016	Rp 28.985.443	Rp 19.219.441	1,51
Indofood Sukses Makmur Tbk	2017	Rp 32.515.399	Rp 21.637.763	1,50
Indofood Sukses Makmur Tbk	2018	Rp 33.272.618	Rp 31.204.102	1,07
Indofood Sukses Makmur Tbk	2019	Rp 31.403.445	Rp 24.686.862	1,27
Multi Bintang Indonesia Tbk	2016	Rp 901.258	Rp 1.326.261	0,68
Multi Bintang Indonesia Tbk	2017	Rp 1.076.845	Rp 1.304.114	0,83
Multi Bintang Indonesia Tbk	2018	Rp 1.228.961	Rp 1.578.919	0,78
Multi Bintang Indonesia Tbk	2019	Rp 1.162.802	Rp 1.588.693	0,73
Mayora Indah Tbk	2016	Rp 8.739.782	Rp 3.884.051	2,25
Mayora Indah Tbk	2017	Rp 10.674.199	Rp 4.473.628	2,39
Mayora Indah Tbk	2018	Rp 12.647.858	Rp 4.764.510	2,65
Mayora Indah Tbk	2019	Rp 12.776.102	Rp 3.726.359	3,43
Sekar Laut Tbk	2016	Rp 222.686	Rp 169.302	1,32

Sekar Laut Tbk	2017	Rp 267.129	Rp 211.493	1,26
Sekar Laut Tbk	2018	Rp 356.735	Rp 291.349	1,22
Sekar Laut Tbk	2019	Rp 378.352	Rp 293.281	1,29
Ultra Jaya Milk Industry & Trading Company Tbk	2016	Rp 2.874.821	Rp 593.525	4,84
Ultra Jaya Milk Industry & Trading Company Tbk	2017	Rp 3.439.990	Rp 820.625	4,19
Ultra Jaya Milk Industry & Trading Company Tbk	2018	Rp 2.793.521	Rp 635.161	4,40
Ultra Jaya Milk Industry & Trading Company Tbk	2019	Rp 3.716.641	Rp 836.314	4,44

Lampiran 4 Laporan Keuangan *Debt to Asset Ratio (Debt Ratio)*

Nama Perusahaan	Tahun	<i>Total Debt</i>	<i>Total Assets</i>	DAR
		(Dalam Jutaan Rupiah)		
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	2016	Rp 10.401.125	Rp 28.901.948	0,36
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	2017	Rp 11.295.184	Rp 31.619.514	0,36
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	2018	Rp 11.660.003	Rp 34.367.153	0,34

Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	2019	Rp 12.038.210	Rp 38.709.314	0,31
Indofood Sukses Makmur Tbk	2016	Rp 38.233.092	Rp 82.174.515	0,47
Indofood Sukses Makmur Tbk	2017	Rp 41.182.764	Rp 87.939.488	0,47
Indofood Sukses Makmur Tbk	2018	Rp 46.620.996	Rp 96.537.796	0,48
Indofood Sukses Makmur Tbk	2019	Rp 41.996.071	Rp 96.198.559	0,44
Multi Bintang Indonesia Tbk	2016	Rp 1.454.398	Rp 2.275.038	0,64
Multi Bintang Indonesia Tbk	2017	Rp 1.445.173	Rp 2.510.078	0,58
Multi Bintang Indonesia Tbk	2018	Rp 1.721.965	Rp 2.889.501	0,60
Multi Bintang Indonesia Tbk	2019	Rp 1.750.943	Rp 2.896.950	0,60
Mayora Indah Tbk	2016	Rp 6.657.165	Rp 12.922.421	0,52
Mayora Indah Tbk	2017	Rp 7.561.503	Rp 14.915.849	0,51
Mayora Indah Tbk	2018	Rp 9.049.161	Rp 17.591.706	0,51
Mayora Indah Tbk	2019	Rp 9.137.978	Rp 19.037.918	0,48
Sekar Laut Tbk	2016	Rp 272.088	Rp 568.239	0,48
Sekar Laut Tbk	2017	Rp 328.714	Rp 636.284	0,52

Sekar Laut Tbk	2018	Rp 408.057	Rp 747.293	0,55
Sekar Laut Tbk	2019	Rp 410.463	Rp 790.845	0,52
Ultra Jaya Milk Industry & Trading Company Tbk	2016	Rp 749.966	Rp 4.239.199	0,18
Ultra Jaya Milk Industry & Trading Company Tbk	2017	Rp 978.185	Rp 5.186.940	0,19
Ultra Jaya Milk Industry & Trading Company Tbk	2018	Rp 780.915	Rp 5.555.871	0,14
Ultra Jaya Milk Industry & Trading Company Tbk	2019	Rp 953.283	Rp 6.608.422	0,14

Lampiran 5 Laporan Keuangan Komisaris Independen

Nama Perusahaan	Tahun	Total Komisaris Independen	Total Dewan Komisaris	KI
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	2016	3	6	0,50
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	2017	3	6	0,50
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	2018	3	6	0,50
Indofood	2019	3	6	0,50

CBP Sukses Makmur Tbk				
Indofood Sukses Makmur Tbk	2016	3	8	0,38
Indofood Sukses Makmur Tbk	2017	3	8	0,38
Indofood Sukses Makmur Tbk	2018	3	8	0,38
Indofood Sukses Makmur Tbk	2019	3	8	0,38
Multi Bintang Indonesia Tbk	2016	4	7	0,57
Multi Bintang Indonesia Tbk	2017	3	6	0,50
Multi Bintang Indonesia Tbk	2018	3	6	0,50
Multi Bintang Indonesia Tbk	2019	4	7	0,57
Mayora Indah Tbk	2016	2	5	0,40
Mayora Indah Tbk	2017	2	5	0,40
Mayora Indah Tbk	2018	2	5	0,40
Mayora Indah Tbk	2019	2	5	0,40
Sekar Laut Tbk	2016	1	3	0,33
Sekar Laut Tbk	2017	1	3	0,33

Sekar Laut Tbk	2018	1	3	0,33
Sekar Laut Tbk	2019	1	3	0,33
Ultra Jaya Milk Industry & Trading Company Tbk	2016	1	3	0,33
Ultra Jaya Milk Industry & Trading Company Tbk	2017	1	3	0,33
Ultra Jaya Milk Industry & Trading Company Tbk	2018	1	3	0,33
Ultra Jaya Milk Industry & Trading Company Tbk	2019	2	4	0,50

Lampiran 6 Laporan Keuangan ETR (*Effective Tax Rate*)

Nama Perusahaan	Tahun	Beban Pajak Penghasilan	Pendapatan Sebelum Pajak	ETR
		(Dalam Jutaan Rupiah)		
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	2016	Rp 1.357.953	Rp 4.989.254	0,27
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	2017	Rp 1.663.388	Rp 5.206.561	0,32
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	2018	Rp 1.788.004	Rp 6.446.785	0,28
Indofood	2019	Rp 2.076.943	Rp 7.436.972	

CBP Sukses Makmur Tbk				0,28
Indofood Sukses Makmur Tbk	2016	Rp 2.532.747	Rp 7.385.228	0,34
Indofood Sukses Makmur Tbk	2017	Rp 2.513.491	Rp 7.658.554	0,33
Indofood Sukses Makmur Tbk	2018	Rp 2.485.115	Rp 7.446.966	0,33
Indofood Sukses Makmur Tbk	2019	Rp 2.846.668	Rp 8.749.397	0,33
Multi Bintang Indonesia Tbk	2016	Rp 338.057	Rp 1.320.186	0,26
Multi Bintang Indonesia Tbk	2017	Rp 457.953	Rp 1.780.020	0,26
Multi Bintang Indonesia Tbk	2018	Rp 447.105	Rp 1.671.912	0,27
Multi Bintang Indonesia Tbk	2019	Rp 420.553	Rp 1.626.612	0,26
Mayora Indah Tbk	2016	Rp 457.007	Rp 1.845.683	0,25
Mayora Indah Tbk	2017	Rp 555.930	Rp 2.186.884	0,25
Mayora Indah Tbk	2018	Rp 621.507	Rp 2.381.942	0,26
Mayora Indah Tbk	2019	Rp 665.062	Rp 2.704.466	0,25
Sekar Laut Tbk	2016	Rp 4.520.085	Rp 25.166.206	0,18
Sekar Laut Tbk	2017	Rp 4.399.850	Rp 27.370.565	0,16

Sekar Laut Tbk	2018	Rp 7.613.548	Rp 39.567.679	0,19
Sekar Laut Tbk	2019	Rp 11.838.578	Rp 56.782.206	0,21
Ultra Jaya Milk Industry & Trading Company Tbk	2016	Rp 222.657	Rp 932.482	0,24
Ultra Jaya Milk Industry & Trading Company Tbk	2017	Rp 314.550	Rp 1.026.231	0,31
Ultra Jaya Milk Industry & Trading Company Tbk	2018	Rp 247.411	Rp 949.018	0,26
Ultra Jaya Milk Industry & Trading Company Tbk	2019	Rp 339.494	Rp 1.375.359	0,25

Lampiran 7 Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Y	24	0,16	0,34	0,2642	0,04772
X1	24	0,68	4,84	2,1408	1,27946
X2	24	0,14	0,64	0,4329	0,14848
X3	24	0,33	0,57	0,4198	0,08154
Valid N (listwise)	24				

Lampiran 8 Hasil Uji Normalitas dengan *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test*

		Unstandardized Residual
N		24
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	0,04400701
Most Extreme Differences	Absolute	0,136
	Positive	0,111
	Negative	-0,136
Test Statistic		0,136
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Lampiran 9 Hasil Uji Multikolonieritas

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	0,330	0,109		3,033	0,007		
	X1	-0,017	0,016	-0,452	-1,051	0,306	0,230	4,339
	X2	-0,201	0,136	-0,625	-1,472	0,157	0,236	4,237
	X3	0,137	0,125	0,234	1,097	0,286	0,935	1,070

a. Dependent Variable: Y

Lampiran 10 Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan Spearman's Rho

Correlations

			X1	X2	X3	Unstandardized Residual
Spearman's rho	X1	Correlation Coefficient	1,000	-0,815**	-0,213	0,030
		Sig. (2-tailed)	.	0,000	0,318	0,888
		N	24	24	24	24
	X2	Correlation Coefficient	-0,815**	1,000	0,222	-0,066
		Sig. (2-tailed)	0,000	.	0,297	0,758
		N	24	24	24	24
	X3	Correlation Coefficient	-0,213	0,222	1,000	0,095
		Sig. (2-tailed)	0,318	0,297	.	0,657
		N	24	24	24	24
Unstandardized Residual	Correlation Coefficient	0,030	-0,066	0,095	1,000	
	Sig. (2-tailed)	0,888	0,758	0,657	.	
	N	24	24	24	24	

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Lampiran 11 Hasil Uji Autokorelasi dengan Durbin - Watson (DW Test)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	0,387 ^a	0,150	0,022	0,04719	0,766

a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Lampiran 12 Durbin Watson Test Bound

	K=3	
n	Dl	du
24	1,1010	1,6565
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
6	0	0

Lampiran 13 Hasil Uji Autokorelasi dengan Run Test

Runs Test

	Unstandardized Residual
Test Value ^a	-0,00783
Cases < Test Value	12
Cases >= Test Value	12
Total Cases	24
Number of Runs	11
Z	-0,626
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,531

a. Median

Lampiran 14 Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	0,330	0,109		3,033	0,007
	X1	-0,017	0,016	-0,452	-1,051	0,306
	X2	-0,201	0,136	-0,625	-1,472	0,157
	X3	0,137	0,125	0,234	1,097	0,286

a. Dependent Variable: Y

Lampiran 15 Hasil Uji Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji Statistik t)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	0,330	0,109		3,033	0,007
	X1	-0,017	0,016	-0,452	-1,051	0,306
	X2	-0,201	0,136	-0,625	-1,472	0,157
	X3	0,137	0,125	0,234	1,097	0,286

a. Dependent Variable: Y

Lampiran 16 Hasil Uji Koefisien Regresi Secara Simultan (Uji Statistik F)

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	0,008	3	0,003	1,174	0,345 ^b
	Residual	0,045	20	0,002		
	Total	0,052	23			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X3, X2, X1

Lampiran 17 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)**Model Summary^b**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,387 ^a	0,150	0,022	0,04719

a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Lampiran 18 Koreksi Fiskal terhadap Laporan Keuangan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk Tahun 2019 (Dalam Jutaan Rupiah)

Uraian	Komersial	Koreksi Fiskal		Fiskal
		Positif	Negatif	
PENJUALAN BERSIH	42,296,703			42,296,703
Beban pokok penjualan	(27,892,690)			(27,892,690)
LABA KOTOR	14,404,013			14,404,013
BEBAN USAHA				
Beban Penjualan dan distribusi				
Iklan dan promosi	(1,543,623)			(1,543,623)
Pengangkutan dan penanganan	(1,194,804)			(1,194,804)
Gaji, upah dan imbalan kerja karyawan	(600,838)			(600,838)
Distribusi	(455,566)			(455,566)
Beban royalti	(404,302)	404,302		0
Barang rusak	(252,338)			(252,338)
Sewa dan penyusutan	(182,030)			(182,030)
Lain-lain masing-masing dibawah Rp 65.000	(372,743)	372,743		0
Jumlah beban penjualan	(5,006,244)			(4,229,199)
Biaya Umum dan Administrasi				
Gaji	(1,053,020)			(1,053,020)
Sumbangan dan representasi	(309,797)	309,797		0
Sewa dan penyusutan	(179,407)			(179,407)
Utilitas, perbaikan dan pemeliharaan	(125,741)			(125,741)
Outsourcing	(91,844)			(91,844)
Jasa manajemen	(91,415)			(91,415)
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 65.000)	(268,403)	268,403		0
Jumlah Biaya Umum dan Administrasi	(2,119,627)			(1,541,427)
Jumlah Beban Usaha	(7,125,871)			(5,770,626)
LABA USAHA	7,278,142			8,633,387
Pendapatan (Beban) Lain-lain				
Penjualan barang bekas	188,681			188,681
Penghasilan jasa teknik	90,838			90,838
Lain-lain masing-masing di bawah Rp 30.000	154,738	154,738		0
Amortisasi aset tak berwujud	(133,238)			(133,238)
Rugi selisih kurs	(125,112)			(125,112)
Penyisihan penurunan nilai aset	(42,788)			(42,788)
Lain-lain di bawah 25.000	11,144	11,144		22,288
Beban Bunga	(161,444)	55,599.20		(105,845)
Penghasilan bunga	277,996		(277,996)	0

Lampiran 19 Koreksi Fiskal terhadap Laporan Keuangan PT Indofood Sukses
Makmur Tbk Tahun 2019 (Dalam Jutaan Rupiah)

Uraian	Komersial	Koreksi Fiskal		Fiskal
		Positif	Negatif	
PENJUALAN BERSIH	76,592,955			76,592,955
Beban pokok penjualan	(53,876,594)			(53,876,594)
LABA KOTOR	22,716,361			22,716,361
BEBAN USAHA				
Beban Penjualan dan distribusi				
Iklan dan promosi	(1,697,366)			(1,697,366)
Pengangkutan dan penanganan	(2,540,079)			(2,540,079)
Gaji, upah dan imbalan kerja karyawan	(1,608,483)	347,667		(1,260,816)
Outsourcing	(527,333)			(527,333)
Distribusi	(513,781)			(513,781)
Barang rusak	(448,861)			(448,861)
Sewa dan penyusutan	(402,028)			(402,028)
Perjalanan dinas dan transportasi	(126,959)			(126,959)
Perbaikan dan pemeliharaan	(110,071)			(110,071)
Pajak ekspor, administrasi ekspor, pajak lainnya dan perizinan	(65,276)			(65,276)
Piutang tak tertagih	(62,603)	62,603		0
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 50.000)	(386,516)	386,516		0
Total beban penjualan dan distribusi	(8,489,356)			(7,692,570)
Biaya Umum dan Administrasi				
Gaji	(2,816,577)			(2,816,577)
Sumbangan, dan representasi	(530,576)	530,576		0
Sewa dan penyusutan	(348,439)			(348,439)
Utilitas, perbaikan dan pemeliharaan	(220,785)			(220,785)
Outsourcing	(170,785)			(170,785)
Pajak dan perizinan	(118,065)	118,065		0
Perjalanan dinas dan transportasi	(107,966)			(107,966)
Hubungan investor dan masyarakat	(97,180)			(97,180)
Jasa tenaga ahli	(84,251)			(84,251)
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 50.000)	(202,549)	202,549		0
Jumlah Biaya Umum dan	(4,697,173)			(3,845,983)

Administrasi				
Jumlah Beban Usaha	(13,186,529)			(11,538,553)
LABA USAHA	9,529,832			11,177,808
Pendapatan (Beban) Lain-lain				
Penghasilan royalti dan teknis	317,317		(317,317)	0
Penjualan barang bekas	225,192			225,192
Laba dari penjualan aset dan persediaan	35,752			35,752
Laba selisih kurs	(133,238)			(133,238)
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 25.000)	291,709	291,709		0
Rugi neto selisih kurs	(257,721)			(257,721)
Penyisihan atas piutang plasma	(139,277)			(139,277)
Amortisasi aset tak berwujud	(133,238)			(133,238)
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 25.000)	(228,895)	228,895		0
Penghasilan bunga	(554,267)		(554,267)	0
Laba neto selisih kurs	275,566			275,566
Beban bunga	(1,458,597)	110,853		(1,347,744)
Pinjaman bank	(268,421)			(268,421)
Beban lain-lain (net)	(2,028,118)			(1,743,129)
Laba sebelum pajak penghasilan	7,501,714			9,434,679
PPH tahun 2019	(1,875,428.50)			(2,358,669.85)
Laba bersih	5,626,286			7,076,010

Lampiran 20 Koreksi Fiskal terhadap Laporan Keuangan PT Multi Bintang Indonesia Tbk Tahun 2019 (Dalam Jutaan Rupiah)

Uraian	Komersial	Koreksi Fiskal		Fiskal
		Positif	Negatif	
PENJUALAN BERSIH	3,711,405			3,711,405
Beban pokok penjualan	(1,426,351)			(1,426,351)
LABA KOTOR	2,285,054			2,285,054
BEBAN USAHA				
Beban Penjualan				
Promosi	(237,384)			(237,384)
Gaji dan tunjangan	(96,977)			(96,977)
Lain-lain	(33,566)	33,566		0

Jumlah beban penjualan	(367,927)			(334,361)
Biaya Umum dan Administrasi				
Gaji dan kompensasi karyawan	(72,511)			(72,511)
Penyusutan dan amortisasi	(12,380)			(12,380)
Perjalanan, komunikasi, jasa profesional dll.	(122,963)	61,482		(61,482)
Jumlah Biaya Umum dan Administrasi	(207,854)			(146,373)
Jumlah Beban Usaha	(575,781)			(480,734)
LABA USAHA	1,709,273			1,804,321
Pendapatan (Beban) Lain-lain				
Beban Bunga	(871)	2,006		1,135
Penghasilan bunga	10,029		(10,029)	0
Dividen	222,063	222,063		444,126
Perjamuan, sumbangan, dan lainnya	(4,171)	4,171		0
Beban lain-lain	227,050			
Laba sebelum pajak penghasilan	1,482,223			1,804,321
PPh tahun 2019	(420,553)			(451,080.13)
Laba bersih	1,061,670			1,353,240

Lampiran 21 Koreksi Fiskal terhadap Laporan Keuangan PT Mayora Indah Tbk
Tahun 2019 (Dalam Jutaan Rupiah)

Uraian	Komersial	Koreksi Fiskal		Fiskal
		Positif	Negatif	
PENJUALAN BERSIH	25,026,739,472,547			25,026,739,472,547
Beban pokok penjualan	17,109,498,526,032			17,109,498,526,032
LABA KOTOR	7,917,240,946,515			7,917,240,946,515
BEBAN USAHA				
Beban Penjualan				
Iklan dan promosi	(3,393,230,779,946)			(3,393,230,779,946)
Pengiriman	(366,623,327,067)			(366,623,327,067)
Gaji	(170,410,307,644)			(170,410,307,644)
Survei dan penelitian	(47,512,672,713)			(47,512,672,713)
Perjalanan dinas	(16,226,683,816)			(16,226,683,816)
Sumbangan dan hiburan	(10,698,681,217)	10,698,681,217		0
Sewa	(8,599,775,042)			(182,030)
Asuransi	(6,461,061,208)	6,461,061,208		0
Pajak dan	(5,396,764,195)	5,396,764,195		0

perijinan				
Perbaikan dan pemeliharaan	(549,623,524)			(549,623,524)
Barang cetakan dan alat tulis	(210,222,797)			(210,222,797)
Lain-lain	(2,066,934,316)			(2,066,934,316)
Jumlah beban penjualan	(4,027,986,833,485)			(3,996,830,733,853)
Biaya Umum dan Administrasi				
Gaji	(264,827,232,726)			(264,827,232,726)
Imbalan kerja jangka panjang	(143,385,846,265)			(143,385,846,265)
Sewa	(122,872,290,778)			(122,872,290,778)
Penyusutan	(49,220,822,439)			(49,220,822,439)
Pajak dan perijinan	(21,227,926,442)	21,227,926,442		0
Perjalanan dinas	(19,524,917,112)			(19,524,917,112)
Sumbangan dan representasi	(18,736,108,767)	18,763,108,767		0
Asuransi	(17,302,840,184)			(17,302,840,184)
Penghapusan piutang tak tertagih	(16,298,407,205)			(16,298,407,205)
Pemeliharaan	(8,843,503,800)			(8,843,503,800)
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	(8,545,147,441)			(8,545,147,441)
Laboratorium	(6,863,627,059)			(6,863,627,059)
Jasa Profesional	(6,561,538,957)			(6,561,538,957)
Rekrutmen	(2,995,361,114)			(2,995,361,114)
Barang cetakan dan alat tulis	(2,686,262,976)			(2,686,262,976)
Rapat dan publikasi	(2,034,319,416)			(2,034,319,416)
Telepon dan faksimili	(1,707,226,841)	853,613,421		0
Listrik, air dan gas	(1,040,246,753)			(1,040,246,753)
Pajak final	(402,223,705)	402,223,705		0
Kerugian penurunan nilai piutang	(328,818,038)			(328,818,038)
Lain-lain	(1,584,893,978)	1,584,893,978		0
Jumlah Biaya Umum dan Administrasi	(716,989,561,996)			(673,331,182,263)
Jumlah Beban Usaha	(4,744,976,395,481)			(4,670,161,916,116)
LABA USAHA	3,172,264,551,034			3,247,079,030,399
Pendapatan (Beban) Lain-lain				

Jasa Giro	29,347,366,438		(29,347,366,438)	0
Deposito berjangka	23,005,476,639		(23,005,476,639)	0
Beban Bunga	(355,074,879,758)	10,470,568,615		(344,604,311,143)
Penjualan barang bekas	24,291,071,246			(133,238)
Pendapatan sewa	7,109,184,000			(125,112)
Klaim asuransi	3,007,053,643			(42,788)
Biaya administrasi bank	(5,858,305,365)			(5,858,305,365)
Pemulihan kerugian cadangan kerugian penurunan nilai	(25,161,400)			(25,161,400)
Lain-lain	10,324,258,599			10,324,258,599
Beban lain-lain	(263,873,935,958)			(340,163,820,447)
Laba sebelum pajak penghasilan	3,436,138,486,992			2,906,915,209,952
PPH tahun 2019	(859,034,621,748)			(726,728,802,488.00)
Laba bersih	2,577,103,865,244			2,180,186,407,464

Lampiran 22 Koreksi Fiskal terhadap Laporan Keuangan PT Sekar Laut Tbk Tahun 2019 (Dalam Jutaan Rupiah)

Uraian	Komersial	Koreksi Fiskal		Fiskal
		Positif	Negatif	
PENJUALAN BERSIH	1.281.116.255.236			1.281.116.255.236
Beban pokok penjualan	(957.200.088.005)			(957.200.088.005)
LABA KOTOR	323.916.167.231			323.916.167.231
BEBAN USAHA				
Beban Penjualan				
Gaji dan tunjangan	(47.553.078.550)			(47.553.078.550)
Promosi dan iklan	(39.630.817.158)			(39.630.817.158)
Pengiriman	(25.049.802.511)			(25.049.802.511)
Angkutan ekspor	(5.266.752.176)			(5.266.752.176)
Perjalanan	(7.098.664.785)			(7.098.664.785)
Penyusutan	(5.919.425.618)		(10.350.865.935)	(16.270.291.553)
Sewa cold storage dan kendaraan	(1.757.855.054)			(1.757.855.054)
Pemeliharaan	(1.432.539.979)			(1.432.539.979)
Lainnya (masing-masing di bawah Rp 200 juta)	(1.161.893.313)	1.276.558.527		114.665.214
Total Beban Penjualan	(134.870.829.144)			(143.945.136.552)
Beban Umum dan Administrasi				
Gaji dan tunjangan	(52.150.983.922)	(4.880.215.186)		(47.270.768.736)
Kantor dan umum	(13.313.650.711)			(13.313.650.711)

Imbalan kerja	(13.744.230.209)			(13.744.230.209)
Air, listrik dan telepon	(5.598.892.799)			(5.598.892.799)
Pemeliharaan	(5.250.248.303)			(5.250.248.303)
Asuransi	(4.861.484.091)			(4.861.484.091)
Penyusutan	(3.572.319.069)	811.243.750		(2.761.075.319)
Perjalanan	(2.127.864.388)			(2.127.864.388)
Pajak	(1.769.159.037)	427.337.615		(1.341.821.422)
Entertainment	(1.515.111.233)			(1.515.111.233)
Admin bank	(606.348.759)			(606.348.759)
Sewa	(282.666.672)			(282.666.672)
Lainnya (masing-masing di bawah Rp 800 juta)	(3.013.057.459)	816.010.526		(2.197.046.933)
Total Beban Umum dan Administrasi	(107.805.716.652)			(100.871.209.575)
LABA USAHA	81.239.621.435			403.015.988.335
Pendapatan Lainnya				
Pendapatan bunga	151.903.261		(32.701.937)	119.201.324
Pendapatan sewa	3.761.221.568		(3.738.421.568)	22.800.000
Beban bunga	(21.525.483.689)			(21.525.483.689)
Laba Investasi pada entitas asosiasi	1.262.753.553		(11.709.864.290)	(10.447.110.737)
Laba (rugi) Selisih Kurs, neto	(686.963.074)			(686.963.074)
Laba penjualan aset tetap	651.613.502			651.613.502
Kerugian penurunan nilai piutang	(1.204.484.027)	4.438.303		(1.200.045.724)
Kerugian penurunan nilai persediaan	(7.127.011.169)		(96.091.900)	(7.223.103.069)
Lain-lain, neto	259.035.217		(1.642.793.273)	(1.383.758.056)
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	56.782.206.578			361.343.138.812
PPH tahun 2019	11.838.578.678			90.335.784.703
Laba bersih	44.943.627.900			271.007.354.109

Lampiran 23 Koreksi Fiskal terhadap Laporan Keuangan PT Ultra Jaya Milk Industry dan Trading Company Tbk Tahun 2019 (Dalam Jutaan Rupiah)

Uraian	Komersial	Koreksi Fiskal		Fiskal
		Positif	Negatif	
PENJUALAN BERSIH	6,241,419			6,241,419
Beban pokok penjualan	(3,891,701)			(3,891,701)
LABA KOTOR	2,349,718			2,349,718
BEBAN USAHA				
Beban Penjualan				

Iklan dan promosi	(455,752)			(455,752)
Angkutan	(223,193)			(223,193)
Gaji dan upah	(81,637)			(81,637)
Sewa	(56,482)			(56,482)
Kerusakan Barang	(7,105)			(7,105)
Bahan Bakar	(6,261)	3,131		(3,131)
Asuransi	(6,048)			(6,048)
Perjalanan dinas	(4,953)			(4,953)
Komunikasi	(4,109)	2,055		(2,055)
Penyusutan aset tetap	(1,333)			(1,333)
Pemeliharaan dan perbaikan	(691)			(691)
Lain-lain	(61,313)	61,313		-
Jumlah beban penjualan	(908,877)			(678,945)
Biaya Umum dan Administrasi				
Gaji dan upah	(108,168)			(108,168)
Penyusutan aset tetap	(9,517)			(9,517)
Listrik dan energi	(8,806)			(8,806)
Sewa	(4,659)			(4,659)
Amortisasi aset tak berwujud	(2,893)			(2,893)
Lain-lain	(68,840)	68,840		-
Jumlah Biaya Umum dan Administrasi	(202,883)			(134,043)
Jumlah Beban Usaha	(1,111,760)			(812,988)
LABA USAHA	1,237,958			1,536,730
Pendapatan (Beban) Lain-lain				
Penghasilan sewa	7,019			7,019
Penjualan barang bekas	3,919			3,919
Biaya dan denda pajak	(5,030)	5,030		0
Biaya kerusakan bahan baku dan barang jadi	(20,605)			(20,605)
Biaya bank	(2,616)			(2,616)
Rugi penjualan hewan ternak produksi	(5,426)			(5,426)
Lain-lain	108,154			108,154
Deposito	58,622		(58,622)	-
Investasi dalam obligasi pemerintah	1,658,060,329		(1,658,060,329)	0
Jasa giro dan lain-lain	3,778		(3,778)	0
Bunga pinjaman bank	(1,435)	1,435		-

Amortisasi beban keuangan	198			198
Lain-lain	(28)			(28)
Beban lain-lain	1,658,206,907			90,615
Laba sebelum pajak penghasilan	1,659,444,865			1,627,345
PPH tahun 2019	(414,861,216.25)			(406,836.25)
Laba bersih	1,244,583,649			1,220,509